GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) PROGRAM /KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

YANG TELAH DITELAAH/DIVERIFIKASI

OLEH TIM DRIFER PPRG

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
JL. H. AGUS SALIM No. 1 PAINAN, TELP 21000-21313 FAX 21414-22169

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

TAHUN ANGGARAN : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2022

PROGRAM	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
KEGIATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
KODE PROGRAM	8.01.05.2.01
Sub Kegiatan	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) a) Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebanyak 514.444 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak 255.654 dan laki-laki sebanyak 258.790 jiwa. b) Jumlah kasus pemakai dan pengedar narkotika di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebanyak 26 kasus. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender *a. Faktor Kesenjangan* Akses: Masih terbatasnya akses bagi laki-laki dan perempuan terhadap informasi bahaya penyalahgunaan narkotika baik melalui media cetak, elektronik maupun sosialisasi karena penyebarluasan informasi yang masih terbatas. Partisipasi: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terutama orang tua terhadap bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika.

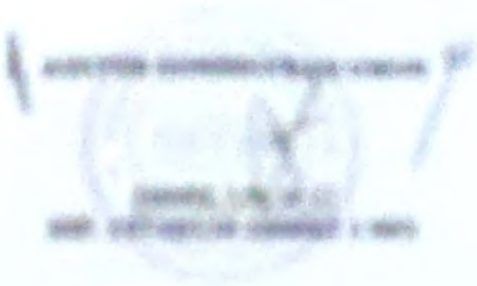
Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	Kontrol: • Kurangnya kontrol orang tua terhadap pergaulan anak diluar rumah • Kurangnya kepedulian lingkungan terhadap pergaulan anak-anak muda yang dapat menjurus pada narkoba **Manfaat:** . Sosialisasi terhadap bahaya narkotika belum memberikan manfaat secara signifikan terhadap masyarakat secara umum dan orang tua hkususnya perempuan terhadap bahaya narkoba dan cara mengatasinya terhadap anak-anak dan remaja sebagai generasi muda yang mudah terpengaruh narkoba ***b. Penyebab Internal*** • Keterbatasan anggaran. • Belum adanya pemantauan terhadap hasil sosialisasi oleh Pelaksana. ***c. Penyebab Eksternal*** • Adanya anggapan perempuan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkotika merupakan tugas dari aparat penegak hukum.		
CAPAIAN KEGIATAN	**1. TOLAK UKUR :** Menumbuhkan kesadaran segenap kelompok masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menurunkan tingkat penyalahgunaan Narkotika. **2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA** Menumbuhkan kesadaran segenap kelompok masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menurunkan tingkat penyalahgunaan Narkotika.		
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN	**Rp. 314.648.314,-**		
RENCANA AKSI	**Sub Kegiatan**	**1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.** **2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	
			• Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika melalui Tatap Muka • Sosialisasi melalui Spanduk, Baliho dan Leaflet. • Peringatan hari Anti Narkotika Internasional. Tes Urine Bagi Aparatur Sipil Negara
		Masukan	**Rp. 314.648.314,-**
		Keluaran	Sosialisasi pencegahan penyalagunaan narkotika sebanyak 15 Kecamatan.
		Hasil	Menurunnya jumlah penyalahgunaan Narkotika.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
JL. H. AGUS SALIM No. 1 PAINAN, TELP 21000-21313 FAX 21414-22169

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

TAHUN ANGGARAN : **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2022**

PROGRAM	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**
KEGIATAN	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**
KODE PROGRAM	**8.01.06.2.01.**
SUB KEGIATAN	**1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.** **2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.** **3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.**
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a) Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebanyak 511.725 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak 253.812 dan laki-laki sebanyak 257.913 jiwa b) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 telah mengeluarkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Rekomendasi berkaitan dengan potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban serta gejala atau peristiwa bencana alam. c) Dasar hukum terkait Forum Kewaspadaan Dini masyarakat. Berdasarkan Permendagri 46 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender *a. Faktor Kesenjangan* **Akses:** Dalam pengawasan pelaksanaan ketertiban dan keamanan lingkungan masih didominasi oleh kaum laki-laki karena perempuan jarang dilibatkan dalam kegiatan pelaksanaan ketertiban dan keamanan. **Partisipasi:** Kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan karena adanya anggapan bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan tugas dari laki-laki. **Kontrol:** Keterlibatan perempuan dalam pengawasan pelaksanaan ketertiban dan keamanan lingkungan belum optimal karena perempuan jarang dilibatkan dalam kegiatan pelaksanaan ketertiban dan keamanan. **Manfaat:** Perempuan kurang memperoleh manfaat dalam kegiatan ini karena terbatasnya informasi tentang pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. *b. Penyebab Internal* • belum menjadi skala prioritas kegiatan • Masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap peran serta masyarakat untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan sebagai upaya deteksi dini terhap gejala dan potensi ancamana bencana • Belum adanya pemantauan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Forum kewaspaan Dini Masyarakat. *c. Penyebab Eksternal* • Adanya anggapan perempuan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan merupakan tugas laki-laki.
CAPAIAN KEGIATAN	**1. TOLAK UKUR :** Menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban baik dari segi ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecendrungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana. **2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA** • Rapat kordinasi Tim kewaspadaan dini daerah sebanyak 4 kali. • Rapat koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat sebanyak 4 kali.
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN	**Rp. 324.535.356,-**

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI	**Kegiatan**	**Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat**	
			• Rapat koordinasi dengan kelompok masyarakat untuk menghimpun informasi berkaitan potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban serta gejala atau peristiwa bencana alam. • Mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban serta gejala atau peristiwa bencana alam.
		Masukan	**Rp. 324.535.356,-**
		Keluaran	• Rapat kordinasi Tim kewaspadaan dini daerah sebanyak 4 kali. • Rapat koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat sebanyak 4 kali.
		Hasil	Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

HAMDI, S.Pt, M.Si

NIP. 19740530 200003 1 005

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Verifiasi

Lembar :1

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

PROGRAM : 8.01.05.2.01 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

KEGIATAN : 8.01.05.2.01. - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

SUB KEGIATAN : 8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

SUB KEGIATAN : 8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER						
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). **Kegiatan :** Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika **Tujuan :** 1) Menyampaikan informasi berkaitan dengan bahaya pengalahgunaan Narkotika baik ditinjau dari segi agama, kesehatan dan hukum melalui	a) Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebanyak 514.444 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak 255.654 dan laki-laki sebanyak 258.790 jiwa. b) Jumlah kasus pemakai dan pengedar narkotika di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebanyak 26 kasus. c) Jumlah laki-laki 36 org dan perempuan 3 org yang menjadi pengedar/pemakai.....	**Akses :** • Masih terbatasnya akses bagi laki-laki dan perempuan terhadap informasi bahaya penyalahgunaan narkotika baik melalui media cetak, elektronik maupun sosialisasi karena penyebarluasan informasi yang masih terbatas. **Partisipasi :** • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terutama orang tua terhadap bahaya dan dampak	• Keterbatasan anggaran • Masih kurangnya media informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba • Belum adanya pemantauan terhadap hasil sosialisasi	• Adanya anggapan masyarakat bahwa pencegahan dan pemberantasan narkotika merupakan tugas dari aparat penegak hukum	Menumbuhkan kesadaran segenap kelompok masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menurunkan tingkat penyalahgunaan Narkotika	• Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika melalui Tatap Muka ke sekolah-sekolah • Sosialisasi melalui Spanduk, Baliho dan Leaflet. • Peringatan hari Anti Narkotika Internasional.	- Jumlah kasus pemakai dan pengedar narkotika di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebanyak 26 kasus.	**Input :** Rp. 314.648.314 **Output :** Sosialisasi pencegahan penyalagunaan narkotika sebanyak 15 Kecamatan. **Outcome :** Menurunnya jumlah penyalahgunaan Narkotika.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Verifiasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER						
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Sosialisasi Tatap Muka maupun Baliho. Leaflet/Brosur. 2) Menumbuhkan kesadaran segenap kelompok masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika.	d) Jumlah sekolah yang sudah pernah diberikan sosilaisasi narkoba 30 Sekolah	penyalahgunaan narkotika. **Kontrol :** • Kurangnya kontrol orang tua terhadap pergaulan anak diluar rumah • Kurangnya kepedulian lingkungan terhadap pergaulan anak-anak muda yang dapat menjurus pada narkoba **Manfaat :** • Sosialisasi terhadap bahaya narkotika belum memberikan manfaat secara signifikan terhadap masyarakat secara umum dan orang tua hkususnya perempuan terhadap bahaya narkoba dan cara mengatasinya terhadap anak-anak dan remaja sebagai generasi muda yang mudah terpengaruh narkoba .						

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Verifikasi

Lembar 1

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

HAMDI, S.Pt, M.Si

NIP. 19740530 200003 1 005

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Verifikasi

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

PROGRAM : 8.01.06. - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

KEGIATAN : 8.01.06.2.01. – Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

SUB KEGIATAN : 8.01.06.2.01.02 – Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

SUB KEGIATAN : 8.01.06.2.01.04 – Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

SUB KEGIATAN : 8.01.06.2.01.05 – Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER						
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tujuan : Menjaring, menampung, mengkomunikasikan	a) Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebanyak 511.725 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak 253.812 dan laki-laki sebanyak 257.913 jiwa. b) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 telah mengeluarkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Rekomendasi berkaitan	Akses : Masih terbatasnya akses bagi masyarakat khususnya perempuan dalam pelaksanaan kegiatan memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan karena sedikitnya lembaga dan organisasi masyarakat yang melibatkan perempuan dalam memlihara ketertiban dan keamanan masyarakat..	• Masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap peran serta masyarakat untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan sebagai upaya deteksi dini terhap gejala dan	Adanya anggapan perempuan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan merupakan tugas laki-laki	Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan	• Rapat koordinasi dengan kelompok masyarakat untuk menghimpun informasi berkaitan potensi ancaman keamanan, ketentraman dan	a) Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebanyak 511.725 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak 253.812 dan laki-laki sebanyak 257.913 jiwa. b) Forum	Input : Rp. 324.835.356,- Output : • Rapat koordinasi Tim kewaspadaan dini daerah sebanyak 4 kali • Rapat koordinasi forum kewaspadaan dini

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Verifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER						
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban baik dari segi ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecendrungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana	dengan potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban serta gejala atau peristiwa bencana alam. Dasar Hukum/regulasi daerah terkait forum kewaspadaan dini masyarakat.....	**Partisipasi :** Kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan karena adanya anggapan bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan tugas dari laki-laki. **Kontrol :** Dalam pengawasan pelaksanaan ketertiban dan keamanan lingkungan masih didominasi oleh kaum laki-laki karena perempuan jarang dilibatkan dalam kegiatan pelaksanaan ketertiban dan keamanan. **Manfaat :** Perempuan kurang memperoleh manfaat dalam kegiatan ini karena terbatasnya informasi tentang pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	potensi ancamana bencana • Belum adanya pemantauan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Forum kewaspaan Dini Masyarakat			ketertiban serta gejala atau peristiwa bencana alam. • Mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban serta gejala atau peristiwa bencana alam.	Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 telah mengeluarkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Rekomendasi berkaitan dengan potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban serta gejala atau peristiwa bencana alam.	masyarakat sebanyak 4 kali. **Outcome :** Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Verifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

HAMDI, S.Pt, M.Si

NIP. 19740530 200003 1 005

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

Program : - Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- Pemberdayaan masyarakat u/ menjaga ketertiban & keamanan

Kegiatan : * Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
* Forum kewaspadaan diri masyarakat.

Tangggal Verifikasi : 17 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	Zuhasper	
3	Irnawan (BPKAD)	
4	Dewi Lalumidarti (Dinas PPPA)	

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	Penngelolaan Pendapatan Daerah
KODE PROGRAM	**3.00.03.02.17.**
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Pendataan Dan Verifikasi Nomor Objek PBB-P2 salah satu cara untuk melihat kelengkapan dan penyempurnaan data objek wajib pajak daerah kabupaten Pesisir Selatan. b. Pendataan Pajak dilakukan pada 182 nagari di Kab. Pesisir Selatan. c. Pendataan pada tahun 2020 masih banyak objek pajak yang tidak valid. d. Terjadinya objek pajak ganda dan pendataan objek pajak baru belum maksimal. e. Pendataan dilakukan oleh kolektor pajak dan diverifikasi oleh staf Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan dan tidak dipermasalahkan jenis kelaminnya. f. Perda Pajak PBB-P2 Nomor 14 Tahun 2012 tentang pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** **1. AKSES** ❖ Objek Pajak Ganda ❖ Data yang objek yang digunakan masih data lama yang tidak valid. ❖ Jarak daerah pendataan objek pajak yang jauh dan membutuh banyak waktu. ❖ Kurangnya pemahaman dan informasi tentang manfaat pajak **2. PARTISIPASI** ❖ Kurangnya Pengetahuan Kolektor dalam tata cara pemungutan dan pendataan objek pajak. ❖ Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. **3. KONTROL** Pemungutan Pajak dilakukan tanpa adanya pendataan dan verifikasi data yang sudah ada, yaitu tentang adanya objek pajak ganda. **b. Penyebab Internal** Kurang maksimalnya anggota tim pengelola PBB-P2 dalam memverifikasi data objek pajak, sehingga masih adanya objek pajak ganda yang terdapat pada tahun lalu. **c. Penyebab Eksternal** ❖ Adanya Anggapan bahwa Objek pajak ganda tidak masalah yang penting seluruh SPPT yang diberikan sudah tersebar dengan baik. ❖ Tidak adanya tanggung jawab pemilik opbjek pajak tidak produktif/ ahan kososng
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Meningkatnya Capaian Pajak PBB-P2
	2. Indikator dan Target Kinerja Terwujudnya pendataan ulang terdapat Objek Pajak Ganda **Output:** Adanya kolektor yang kompeten di Nagari **Outcome :** Data Objek Pajak dan SPPT yang dikumpulkan lebih baik.

Dipindai dengan CamScanner

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 100.000.000,00		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Melakukan pendataan ulang terrhadap Objek Pajak Ganda	
		Masukan	Rp.....,-
		Keluaran	
		Hasil	Meningkatnya jumlah objek pajak
	Kegiatan 2	Bimbingan teknis bagi seluruh kolektor agar bisa mengumpulkan pajak lebih maksimal	
		Masukan	Rp.....,-
		Keluaran	
		Hasil	Data Objek pajak dan sppt yang dikumpulkan lebih baik.
	Kegiatan 3	Verifikasi Objek Pajak untuk tahun berikutnya dilakukan tahun sebelumnya	
		Masukan	Rp.....,-
		Keluaran	
		Hasil	Tidak adanya Objek Pajak Ganda untuk tahun berikutnya

Painan, 23 Juni 2021
Plt. Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Ir. ROSDI, M.Si
NIP. 19640907 199308 1 008

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah **Kegiatan** : Pengelolaan Pendapatan Daerah **Sub Kegiatan:** Pemeriksaan Pajak Daerah **Tujuannya :** Terlaksananya Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	❖ Pendataan Dan Verifikasi Nomor Objek PBB-P2 salah satu cara untuk melihat kelengkapan dan penyempurnaan data objek wajib pajak daerah kabupaten Pesisir Selatan. ❖ Pendataan Pajak dilakukan pada 182 nagari di Kab. Pesisir Selatan. ❖ Pendataan pada tahun 2020 masih banyak objek pajak yang tidak valid. ❖ Terjadinya objek pajak ganda dan pendataan	**AKSES** ❖ Objek Pajak Ganda ❖ Data yang objek yang digunakan masih data lama yang tidak valid. ❖ Jarak daerah pendataan objek pajak yang jauh dan membutuhkan banyak waktu. ❖ Kurangnya pemahaman dan informasi tentang manfaat pajak **PARTISIPASI** ❖ Kurangnya Pengetahuan Kolektor dalam tata cara pemungutan dan	❖ Kurang maksimalnya anggota tim pengelola PBB-P2 dalam memverifikasi data objek pajak, sehingga masih adanya objek pajak ganda yang terdapat pada tahun lalu. ❖ Kurangnya peran	❖ Adanya Anggapan bahwa Objek pajak ganda tidak masalah yang penting seluruh SPPT yang diberikan sudah tersebar dengan baik. ❖ Tidak adanya tanggung jawab pemilik opbjek pajak tidak produktif/ lahan kosong	Meningkatnya Capaian Pajak PBB-P2	❖ Melakukan pendataan ulang terrhadap Objek Pajak Ganda ❖ Bimbingan teknis bagi seluruh kolektor agar bisa mengumpulkan pajak lebih maksimal ❖ Verifikasi Pajak untuk tahun berikutnya harus dilakukan setelah selesainya pemungutan pajak pada tahun sebelumnya, sehingga dapat meminimalisir adanya objek pajak ganda.	Data yang digunakan saat ini data objek pajak dari KPP-PBB Pratama Padang	Terwujudnya Pendataan Ulang Terdapat Objek Pajak Ganda **Output:** Adanya kolektor yang kompeten di Nagari **Outcome :** Data Objek pajak dan sppt yang dikumpulkan lebih baik.

Dipindai dengan CamScanner

	objek pajak baru belum maksimal. ❖ Pendataan dilakukan oleh kolektor pajak dan diverifikasi oleh staf Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan dan tidak dipermasalahkan jenis kelaminnya. ❖ Perda Pajak PBB-P2 Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.	pendataan objek pajak. ❖ Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak **KONTROL** ❖ Pemungutan Pajak dilakukan tanpa adanya pendataan dan verifikasi data yang sudah ada, yaitu tentang adanya objek pajak ganda.	aktif petugas pajak untuk menginformasikan manfaat pajak.					

Plt.KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. ROSDI, M.Si
NIP. 19640907 199308 1 008

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : BADAN PENDAPATAN

Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan/Sub kegiatan : Pemeriksaan Pajak Daerah.

Tangggal Verifikasi : 23 juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Riftomi (Bapeldalbang).	
2		
3	Desi Lalusmidarti (Dinkes PPPA)	
4	Irnawati (BPKAD)	

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Bapedalitbang
TAHUN ANGGARAN : 2022

Hasil Verifikasi

PROGRAM			
KODE PROGRAM	1.18.1.18.01..16. 02		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) - Kantor Bapedalitbang merupakan gedung kantor lama dan dilengkapi dengan gedung pertemuan kapasitas 300 org. - Luas gedung kantor 600 m2 dan luas ruang pertemuan 800 m2. - Kondisi saat ini dimana gedung kantor belum memeiliki akses untuk disabilitas - Belum adanya ruang laktasi - Mushala belum tersedia yang ada hanya tempat shalat dengan kapasitas 10		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan - Gedung yang ditempati merupakan gedung lama b. Penyebab Internal - Keterbatasan anggaran c. Penyebab Eksternal - Pengalokasian anggaran belum mempertimbangkan kebutuhan sarana prasarana yang layak		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur .Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur		
	2. Indikator dan Target Kinerja 100%		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp.75.600.000,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	
		Masukan	Rp. 75.600.000,-
		Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan bangunan gedung serta Mushala Bapedalitbang
		Hasil	Terpeliharanya asset gedung kantor
	Kegiatan 2	-	
		Masukan	Rp. -
		Keluaran	-
		Hasil	-
	Kegiatan 3	-	
		Masukan	Rp. -
		Keluaran	-
		Hasil	-

Painan, 23 Juni 2021
Kepala Bapedalitbang Kab.Pesel

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

OZKI WANDRI, S.Pi.,M.Si.
NIP. 19750101 200003 1 003

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Bapedalitbang
TAHUN ANGGARAN : 2022

Hasil Verifikasi

PROGRAM			
KODE PROGRAM	1.18.1.18.01..16. 02		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni UU No 25 tahun 2004 dan permendagri no 54 tahun 2010, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen prencanaan menggunakan pendekatan top down, bottom up, teknokratik, politis, aspiratif. - Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif - Kondisi saat ini pada RKPD tahun 2020 dan 2021 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain : disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin perempuan (janda), dll masih minim.		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** - Undangan tidak menjangkau semua komponen masyarakat - Jadwal pelaksanaan musrenbang disesuaikan dengan jadwal kepala daerah - Informasi pelaksanaan musrenbang minim - Aplikasi E planning diganti dengan SIPD sehingga perlu penyesuaian **b. Penyebab Internal** - Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan - waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang dibahas - Kurangnya pemahaman Pengelola kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang responsif gender **c. Penyebab Eksternal** - Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti musrenbang - Pelaksanaan kegiatan musrenbang lebih mengutamakan seremonial dari pada substansi pembahasan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala SKPD minim - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan - Protokol kesehatan Pandemi Covid -19 tidak memperbolehkan undangan terlalu banyak		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** .Terwujudnya sistem perencanaan daerah yang berkualitas dan partisipatif		
	2. Indikator dan Target Kinerja 100%		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 176.000.000,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	
		Masukan	Rp. 176.000.000,-
		Keluaran	Terselenggaranya proses penyusunan perencanaan .daerah yang aspiratif dan partisipatif
		Hasil	Tersedianya RKPD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
	Kegiatan 2	-	
		Masukan	Rp. -
		Keluaran	-
		Hasil	-
	Kegiatan 3	-	
		Masukan	Rp.-
		Keluaran	-
		Hasil	-

Pangkalpinang, 23 Juni 2021
Kepala Bapedalitbang Kab.Pe.Sel

YOZY ANDRI,S.Pi.M.Si.
NIP. 19730101 200003 1 003

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Bapedalitbang

Hasil verifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ Kota **Kegiatan :** Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan :** Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **Tujuan :** Tersedianya bangunan gedung kantor yang representative guna meningkatkan kinerja Bapedalitbang	-Kantor Bapedalitbang merupakan gedung kantor lama dan dilengkapi dengan gedung pertemuan kapasitas 300 orang. -Luas gedung kantor 600 m2 dan luas ruang pertemuan 800 m2 -Pegawai di Bapedalitbang 32 orang yang terdiri dari 14 orang laki laki dan 18 orang perempuan -Akses untuk disabilitas belum ada -Belum adanya ruangan laktasi -Mushalla belum tersedia yang ada hanya tempat shalat kapasitas 10 org dan kondisi bocor. -Toilet (WC) untuk wanita baru 1 dan kurangnya fasilitas untuk responsive gender (kaca dan gantungan tas)	**Akses** - Gedung yang ditempati merupakan gedung lama **Partisipasi** - **Kontrol** - Penentuan asset gedung yang tidak terpakai lagi ditentukan sepenuhnya oleh bidang aset **Manfaat** - Belum representative ruangan kantor untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas, lansia, ibu menyusui)	Pengalokasian anggaran belum mempertimbangkan kebutuhan sarana prasarana yang layak	- Perlunya koordinasi dengan bidang Asset	Tersedianya bangunan gedung kantor yang representative guna meningkatkan kinerja Bapedalitbang	- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor - Pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	-Akses untuk disabilitas belum ada -Belum adanya ruangan laktasi -Mushalla belum tersedia yang ada hanya tempat shalat kapasitas 10 org. -Belum lengkapnya sarana prasarana wc untuk wanita (kaca, gantungan tas)	Kegiatan 1; Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Input; Rp. 224.000.000,- Output: Terlaksanya pemeliharaan perlengkapan dan bangunan gedung kantor serta mushala bapedalitbang yang responsive Outcome; Terpeliharanya asset gedung kantor Kegiatan 2; Pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor Input; Rp.100.000.000,- Output: Terlaksananya pembangunan fasilitasi gedung kantor yang

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
								responsive gender Outcome; Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatife

Catatan :

1. Langkah ke 2, berisikan dasar hukum dan fakta atau fenomena yang terjadi
2. Langkah ke 3, bias manfaat

Painan, 23 Juni 2021

Kepala Kesbangpolitbang Kab. Pessel

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BOZKI JANDRI,S.P.I.M.Si.

NIP. 19750101 200003 1 003

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Bapedalitbang

Hasil verifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah **Kegiatan :** Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan **Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota **Tujuan :** Terselenggaranya Musrenbang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang responsive	-Dasar penyusunan perencanaanpembangunan daerah yakni UU No 25 tahun 2004 dan permendagri no 54 tahun 2010, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen prencanaan menggunakan pendekatan top down, bottom up, teknokratik, politis, aspiratif. -Jumlah Penduduk Pesisir Selatan tahun 2018 sebanyak 508.691 jiwa terdiri dari laki-laki 257.040 jiwa dan perempuan 251.651 jiwa -Jumlah Disabilitas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebanyak 2.319 orang. -Jumlah Lansia Kab. pesisir selatan tahun 2020 sebanyak 49. 472 orang	**Akses** - Undangan tidak menjangkau semua komponen masyarakat - Informasi pelaksanaan musrenbang minim **Partisipasi** - Materi yang disajikan dan cara penyampaian materi belum komunikatif untuk seluruh komponen yang di undang. - Belum semua unsur (disabilitas, lansia) terundang. **Kontrol** - Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan **Manfaat** - Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan top down dan politik.	- Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan. - Waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang dibahas. - Kurangnya pemahaman Pengelola kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan Musrembang yang responsif gender	- Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti musrembang. - Pelaksanaan kegiatan musrenbang lebih mengutamakan seremonial dari pada substansi pembahasan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala SKPD minim. - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas	Terselenggaranya Musrenbang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	- Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. - Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pesisir Selatan. - Implementasi sistem perencanaan . - Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan. - Penyusunan RKPD Tahun 2022	-Jumlah Penduduk Pesisir Selatan tahun 2018 sebanyak 508.691 jiwa terdiri dari laki-laki 257.040 jiwa dan perempuan 251.651 jiwa -Jumlah Disabilitas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018. -Jumlah Lansia Kab. pesisir selatan tahun 2020 sebanyak 49.472 -.Luas Wilayah Kab. Pessel 5.749,89 Km	Kegiatan 1; Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Input; Rp. 176.000.000,- Output: - Terselenggaranya proses penyusunan perencanaan daerah yang aspiratif dan partisipatif.. Outcome; Tersedianya RKPD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kegiatan 2; Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pesisir Selatan Input; Rp. Output: Pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	-.Luas Wilayah Kab. Pessel 5.749,89 Km -Pelaksanaan musrenbang tahun 2020 tidak dilakukan secara tatap muka kama adanya pandemic covid- 19			pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan				Musrenbang yang responsive Gender Outcome; Tersedianya RKPD yang mengakomodr rensponsif gender

Catatan :

1. Langkah ke 2, berisikan dasar hukum dan fakta atau fenomena yang terjadi
2. Langkah ke 3, bias manfaat

Painan, 23 Juni 2021

Kepala Bapedalitbang Kab. Pessel

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

YOZI ANDRI,S.Pi.M.Si.

NIP 19[illegible]0101 200003 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : BAPEDALITBANG.

Program :-Penunjang urusan Pemerintah Daerah kab/kota.
-Perencanaan, Pengendalian & evaluasi Pembangunan Daerah.

Kegiatan/sub.keg. :-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor & Bangunan lainnya.
- Pelaksanaan Musrenbang kab/kota.

Tangggal Verifikasi : 23 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Zuharpa	
2	Imawati (BPKAD)	
3	Dwi Lalusmiarti (Dinkes, PPPA)	
4		

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	**Program Pendidikan Kedinasan**		
KODE PROGRAM	3.00.04.29		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana diklat PIM Tk. III merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan eselon III. - Diklat Pim Tk. III ini harus di ikuti oleh PNS yang menduduki jabatan eselon III maksimal 6 (enam) bulan setelah menjabat. - Jumlah PNS yang menduduki jabatan eselon III saat ini sebanyak 159 orang terdiri dari 122 orang laki-laki dan 37 orang perempuan. Dan yang telah mengikuti diklat PIM tk. III sebanyak 36 orang, terdiri dari 29 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Jadi eselon III yang belum mengikuti diklat PIM Tk. III sebanyak 123 orang terdiri dari 93 orang laki-laki dan 30 orang perempuan - Karena keterbatasan anggaran, maka kegiatan Diklat PIM Tk. III tidak bisa diadakan sebagaimana mestinya.		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** - Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Diklat PIM Tk.III sehingga banyak PNS yang menduduki jabatan eselon III yang belum mengikuti diklat PIM Tk. III - Rendahnya partisipasi PNS yang menduduki jabatan eselon III (perempuan) dalam mengikuti diklat PIM Tk. III - Keterbatasan anggaran yang membuat pelaksanaan kegiatan Diklat PIM Tk. III tidak bisa dilaksanakan secara optimal **b. Penyebab Internal** - Karena keterbatasan anggaran, sehingga BKPSDM tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan Diklat PIM Tk. III sehingga pelaksanaan Kegiatan Diklat PIM Tk. III ini mengikuti pola kontribusi ke BPSDM Prov. Sumatera Barat - Dengan pola kontribusi ini membuat BKPSDM harus mengantri untuk memenuhi kuota peserta ke BPSDM Prov. Sumbar. **c. Penyebab Eksternal** - Pengalokasian anggaran belum mempertimbangkan kualitas dan kompetensi PNS - Masih rendahnya kemauan peserta diklat perempuan karena lebih memikirkan persoalan keluarga		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur**		
	2. Indikator dan Target Kinerja		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 500.000.000,-**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	
		Masukan	Rp. 500.000.000,-
		Keluaran	Terkirimnya 10 orang untuk Diklat Pim III
		Hasil	Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme sumber daya aparatur

Painan, 24 Juni 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Drs. YESPI NAWIARSIH
Nip. 19681017 198903 1 003

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Sudah Diverifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia **KEGIATAN:** Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan **TUJUAN:** Meningkatnya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	- Sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana diklat PIM Tk. III merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan eselon III. - Diklat Pim Tk. III ini harus di ikuti oleh PNS yang menduduki jabatan eselon III maksimal 6 (enam) bulan setelah menjabat. - Jumlah PNS yang menduduki jabatan eselon III saat ini	Akses : - Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Diklat PIM Tk.III sehingga banyak PNS yang menduduki jabatan eselon III yang belum mengikuti diklat PIM Tk. III Partisipasi : Rendahnya partisipasi PNS yang menduduki jabatan eselon III (perempuan) dalam mengikuti diklat PIM Tk. III Kontrol: Keterbatasan anggaran yang membuat pelaksanaan kegiatan Diklat PIM Tk. III tidak bisa dilaksanakan secar optimal	-Karena keterbatasan anggaran, sehingga BKPSDM tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan Diklat PIM Tk. III sehingga pelaksanaan Kegiatan Diklat PIM Tk. III ini mengikuti pola kontribusi ke BPSDM Prov. Sumatera Barat -Dengan pola kontribusi ini membuat BKPSDM harus mengantri untuk memenuhi kuota peserta ke	-Pengalokasian anggaran belum mempertimbang kan kualitas dan kompetensi PNS -Masih rendahnya kemauan peserta diklat perempuan karena lebih memikirkan persoalan keluarga	Meningkatya keterampilan dan profesionalisme aparatur.	-Melakukan pengalokasian anggaran untuk peningkatan kapasitas SMD -Melakukan pelaksanaan kegiatan keterampilan dan profesionalisme	- Kondisi sekarang eselon III yang telah mendapatkan Diklat Pim Tk. III sebanyak 36 orang, terdiri dari 29 orang laki-laki dan 7 orang perempuan., sehingga yang belum mengikuti diklat Pim Tk. III sebanyak 123 orang terdiri dari 93 orang laki-laki dan 30 orang perempuan	Kegiatan 1: Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Input: Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Diklat PIM Tk. III Rp. 500.000.000 Output: Bertambahnya jumlah peserta diklat yang memperoleh keterampilan dan profesionalisme Diterimanya sertifikat Diklat PIM Tk. III oleh peserta

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	sebanyak 159 orang, dan yang telah mengikuti diklat PIM tk. III sebanyak 36 orang, terdiri dari 29 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, jadi eselon III yang belum mengikuti diklat PIM Tk. III sebanyak 123 orang terdiri dari 93 orang laki-laki dan 30 orang perempuan - Karena keterbatasan anggaran, maka kegiatan Diklat PIM Tk. III tidak bisa diadakan sebagaimana mestinya.	Manfaat: Terpenuhinya amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana salah satu syarat untuk menduduki jabatan eselon III adalah dengan mengikuti Diklat PIM Tk. III	BPSDM Prov. Sumbar Pengiriman peserta untuk mengikuti Diklat PIM tk. III terb					Outcome : Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : BKPSDM

Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Tabatan Pimpinan Tinggi, Tabatan kepemimpinan dan Ftapabatan; Tabatan Fungsional

Tangggal Verifikasi : 23 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Irnawati	
2	Desi Lakemudah	
3		
4	Rifki Tomi (Pupuk Litbang).	

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	**PENANGGULANGAN BENCANA**		
KEGIATAN	**PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**		
KODE PROGRAM	**1.05.03.2.02.06**		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** – Penduduk di kawasan sekitar tepi pantai nelayan,bertani sebagian besar mata pencahariannya masih tergantung kepada nelayan, bertani dan hasil nelayan,bertani. – Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan program Penanggulangan Bencana Daerah. dilaksanakan di 25 Nagari yang tersebar di 7 Kecamatan.		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** – **Dari aspek Partisipasi:** Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam berperan mengikuti sosialisasi dan bimbingan kelembagaan pengelolaan penanganan *melalui skema HTR/HD/HKm hal ini dibuktikan dengan* sedikitnya jumlah peserta perempuan dalam kegiatan tersebut **b. Penyebab Internal** – Kurangnya komitmen pejabat pembuat kebijakan mengenai PUG – Kurangnya pemahaman aparatur tentang isu gender. Belum tersediannya data terpilah secara rinci. **c. Penyebab Eksternal** – Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal perencanaan pembangunan Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.		
CAPAIAN KEGIATAN	**1. Tolak Ukur** **Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana serta Sosialisasi, Pembinaan dan simulasi Bencana Bagi Kelompok Siaga Bencana (KSB) tingkat Nagari**		
	2. Indikator dan Target Kinerja **Persentase Jumlah Nagari Tangguh bencana**		
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN	**Rp.92.052.500,-** **MENINGKATNYA KAPASITAS DALAM MENGHAPI BENCANA**		
RENCANA AKSI RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
		Masukan	Rp.5,500.000,-
		Keluaran	
		Hasil	
	Kegiatan 2	Menyusun Skedul Kegiatan	
		Masukan	Rp.8.600.000,-
		Keluaran	
		Hasil	
	Kegiatan 3	Pembinan KSB tingkat Nagari	
		Masukan	Rp. 56.452.500,-
		Keluaran	
		Hasil	
	Kegiatan 4	Simulasi tingkat Nagari	
		Masukan	Rp. 21.500.000,-
		Keluaran	
		Hasil	

Painan, 23 Juni 2021

Kepala Pelasana BPBD,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ir. H.HERMAN BUDIARTO

NIP. 19670103 19903 1 010

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. PESISIR SELATAN

PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2022

Program : Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penanggulangan Bencana **Kegiatan** : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan **Tujuan** : Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Pengetahuan tentang upaya Pengurangan Resiko masyarakat berbasis nagari tangguh, dengan Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi bencana kabupaten.	– Pada tahun 2022 Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan,. Dilaksanakan di 25 Nagari yang tersebar di 7 Kecamatan – Penduduk di kawasan sekitar tepi pantai nelayan,bertani sebagian besar mata pencahariannya masih tergantung kepada nelayan, bertani dan hasil nelayan. – Masyarakat sekitar tepi pantai rentan terjadi dampak Bencana. Pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan nagari tanguh bencana terdiri dari laki-laki dan perempuan, masing-masing mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengelolaan	Dengan keterlibatan mayoritas laki laki pada acara sosialisasi dan bimbingan pengurangan resiko bencanan berbasis masyrakat dan nagari tanguh, melalui HTR/HD/HKm maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sbb: **Dari aspek Partisipasi:** Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam berperan mengikuti sosialisasi dan bimbingan pengembangan dan pengurangan resiko bencana berbasisi masyrakat dan nagari tanguh melalui skema HTR/HD/HKm hal ini dibuktikan dengan sedikitnya jumlah peserta perempuan dalam kegiatan tersebut. Hal ini dimungkinkan karena ketidak mengertian Wali Nagari/ Tokoh Masyarakat	– Kurangnya komitmen pejabat pembuat kebijakan mengenai PUG – Kurangnya pemahaman aparatur tentang isu gender. - Belum tersediannya data terpilah secara rinci.	– Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal perencanaan pembangunan - Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan berbasis masyarakat.	Meningkatkan kewaspadaan dalam penglolaan dan penanganan dampak bencana masyarakat sekitar di sekitar tepi pantai yang rentan terhadap bencana responsive gender	– Sosialisasi dan advokasi untuk pembuat kebijakan tentang isu gender. – Sosialisasi/pemberitahuan kepada Wali Nagari dan Tokoh Masyarakat bahwa perempuan juga dapat mengambil peran dalam kegiatan penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana, sehingga diharapkan sewaktu mengundang masyarakat wali nagari/tokoh masyarakat setempat dapat melibatkan kaum perempuan – Pembuatan juklak/juknis pelaksanaan kegiatan Penguatan	– Sosialisasi dan advokasi untuk pembuat kebijakan tentang isu gender. – Sosialisasi/pemberitahuan kepada Wali Nagari dan Tokoh Masyarakat bahwa perempuan juga dapat mengambil peran dalam kegiatan penguatan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat nagari tanguh penanganan dampak bencana yang berada di tepi pantai, sehingga diharapkan sewaktu mengundang masyarakat wali nagari/tokoh masyarakat setempat dapat melibatkan kaum perempuan - Pembuatan	**Output:** Terfasilitasinya masyarakat dalam pengembangan HTR/HD/HKm yang responsive gender, dihadiri oleh 85% laki-laki dan 15% perempuan **Outcomes:** Peningkatan persentase pendapatan anggota kelompok KSB yang responsive gender **Manfaat:** – Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan Penguatan Pengembangan pengurang resiko bencana berbasis masyarakat nagari tanguh. penanganan dampak bencana pada masyarakat menjadi 15%. – Jumlah perempuan

Dipindai dengan CamScanner

Program : Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	pengembangan dan program peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat dan pemangku lainya dalam dan pengurangan resiko bencana. termasuk dalam hal mengelola Masyarakat melalui skema evaluasi kebencanaan Masyarakat/ di kawasan tepi pantai akan terjadi penguran resiko bencana dan nagari tanguh. - Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masyarakat – berperan aktif sebagian besar adalah laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam mengikuti sosialisasi dan bimbingan pengembangan kelembagaan dalam kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan dan penenganan dampak bencana : – Dari absensi kegiatan pengurangan resiko	dalam mengundang masyarakat yang akan mengikuti kegiatan ini **Dari aspek akses:** terbatasnya akses perempuan karena lokasi dan waktu sosialisasi dan bimbingan penguatan kelembagaan agak sulit diakses oleh kaum perempuan, misalnya lokasi sering dilakukan di kantor wali nagari yang letaknya cukup jauh dari rumah penduduk dan waktu pelaksanaan sering dilakukan pada malam hari karena kebanyakan masyarakat pada siang hari berladang hal ini juga menjadi sebab akses perempuan kecil untuk mengikuti kegiatan tersebut di atas **Dari aspek kontrol:** Keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah mereka sudah mengerti dengan pengelolaan peningkatan kapasitas dan masyarakat dan pemangaku lainya					juklak/juknis pelaksanaan kegiatan Penguatan	yang tidak paham mengenai hak pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan nagari tanguh melalui skema HTR/HD/HKm berkurang setiap tahunnya. – Meningkatnya jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan Fasilitasi Pengembangan Hutan Tanaman sehingga akan meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar hutan perempuan dan laki-laki secara proporsional mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat melaui skema HTR/HD/HKm – Keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan Fasilitasi Pengembangan Hutan Tanaman akan meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar hutan sesuai peran

Dipindai dengan CamScanner

Program : Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	bencana berbasis masyarakat dan nagari tanguh tersebut diperoleh rata-rata pesertanya terdiri dari 15 orang perempuan (7,67%) dan 43 orang laki-laki (92,33 %),(akan menaikkan jadi 15	dalam pengurangan resiko bencana tidak diketahui **Dari aspek manfaat:** kecilnya peran perempuan dalam kegiatan tersebut di atas menyebakab manfaat dari kegiatan baru dirasakan oleh laki-laki.						dan kebutuhannya dalam menciptakan penanganan pengelolaan dampak bencana yanga terjadi.

Painan, 23 Juni 2021

KEPALA PELAKSANA BPBD,
Kabupaten Pesisir Selatan

Ir.H.HERMAN BUDIARTO
NIP . 19670103 199203 1 010

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : BPBD

Program : Penanggulangan Bencana.

Kegiatan : Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan

Tangggal Verifikasi : 24 juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Desi Lalusmiarti (Dinas PPPA)	
2	Imawati	
3	Zuharpen	
4		

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	**Pengelolaan barang Milik Daerah**
KODE PROGRAM	5.02.02
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** 1. Jumlah SKPD Lingkup Pemerintah sebanyak 45 SKPD Kabupaten Pesisir Selatan 2. Jumlah Pengurus Barang Lingkup Pemerinah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 90 Orang Laki-laki 45 Orang dan Perempuan 45 Orang 3. Jumlah PNS BPKD Laki-laki sebanyak 14 Orang Perempuan 21 Orang
	a. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** 1. **Akses :** Masih Kurangnya pemahaman pengurus Barang Terhadap Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.. 2. **Partisipasi :** Tingginya permintaan PNS baik laki-laki maupun perempuan terhadap Pelaksanaan Bimtek BMD 3. **Kontrol :** dalam Pelaksanaan Bimtek BMD diketahui oleh Pimpinan 4. **Manfaat :** Meningkatnya Pemahaman Pengurus Barang Pengguna dan Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna sesuai Permendagri No.19 tahun 2016 **b. Penyebab Internal** 1. Terdapatnya Keterbatasan Anggaran dalam Pelaksanaan Bimtek BMD 2. Seringnya Terjadi Pergantian Pengurus Barang Pengguna dan Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna **c. Penyebab Eksternal** 1. Pengalokasian Anggaran belum mempertimbangkan kebutuhan Kualitas SDM dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan..
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** 1. **Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**
	2. Indikator dan Target Kinerja 1. Terwujudnya laporan Barang Milik Daerah sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 150.000.000,-**

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI	**Sub Kegiatan 1**	Pembinaan Pengelolaan barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Masukan	Rp.150.000.000,-
		Keluaran	Tersusunnya Laporan BMD
		Hasil	Meningkatnya SDM tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Sub Kegiatan 2		
		Masukan	Rp.....,-
		Keluaran	
		Hasil	

Painan, 23 Juni 2021

Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

Intan Novia Fatma Nanda, SE,Ak, MPP,MAP
NIP. 19841111 200902 2 008

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	**Pengelolaan Keuangan Daerah**
KODE PROGRAM	**5.02.02**
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** 1. Jumlah SKPD Lingkup Pemerintah sebanyak 45 SKPD Kabupaten Pesisir Selatan 2. Jumlah PPK SKPD dan Bendahara Lingkup Pemerinah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 90 Orang Laki-laki 27 Orang dan Perempuan 63 Orang 3. Jumlah PNS BPKD Laki-laki sebanyak 14 Orang Perempuan 21 Orang
	a. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** 1. **Akses :** Masih Kurangnya pemahaman PPK SKPD dan Bendahara mengenai PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. **Partisipasi :** Tingginya permintaan PNS baik laki-laki maupun perempuan terhadap Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan daerah sesuai aturan PP 12 tahun 2019 3. **Kontrol :** Dalam Pelaksanaan Bimtek PPK SKPD diketahui oleh Pimpinan . 4. **Manfaat :** Meningkatnya Pemahaman PPK SKPD dan Bendahara Terkait PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **b. Penyebab Internal** 1. Terdapatnya Keterbatasan Anggaran dalam Pelaksanaan Bimtek BMD. 2. Adanya Peraturan Terbaru yaitu Peraturan Permerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **c. Penyebab Eksternal** 1. Pengalokasian Anggaran belum mempertimbangkan kebutuhan Kualitas SDM dalam Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** 1. **Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**
	2. Indikator dan Target Kinerja 1. Terwujudnya penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban SKPD sesuai aturan
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 150.000.000,-**

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI	**Sub Kegiatan 1**	Pembinaan, Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota	
		Masukan	Rp.150.000.000,-
		Keluaran	Jumlah Peserta Bimtek sebanyak 90 Orang
		Hasil	Meningkatnya SDM PPK SKPD tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban SKPD
	Sub Kegiatan 2		
		Masukan	Rp.....,-
		Keluaran	
		Hasil	

Painan, 23 Juni 2021

Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

Intan Novia Fatma Nanda, SE,Ak, MPP,MAP
NIP. 19841111 200902 2 008

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
TAHUN 2022

OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah **Kegiatan** : Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota **Tujuan** : Meningkatnya SDM tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Jumlah SKPD Lingkup Pemerintah sebanyak 45 SKPD Kabupaten Pesisir Selatan - Jumlah Pengurus Barang Lingkup Pemerinah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 90 Orang Laki-laki 45 Orang dan Perempuan 45 Orang - Jumlah PNS BPKD Laki-laki sebanyak 14 Orang Perempuan 21 Orang	- **Akses** : Masih Kurangnya pemahaman pengurus Barang Terhadap Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. - **Partisipasi** : Tingginya permintaan PNS baik laki-laki maupun perempuan terhadap Pelaksanaan Bimtek BMD	- Terdapatnya Keterbatasan Anggaran dalam Pelaksanaan Bimtek BMD. - Seringnya Terjadi Pergantian Pengurus Barang Pengguna dan Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	- Pengalokasian Anggaran belum mempertimbangkan kebutuhan Kualitas SDM dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.	- Terpenuhinya SDM Pengurus Barang Pengguna dan Pejabat Penatausahaan Barang pengguna yang Berkualitas.	Pelaksanaan Bimtek Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.	- Jumlah SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 45 SKPD - Jumlah Pengurus Barang Lingkup Pemerinah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 90 Orang Laki-laki 45 Orang dan Perempuan 45 Orang	**Kegiatan** : Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. - **Input** : Rp. 150.000.000,- - **Output** : Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek sebanyak 90 orang - **Outcame/Manfaat** :Terwujudnya Penyusunan Laporan barang Milik Daerah sesuai Permendagri No. 19 tahun 2016

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
		- **Kontrol** : dalam Pelaksanaan Bimtek BMD diketahui oleh Pimpinan - **Manfaat** : Meningkatnya Pemahaman Pengurus Barang Pengguna dan Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna sesuai Permendagri No.19 tahun 2016						

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

TAHUN 2022

OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah **Kegiatan** : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan **Sub Kegiatan** : Pembinaan, Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban kabupaten/Kota **Tujuan** : Meningkatnya SDM PPK SKPD tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban SKPD	- Jumlah SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 45 SKPD - Jumlah PPK SKPD dan Bendahara Lingkup Pemerinah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 90 Orang Laki-laki 27 Orang dan Perempuan 63 Orang - Jumlah PNS BPKD Laki-laki sebanyak 14 Orang Perempuan 21 Orang	- **Akses** : Masih Kurangnya pemahaman PPK SKPD dan Bendahara mengenai PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - **Partisipasi** : Tingginya permintaan PNS baik laki-laki maupun perempuan terhadap Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan daerah sesuai aturan PP 12 tahun 2019	- Terdapatnya Keterbatasan Anggaran dalam Pelaksanaan Bimtek BMD. - Adanya Peraturan Terbaru yaitu Peraturan Permerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	- Pengalokasian Anggaran belum mempertimbangkan kebutuhan Kualitas SDM dalam Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota	- Meningkatnya SDM PPK SKPD dan bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	- Jumlah SKPD sebanyak 45 OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan - Jumlah PPK SKPD dan Bendahara Lingkup Pemerinah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 90 Orang Laki-laki 27 Orang dan Perempuan 63 Orang	**Kegiatan** : Pembinaan, Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban kabupaten/Kota - **Input** : Rp. 150.000.000,- - **Output** : Jumlah Peserta Bimtek sebanyak 90 Orang - Outcame/Manfaat : Terwujudnya Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban SKPD sesuai Aturan untuk mencapai WTP.

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
		- **Kontrol** : dalam Pelaksanaan Bimtek PPK SKPD diketahui oleh Pimpinan . - **Manfaat :** Meningkatnya Pemahaman PPK SKPD dan Bendahara Terkait PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah						

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Program : - Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pengelolaan keuangan Daerah.

Kegiatan : - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah kab/kota.
- Koordinasi & pelaksanaan Akuntansi & pelaporan keuangan.

Tangggal Verifikasi : 23 juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	Zuhairi	
3	Irmawati (BPKAD)	
4	Desi Lakumidarti (Dinas PPPA)	

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Verifikasi

PENYATAAN ANGGARAN GENDER *(GENDER BUDGET STATEMENT)* OPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Bidang : Perpustakaan	
PROGRAM	**Pembinaan Perpustakaan**
KODE PROGRAM	**2.23.02**
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan** • Setiap tahun anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan lebih kurang 500 examplar buku sebagai bahan bacaan diPerpustakaan umum daerah • Bahan bacaan di adakan hanya untuk anak sekolah, masyarakat umum dan belum ada bacaan khusus untuk penyandang disabilitas • Dari Lebih Kurang 19.565,- examplar buku yang ada di Perpustakaan Umum Daerah belum ada buku bacaan khusus untuk penyandang disabilitas • Jumlah rumah baca 20 buah. • Buku bacaan yang ada saat ini berupa novel, cerita anak-anak, buku fiksi, non fiksi, buku agama dan peraturan perundang-undangan. • Belum tersedianya buku bacaan untuk disabilitas yang memadai
	2. Isu dan faktor kesenjangan gender a. Faktor Kesenjangan Aspek Akses : Bahan Bacaan untuk penyandang disabilitas belum memadai/tersedia baik diperpustakaan umum daerah, Nagari dan rumah baca Aspek Partisipasi : • Rendahnya minat baca bagi penyandang disabilitas karna kurangnya saran abaca bagi penyandang disabilitas • Pengunjung rumah baca secara umum didominasi oleh pelajar, masyarakat umum, mahasiswa dan anak-anak.

Dipindai dengan CamScanner

	Aspek Kontrol : Rendahnya inisiatif dari pengelolaan untuk menyediakan bahan bacaan khusus penyandang disabilitas Manfaat : Bahan bacaan yang ada saat ini belum menumbuhkan minat membaca bagi penyandang disabilitas b. Penyebab Internal Pengelola Kegiatan belum memandang hal ini sebagai ketimpangan dalam memenuhi kebutuhan bacaan masyarakat khususnya untuk disabilitas. c. Penyebab Eksternal • Adanya anggapan bahwa /bacaan untuk penyandang disabilitas merupakan kebutuhan bacaan yang tidak penting sebagaimana bahan bacaan lainya. • Sulitnya mendapatkan bahan bacaan yang sesuai untuk penyandang disabilitas. • Kurangnya pemahaman pengelola Perpustakaan untuk menarik minat baca pengunjung yang berkunjung ke perpustakaan umum daerah,sekolah, nagari dan TBM Khususnya Penyandang disabilitas	
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak ukur** Adanya bahan bacaan Khusus Penyandang disabilitas 2. **Indikator dan Target Kinerja** • Bertambahnya jumlah Koleksi bahan bacaan perpustakaan Umum Daerah • Bertambahnya minat baca bagi masyarakat kususnya penyandang disabilitas	
JUMLAH ANGGARAN	**Rp. 96.402.670,-**	
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota**

Dipindai dengan CamScanner

	Sub.Kegiatan 1	**Pengembangan Bahan Pustaka**	
		Masukan	**Rp. 96.402.670,-**
		Keluaran	Bertambahnya jumlah bahan bacaan perpustakaan umum daerah
		Hasil	Menumbuhkan minat baca bagi penyandang disabilitas
PROGRAM	**Pengelolaan Arsip**		
KODE PROGRAM	**2.24.02**		
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka wawasan** • Jumlah pengelola kearsipan di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 227 (Dua ratus dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 45 OPD dan 182 Nagari • Dari 227 (dua ratus dua puluh tujuh pengelola kearsipan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pembinaan baru tingkat OPD sebanyak 45 sedangkan 182 belum dilakukan pembinaan atupun monev. • Pembinaan dan monev yang dilakukan pada saat ini hanya meliputi OPD saja.		
	2. Isu dan faktor kesenjangan gender a. Faktor Kesenjangan Aspek Akses : Tidak tersedia nya anggaran untuk pembinaan dan monev sampai ketingkat Nagari Aspek Partisipasi : Rendahnya kemauan pengelola untuk mengelola arsip secara baik dan benar Aspek Kontrol : Rendahnya inisiatif pembina kearsipan untuk melakukan pembinaan Manfaat : Pembinaan dan monev yang dilakukan pada saat ini Cuma sampai pada OPD b. Penyebab Internal Pengelola kegiatan tidak memandang hal ini sebagai ketimpangan dalam melakukan		

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Verifikasi

	pembinaan sampai ketingkat Nagari. c. Penyebab Eksternal • Adanya anggapan bahwasanya pembinaan dan monev belum perlu sampai ketingkat Nagari • Adanya anggapan akan menambah pembesaran anggaran saja.		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak ukur** Terlaksannya pembinaan dan monev unit arsip. 2. **Indikator dan Target Kinerja** Terwujudnya unit kearsipan yang berkualitas sampai ketingkat nagari		
JUMLAH ANGGARAN	**Rp. 58.768.432.-**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 2** **Sub.Kegiatan 2**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota.** **Penciptaan dan Penggunan Arsip Dinamis**	
		Masukan	**Rp. 58.768.432.-**
		Keluaran	Terbinanya pengelola Kearsipan di Kabupaten Pesisir Selatan.
		Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan yang baik dan benar di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 24 Juni 2021
Kepala

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Mawardi Roska, S.IP
NIP. 19670907 198902 1 001

Dipindai dengan CamScanner

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTKAAN

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
NamKebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
1. **Program : Pembinaan Perpustakaan** **Kegiatan :** Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub.Kegiatan : Pengembangan bahan Pustaka **Tujuan :** Menumbuhkan minat baca bagi penyandang disabilitas	• Setiap tahun anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan lebih kurang 500 examplar buku sebagai bahan bacaan diPerpustakaan umum daerah • Bahan bacaan di adakan hanya untuk anak sekolah, masyarakat umum dan belum ada bacaan khusus untuk penyandang disabilitas • Dari Lebih Kurang 19.565,- examplar buku yang ada di Perpustakaan Umum Daerah belum ada buku bacaan khusus	Akses : Bahan Bacaan untuk penyandang disabilitas belum memadai/tersedia baik diperpustakaan umum daerah, Nagari dan rumah baca. Partisipasi : • Rendahnya minat baca bagi penyandang disabilitas karna kurangnya sarana baca bagi penyandang disabilitas • Pengunjung rumah baca secara umum didominasi oleh pelajar, masyarakat umum, mahasiswa dan anak-anak. Kontrol : • Rendahnya inisiatif dari pengelolaan untuk menyediakan bahan bacaan khusus penyandang disabilitas	Pengelola Kegiatan belum memandang hal ini sebagai ketimpangan dalam memenuhi kebutuhan bacaan masyarakat khususnya untuk disabilitas	• Adanya anggapan bahwa /bacaan untuk penyandang disabilitas merupakan kebutuhan bacaan yang tidak penting sebagaimana bahan bacaan lainya. • Sulitnya mendapatkan bahan bacaan yang sesuai untuk penyandang disabilitas. • Kurangnya pemahaman pengelola Perpustakaan untuk menarik minat baca pengunjung yang berkunjung ke perpustakaan umum	• Meningkatnya pengetahuann dan wawasan penyandang disabilitas dan bertambahnya jumlah kunjungan ke perpustakaan. (Perpustakaan umum daerah, sekolah, nagari, masjid dan TBM)	• Akan menyediakan bahan bacaan untuk penyandang disabilits sebanyak lebih kurang 50 bahan bacaan. • Melakukan pembinaan terhadap perpustakaan nagari, mesjid dan TBM untuk meningkatkan pelayanan dan menumbuhkan minat baca bagi masyarakat.	• Buku bacaan yang ada saat ini berupa novel, cerita anak-anak, buku fiksi, non fiksi, buku agama dan peraturan perundang-undangan. • Belum tersedianya buku bacaan untuk disabilitas yang memadai	**Input :** **Rp. 96.402.670** **Output :** Adanya bahan bacaan Khusus Penyandang disabilitas **Outcome :** • Bertambahnya jumlah Koleksi bahan bacaan perpustakaan Umum Daerah • Bertambahnya minat baca bagi masyarakat kususnya penyandang disabilitas

Dipindai dengan CamScanner

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
NamKebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	untuk penyandang disabilitas • Jumlah rumah baca 20 buah.	Manfaat : • Bahan bacaan yang ada saat ini belum menumbuhkan minat membaca bagi penyandang disabilitas		daerah,sekolah, nagari dan TBM Khususnya Penyandang disabilitas				
2. **Program Pengelolaan Arsip** **Kegiatan :** Pengelolaan arsip Dinamis Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis **Tujuan :** Bertambahnya jumlah pengelolaan arsip secara baku	• Jumlah pengelola kearsipan di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 227 (Dua ratus dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 45 OPD dan 182 Nagari • Dari 227 (dua ratus dua puluh tujuh pengelola kearsipan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan pembinaan baru tingkat OPD sebanyak 45 sedangkan 182 belum dilakukan pembinaan ataupun monev.	• Akses : Tidak tersedia nya anggaran untuk pembinaan dan monev sampai ketingkat Nagari • Partisipasi : Rendahnya kemauan pengelola untuk mengelola arsip secara baik dan benar • Kontrol : Rendahnya inisiatif pembina kearsipan untuk melakukan pembinaan • Manfaat : Pembinaan dan monev yang dilakukan pada saat ini Cuma sampai pada OPD	Pengelola kegiatan tidak memandang hal ini sebagai ketimpangan dalam melakukan pembinaan sampai ketingkat Nagari	• Adanya anggapan bahwasanya pembinaan dan monev belum perlu sampai ketingkat Nagari • Adanya anggapan akan menambah pembesaran anggaran saja.	• Meningkatnya pengetahuan pengelola arsip di Nagri tentang betapa pentingnya keberadaan arsip serta tumbuhnya minat dan keinginan pengelola arsip secara benar dan baik. • Akan memasukan anggaran pd thn 2022 untk melakukan pembinaan dan monev sampai ke Nagari.	• Melakukan pembinaan pengelolaan kearsipan sampai ketingkat nagari • Melakukan monitoring dan evaluasi kenagari	Pembinaan dan monev yang dilakukan pada saat ini hanya meliputi OPD saja.	**Input :** **Rp. 58.768.432** **Output :** Terlaksannya pembinaan dan monev unit arsip. **Out come :** Terwujudnya unit kearsipan yang berkualitas sampai ketingkat nagari

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN.

Program : - Pembinaan Perpustakaan
- Pengelolaan Arsip

Kegiatan : * Pengembangan bahan Pustaka.
* Penciptaan & penggunaan Arsip Dinamis

Tangggal Verifikasi : 24 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Desi Lakesmiasih (Dinas PPrPA)	
2	Irnawati (BPKAD)	
3	Riftomi (Bapeda litbang).	
4		

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KODE PROGRAM	2.12.01
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan c. Jumlah Penduduk yang berusia tahun 2020 semester 2 sebanyak 514.444 jiwa. d. Belum adanya loket Pelayanan dan sarana khusus untuk disabilitas orang tua, ibu hamil dan ibu menyusui, seperti ruang tunggu Pelayanan yang nyaman,, Loket khusus orang tua, ibu hamil dan ibu menyusui e. Belum adanya Taman Bermain anak
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ➢ Masyarakat merasa tidak nyaman dalam mengurus dokumen kependudukan karena kurangnya fasilitas pelayanan untuk mereka. ➢ Masyarakat engan dalam kepengurusan adminduk karena minimnya fasilitas pelayanan. ➢ Dukumen perencanaan dalam peningkatan pelayanan telah ada tapi belum maksimal dilaksanakan ➢ Menurunnya IKM Pelayanan Adminduk karena kurangnya fasilitas pelayanan.

Dipindai dengan CamScanner

	b. Penyebab Internal ➢ Belum tertatanya ruang dan kurangnya sarana dan prasarana untuk kenyamanan masyarakat dalam menunjang pelayanan Adminduk c. Penyebab Eksternal ➢ Masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan karena ruang pelayanan yang tidak responsive gender		
CAPAIAN PROGRAM	3. Tolak Ukur a. Memberikan ruangan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Menyediakan ruang bermain bagi anak-anak yang ikut saat orang tuanya mengurus Dokumen Kependudukan dan ruang ibu menyusui ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	4. Indikator dan Target Kinerja a. Tersedianya 49 ruang khusus pelayanan b. Meningkatkan Kepuasan Pelayanan adminduk kepada Masyarakat		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 4.335,380.120		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1		
		Masukan	Rp150.000.000,-
		Keluaran	Tersedianya 49 ruang khusus pelayanan.
		Hasil	Terciptanya ruang pelayanan yang representative(75%)

Dipindai dengan CamScanner

	Kegiatan 2		
		Masukan	200.000.000,-
		Keluaran	1. Tersedianya 16 set perlengkapan bermain anak) 2. 16 unit kursi roda 3. 16 set perlengkapan untuk ibu menyusui 4. 16 set perlengkapan disabilitas
		Hasil	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan umum(80%)

Painan, 24 Juni 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si

Nip. 19670712 199202 1 001

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KODE PROGRAM	2.12.02.
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. b. Jumlah Penduduk tahun 2016 sebanyak 520.036 jiwa ,tahun 2017 sebanyak 501.197 jiwa, tahun 2018 sebanyak 507.704 jiwa dan Tahun 2019 sebanyak 511.725 jiwa. c. Tahun 2017 jumlah pegawai sebanyak 47 orang. d. Tahun 2018 jumlah pegawai sebanyak orang 128 orang terdiri dari 51 orang pegawai Disdukcapil Painan dan 77 orang pegawai Unit Kerja Layanan (UKL). e. Tahun 2019 jumlah pegawai sebanyak 138 orang terdiri dari 41 orang pegawai Negeri Sipil dan 97 orang Pegawai Honorer. f. Tahun 2020 jumlah Pegawai Dinas Dukcapil sebanyak 133 orang terdiri dari 36 orang ASN dan 97 orang pegawai honorer. g. Jumlah pegawai di Unit Kerja Layanan (UKL) sebanyak 88 orang. h. UKL Disdukcapil dibentuk dan beroperasi pada Juli 2018 di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Sekatan yang berjumlah 15 Unit.
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ➢ Operator dan Register Pegawai di UKL belum mahir menggunakan aplikasi SIAK ➢ Operator dan Register membutuhkan waktu yang cukup untuk memahami aplikasi SIAK. ➢ Operator dan register membutuhkan buku panduan aplikasi SIAK yang mudah untuk dipahami

Dipindai dengan CamScanner

	➢ Lambatnya layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. b. Penyebab Internal ➢ Operator dan Register UKL Disdukcapil di 15 Kecamatan berasal dari Pegawai UPTD Dinas Pendidikan. ➢ Keterbatasan kualitas kapasitas SDM PelayananKependuduan c. Penyebab Eksternal ➢ Masyarakat yang dilayani berasal dari berbagai kalangan dan jenjang pendidikan yang berbeda-beda ➢ Masyarakat selalu ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan walaupun persyaratan mereka kurang		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur ➢ Agar semua aparatur Kependudukan bisa melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik ➢ Dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh masyarakat.		
	2. Indikator dan Target Kinerja Jumlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan : 75 orang		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 1.607.950.210		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1		
		Masukan	Rp. 150.000.000,-
		Keluaran	75 Peserta Sosialisasi Administrasi Kependudukan
		Hasil	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar 80%

Painan, 24 Juni 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si

Nip. 19670712 199202 1 001

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/fenomena yang terjadi)	Faktor Kesenjangan (Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi) (Akses, Partisipasi dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur **Kegiatan 1 :** Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **Kegiatan II :** Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga **Tujuan :** Meningkatkan Kepuasan Pelayanan adminduk kepada Masyarakat	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 3. Jumlah Penduduk yang berusia 60 tahun keatas berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2019 adalah sebanyak 28.942 jiwa dari total jumlah 509.763 jiwa. 4. Belum adanya loket Pelayanan dan sarana khusus untuk disabilitas orang tua, ibu hamil dan ibu menyusui, seperti	**Akses:** Masyarakat merasa enggan untuk datang mengurus dokumen kependudukan karena kurangnya fasilitas pelayanan untuk mereka. **Partisipasi :** Masyarakat yang datang merasa kurang nyaman dalam mengurus dokumen kependudukan karena ruang dan sarana yang tidak nyaman. **Control :** Dukumen perencanaan dalam peninkatan pelayanan telah ada tapi belum maksimal dilaksanakan **Manfaat :** Menurunnya IKM Pelayanan Adminduk karena kurangnya fasilitas pelayanan.	Belum tertatanya ruang dan belum kurangnya sarana dan prasarana untuk kenyaman masyarakat dalam menunjang pelayanan Adminduk.	Masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan karena ruang pelayanan yang tidak responsive gender.	Meningkatkan Kepuasan Pelayanan adminduk kepada Masyarakat	1. Melakukan renovasi gedung kantor dengan membuat ruang Ibu Menyusui, Taman Bermain Anak dan Loket Khusus Disabilitas, Orang Tua dan Ibu Hamil 2. Melakukan pengadaan alat bantu khusus untuk penyandang disabilitas seperti kursi roda, tongkat, dll 3. Membeli perlengkapan mainan anak – anak, ibu hamil dan menyusui.	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 3. Jumlah Penduduk yang berusia 60 tahun keatas berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2019 adalah sebanyak 28.942 jiwa dari total jumlah 509.763 jiwa.	**kegiatan I :** Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **Input :** Rp. 150.000.000 Output : Tersedianya 49 ruang khusus pelayanan **Outcome :** Terciptanya ruang pelayanan yang representative. **Kegiatan II :** Meningkatkan Kepuasan Pelayanan adminduk kepada Masyarakat **Input :** Rp. 200.000.000, **Output :** Tersedianya perlengkapan pelayanan umum

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/fenomena yang terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi) (Akses, Partisipasi dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	ruang tunggu Pelayanan yang nyaman,, Loket khusus orang tua, ibu hamil dan ibu menyusui 5. Belum adanya Taman Bermain anak.						4. Belum adanya loket Pelayanan dan sarana khusus untuk disabilitas orang tua, ibu hamil dan ibu menyusui, seperti ruang tunggu Pelayanan yang nyaman,, Loket khusus orang tua, ibu hamil dan ibu menyusui 5. Belum adanya Taman Bermain anak..	1. 16 set perlengkapan bermain anak) 2. 16 unit kursi roda 3. 16 set perlengkapan untuk ibu menyusui 4. 16 set perlengkapan disabilitas **Outcome :** Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan umum.

Painan, 24 Juni 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penataaan Administrasi Kependudukan **Kegiatan** : Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil **Tujuan** : Meningkatkan Kapasitas Apatur Pelayanan Admininduk	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Jumlah Penduduk tahun 2016 sebanyak 520.036 jiwa ,tahun 2017 sebanyak 501.197 jiwa, tahun 2018 sebanyak 507.704 jiwa , Tahun 2019 sebanyak 511.725 jiwa dan tahun 2020 sebnyak 514.444 jiwa. 3. Tahun 2017 jumlah pegawai sebanyak 47 orang. 4. Tahun 2018 jumlah pegawai sebanyak orang 128 orang terdiri dari 51 orang pegawai Disdukcapil Painan dan 77 orang pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) 5. Tahun 2019 jumlah	**Akses:** Operator dan Register Pegawai di UKL belum mahir menggunakan aplikasi SIAK terbaru **Partisipasi :** Operator dan Register membutuhkan waktu yang cukup untuk memahami aplikasi SIAK terbaru **Kontrol :** Operator dan register membutuhkan buku pandua aplikasi SIAK	1. Operator dan Register UKL Disdukcapil di 15 Kecamatan berasal dari Pegawai UPTD Dinas Pendidikan. 2. Keterbatasan kualitas kapasitas SDM Pelayanan Kependuduan	1. Masyarakat yang dilayani berasal dari berbagai kalangan dan jenjang pendidikan yang berbeda-beda 2. Masyarakat selalu ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan walaupun persyaratan mereka kurang	Meningkatkan Kapasitas Apatur Pelayanan Admininduk	Mengadakan Bimbingan Teknis kepada Aparat Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Jumlah Penduduk tahun 2016 sebanyak 520.036 jiwa ,tahun 2017 sebanyak 501.197 jiwa, tahun 2018 sebanyak 507.704 jiwa, Tahun 2019 sebanyak 511.725 jiwaTahun dan tahun 2020 sebanyak 514.444 jiwa 3. Tahun 2017 jumlah pegawai sebanyak 47 orang 4. Tahun 2018 jumlah ASN Dukcapil berjumlah 128 orang terdiri dari 51 orang pegawai Disdukcapil Painan dan 77 orang pegawai Unit Kerja Layanan (UKL)	Input : Rp. 150.000.000 Output : 75 Peserta sosialisasi administrasi kependudukan Outcome : Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM pelayanan Administrasi Kependudukan

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	pegawai sebanyak 138 orang terdiri dari 41 orang pegawai Negeri Sipil dan 97 orang di Pegawai Honorer. 6. Tahun 2020 jumalh pegawai sebanyak 133 orang terdiri dari 36 orang ASN dan 97 orang pegawai honorer 7. Jumlah pegawai di Unit Kerja Layanan (UKL) sebanyak 90 orang 8. UKL Disdukcapil dibentuk dan beroperasi pada Juli 2018 di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Sekatan yang berjumlah 15 Unit.	yang mudah untuk dipahami **Manfat :** Lambatnya layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.					5. Tahun 2019 jumlah pegawai sebanyak 138 orang terdiri dari 41 orang pegawai Negeri Sipil dan 97 orang di Pegawai Honorer 6. Tahun 2020 Tahun 2020 jumalh pegawai sebanyak 133 orang terdiri dari 36 orang ASN dan 97 orang pegawai honorer 7. Jumlah pegawai di Unit Kerja Layanan (UKL) sebanyak 90 orang 8. UKL Disdukcapil dibentuk dan beroperasi pada Juli 2018 di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Sekatan yang berjumlah 15 Unit	

Painan, 24 Juni 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
- Penyediaan Perlengkapan Rumah tangga.

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Riftomi (Bapeda Utbang).	
2	[illegible]	
3	Irnawati	
4	Desi Lakumidarti	

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program : Penataan Administrasi kependudukan

Kegiatan : Peningkatan kapasitas Aparat kependudukan & catatan Sipil

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Desi Lalumidari (Dinas PPPA)	
2	Riftomi (Bag-Jalitbang).	
3		
4		

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan HIdup
KODE PROGRAM	
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** 1. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Penerima penghargaan peduli lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi laki-laki; 3. Penerima penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 : 1 Kecamatan Bersih, 2 Kampung Iklim, 1 penerima KALPATARUPerhargaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 : 1 Kampung Iklim dan 1 KALPATARU 4. PermenLHK No. 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim 5. PermenLHK No. 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah 6. PermenLHK No. 30 Tahun 2017 tentang penghargaan KALPATARU
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** Akses • Sebagian besar penggiat lingkungan didominasi laki-laki • Daerah di Pesisir Selatan yang memnajang membuat akses untuk membina suatu daerah menjadi kampung iklim sulit Partisipasi • Partisiapsi perempuan dan anak-anak dalam kegiatan pengendalian lingkungan masih kurang Kontrol • Kurang adanya pembinaan yang bersifat kontiniu yang dilakukan untuk meningkatkan peran wanita sebagai ibu rumah tangga dalam pengendalian lingkungan Manfaat • Meningkatkan kesadaran dan peran serta perempuan atau kaum ibu dalam meningkatkan kesadaran peduli lingkungan dalam keluarga sehingga dapat meningkatkan kecintaan anak kepada lingkungan baik dirumah maupun disekolah **b. Penyebab Internal** • Kurangnya pembinaan terhadap masyarakat • Kurangnya SDM • Kurangnya sarana dan prasarana **c. Penyebab Eksternal** • Kurangnya pemahaman manfaat menumbuhkan kesadaran peduli lingkungan dalam rumah tangga dan lingkungan bagi kaum wanita sebagai seorang ibu
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan
	2. Indikator dan Target Kinerja Output Jumlah komunitas peduli lingkungan 1 orang, 1 Kampung Iklim,dan 132 sekolah adiwiyata Outcame Tersosialisasikannya kegiatan pendampingan gerakan peduli lingkungan ke 15 Kecamatan
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 88.996.000,- **(Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM			
RENCANA AKSI	**Kegiatan**	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
	Sub Kegiatan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan	
		Masukan	Rp. 88.996.000,-

Painan, 23 Juni 2021

An.Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretaris

Beny Rizwan, SH, M.Si
NIP. 1671019 199308 1 001

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup **Kegiatan** Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat **Sub Kegiatan** Pendampingan Gerakapan Peduli Lingkungan **Tujuan :** Meningkatnya	Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penerima penghargaan peduli lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi laki-laki Penerima penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 : 1 Kecamatan Bersih, 2 Kampung Iklim, 1 penerima KALPATARU Perhargaan Lingkungan Hidup	**Akses :** Sebagian besar penggiat lingkungan didominasi laki-laki Daerah di Pesisir Selatan yang memnajang membuat akses untuk membina suatu daerah menjadi kampung iklim sulit **Partisipasi :** Partisiapsi perempuan dan anak-anak dalam kegiatan pengendalian lingkungan masih kurang **Kontrol :** Kurang adanya pembinaan yang bersifat kontiniu yang dilakukan untuk meningkatkan peran	• Kurangnya pembinaan terhadap masyarakat • Kurangnya SDM • Kurangnya sarana dan prasarana	Kurangnya pemahaman manfaat menumbuhkan kesadaran peduli lingkungan dalam rumah tangga dan lingkungan bagi kaum wanita sebagai seorang ibu	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan	Kegiatan • Pembinaan dan Sosialisasi kepada kaum wanita tentang pentingnya menjaga lingkungan • Melakukan pendampingan yang bersifat kontiniu terhadap penggiat lingkungan • Memberikan pendampingan pada para ibu untuk mengajak	Prestasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 : • Peringkat II Kecamatan Bersih Dan Hijau Tk. Sumatera Barat (GSB) Kecamatan Ranah Pesisir • Program Kampung Iklim (PROKLIM) Kategori Utama Kampung Alai Limau Gadang Lumpo Kec. IV Jurai • Program Kampung Iklim (PROKLIM) Kategori Utama Kampung Laban Salido Kec. IV Jurai • KALPATARU Kategori Penyelamat Lingkungan An. Yaparuddin • Program Kampung Iklim (PROKLIM) Tk. Propinsi Kampung Alai Limau Gadang Lumpo Kec. IV Jurai • Sekolah Adiwiyata Mandiri MTSN 1 Pesisir Selatan. • Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional SD 21 Limau	Input Rp 88.996.000,- Output Jumlah komunitas peduli lingkungan 1 orang, 1 Kampung Iklim,dan 132 sekolah adiwiyata Outcame Tersosialisasikannya Gerakan Peduli Lingkungan di 50 Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan	Tahun 2020 : 1 Kampung Iklim dan 1 KALPATARU PermenLHK No. 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklmim PermenLHK No. 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah PermenLHK No. 30 Tahun 2017 tentang penghargaan KALPATARU	wanita sebagai ibu rumah tangga dalam pengendalian lingkungan **Manfaat :** Meningkatkan kesadaran dan peran serta perempuan atau kaum ibu dalam meningkatkan kesadaran peduli lingkungan dalam keluarga sehingga dapat meningkatkan kecintaan anak kepada lingkungan baik dirumah maupun disekolah				anak-anak menjaga lingkungan baik dirumah ataupun disekolah	Sundai Kec. Batang Kapas. • Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional SMA 3 Painan Kec. IV Jurai • Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi SMA I Lengayang, • Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi MTSN 4 Pesisir Selatan, • Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi SLTP 2 Kec. Koto XI Tarusan. • Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi SLTP 3 Ranah Pesisir. Prestasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 : • Penghargaan nominasi Penerima KALPATARU kategori Penyelamat Lingkungan kepada Laskar Pemuda Peduli Lingkungan kampungPasar Amping Parak, Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera	

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
							• Penghargaan lokasi Kampung Iklim Kategori Utama kepada Kampung Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai	

Painan, 23 Juni 2021

An.Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretaris

Beny Rizwan, SH, M.Si
NIP. 1671019 199308 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup.

Kegiatan/sub kegiatan: Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan.

Tangggal Verifikasi : 22 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Irnawati (BPKAD	
2	Dewi Lalumbarti (Dinas PPPA)	
3	Riftomi (Bapeda Otbang)	
4		

Dipindai dengan CamScanner

Verifikasi

Lembar : I

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
KODE PROGRAM	2.09.01		
ANALISA SITUASI	1. **Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Jumlah pegawai Dinas Pangan 20 orang yang terdiri dari laki-laki 7 orang laki-laki dan perempuan 13 orang b. Jumlah gedung yang dikelola dinas pangan sebanyak 1 (satu) unit c. Fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya responsif gender yang ditandai dengan belum tersedianya ruang khusus beribadah dan ruang menyusui d. Belum adanya ruangan khusus pelayanan masyarakat		
	2. **Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. **Faktor Kesenjangan** 1. Dalam perencanaan awal pembangunan gedung kantor belum mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan pegawai laki-laki dan perempuan 2. Kelengkapan fasilitas gedung kantor belum memenuhi standar kebutuhan pegawai 3. Rendahnya kesadaran aparatur dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja 4. Kurangnya koordinasi antara pengguna anggaran dengan pelaksana kegiatan 5. Tidak ada ruang ibadah yang memadai dan ruang menyusui bagi pegawai perempuan yang mempunyai bayi 6. Kondisi gedung yang kurang memadai mempengaruhi motivasi kerja pegawai b. **Penyebab Internal** 1. Keterbatasan kewenangan Dinas Pangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor 2. Pengelola kegiatan belum responsif gender terhadap kebutuhan fasilitas kerja yang layak bagi pegawai perempuan dan laki-laki 3. Kurangnya pengawasan terhadap kondisi gedung kantor c. **Penyebab Eksternal** 1. Perencana dan pelaksana pembangunan belum memahami kebijakan yang responsif gender		
CAPAIAN PROGRAM	1. **Tolak Ukur** Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor untuk kenyamanan pegawai Menjaga kondisi gedung kantor agar terpelihara dengan baik		
	2. **Indikator dan Target Kinerja** Tersedianya ruang khusus ibadah dan ruang ibu menyusui serta ruang khusus pelayanan masyarakat Terpeliharanya halaman dan gedung kantor		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 70.000.000,-		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Masukan	Rp 70.000.000,-
		Keluaran	Terpeliharanya halaman dan gedung kantor Tersedianya ruang khusus ibadah dan ruang ibu menyusui serta ruang khusus pelayanan masyarakat
		Hasil	Terawatnya gedung dan halaman gedung kantor dan adanya ruang khusus ibadah dan ruang ibu menyusui serta ruang khusus pelayanan masyarakat

Painan, 21 Juni 2021

Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19191 00731 199403 1 004

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
KODE PROGRAM	2.09.03
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) a. Skor Pola Pangan Harapan sampai dengan tahun 2020 adalah 86,4, dengan skor ideal adalah 100. b. Sampai dengan Tahun 2020, KWT yang telah mendapatkan Bantuan Pemerintah sebanyak 101 kelompok c. Jumlah Kelompok Wanita Tani Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2021 adalah 9 kelompok, Tahun 2022 diusulkan sebanyak 10 Kelompok
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan 1. Tidak semua proposal yang mengajukan permintaan bantuan pemerintah dapat dimasukkan kedalam aplikasi e-proposal 2. Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang telah menerima bantuan sampai tahap mandiri belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan 3. P2L yang masih aktif adalah yang masih menerima bantuan pemerintah tahap pengembangan dan bantuan tahap pemumbuhan 4. Minimnya kesadaran anggota kelompok untuk terus mengembangkan kegiatan P2L b. Penyebab Internal 1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan dalam memenuhi kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga 2. Masih kurangnya kegiatan pelatihan pengolahan pangan lokal terhadap masyarakat c. Penyebab Eksternal Kurangnya sosialisasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam memberikan pengetahuan pentingnya memanfaatkan pekarangan dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Meningkatkan konsumsi masyarakat yang memenuhi kecukupan gizi masyarakat yang memenuhi kecukupan gizi masyarakat dengan skor pola pangan harapan yang meningkat setiap tahunnya yaitu 76,5 tahun 2017, 80,5 tahun 2018, 84 tahun 2019 dan 86,4 tahun 2020
	2. Indikator dan Target Kinerja Jumlah P2L yang dibina, dokumen identifikasi calon lokasi P2L Jumlah kelompok penerima manfaat kegiatan pemanfaatan kegiatan pekarangan
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 750.000.000,-

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
		Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragamana Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
		Masukan	Rp 750.000.000,-
		Keluaran	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari sebanyak 19 kelompok Jumlah kelompok penerima manfaat tahap pertumbuhan, pengembangan dan tahap mandiri
		Hasil	190 Kelompok Pekarangan Pangan Lestari

Painan, 21 Juni 2021

Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E, M.Hum.
NIP. 19780731 199403 1 004

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Pangan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tujuan : • meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor untuk kenyamanan pegawai • Menjaga kondisi gedung kantor agar terpelihara dengan baik	- Jumlah Pegawai Dinas Pangan 20 Orang yang terdiri dari Laki-laki 7 orang dan Perempuan 13 Orang - Jumlah Gedung yang dikelola oleh Dinas Pangan 1 (satu) unit - Fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya responsif gender yang ditandai dengan belum tersedianya Ruang Khusus Ibadah dan Ruang Menyusui - Belum adanya ruangan khusus pelayanan masyarakat	**Akses** - Dalam perencanaan awal pembangunan gedung kantor belum mempertimbangan permasalahan dan kebutuhan pegawai - Kelengkapan fasilitas gedung kantor belum memenuhi kebutuhan pegawai **Partisipasi** - Rendahnya kesadaran aparatur dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja	Keterbatasan kewenangan Dinas Pangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor Pengelola kegiatan belum responsif gender Terbatasnya media informasi dan sosialisasi Kurangnya pengawasan terhadap kondisi kantor	Perencana dan Pelaksana pembangunan belum responsif gender.	Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Belum adanya ruang khusus ibadah dan ruang menyusui - Belum adanya ruangan khusus pelayanan masyarakat	**Kegiatan 1:** Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor **Input :** Rp. 70.000.000,- **Output:** Terpeliharanya halaman dan gedung kantor Tersedianya ruang khusus ibadah dan ruang ibu menyusui serta ruang khusus pelayanan masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

Verifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		Kontrol • Kurangnya koordinasi antara pengguna dengan pelaksana pembangunan **Manfaat** • Kondisi tempat beribadah yang kurang layak untuk dimanfaatkan						**Outcome:** Terawatnya gedung dan halaman gedung kantor dan adanya ruang khusus ibadah dan ruang ibu menyusui serta ruang khusus pelayanan masyarakat

Painan, 21 Juni 2021
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Pangan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat *Kegiatan:* Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragamana Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Skor Pola Pangan Harapan sampai dengan tahun 2020 adalah 86.4, dengan skor ideal adalah 100. - Sampai dengan Tahun 2020, KWT yang telah mendapatkan Bantuan Pemerintah sebanyak 101 kelompok di 15 kecamatan	Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: **a. Aspek Akses:** - Tidak semua proposal yang mengajukan permintaan bantuan pemerintah dapat dimasukkan ke dalam aplikasi e-proposal - Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang telah menerima bantuan sampai tahap mandiri belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan - P2L yang masih aktif adalah yang masih menerima bantuan tahap pengembangan dan bantuan tahap penumbuhan	- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan dalam memenuhi kebutuhan pangan ditingkat rumahtangga. - Masih kurangnya kegiatan pelatihan pengolahan pangan lokal terhadap masyarakat	- Kurangnya sosialisasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam memberikan pengetahuan pentingnya memanfaatkan pekarangan dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga	Tercapainya tingkat konsumsi masyarakat sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, 2.150 kkal/kapita/hari untuk energi dan 57 gram/kapita/hari untuk protein, sehingga tercapai skor ideal Pola Pangan Harapan yaitu 100	- Sosialisasi tentang Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari kepada masyarakat - Melakukan pelatihan kepada masyarakat atau kelompok untuk mengolah pangan lokal menjadi produk olahan pangan yang memiliki nilai tambah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.	- Meningkatkan konsumsi masyarakat yang memenuhi kecukupan gizi masyarakat dengan skor pola pangan harapan yang meningkat setiap tahunnya yaitu 76.5 tahun 2017, 80.5 tahun 2018, 84 tahun 2019 dan 86.4 tahun 2020	***Kegiatan 1:*** ***Input : Jumlah dana : 750.000.000*** ***Output : Jumlah P2L yang dibina, dokumen identifikasi calon lokasi P2L*** ***Jumlah kelompok penerima manfaat kegiatan pemanfaatan kegiatan pekarangan*** ***Outcomes:*** Jumlah kelompok pemanfaatan pangan lestari yang aktif sebanyak 19 kelompok

Dipindai dengan CamScanner

Verifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Tujuan: Terpenuhinya kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga Meningkatnya pendapatan anggota Kelompok Wanita Tani	- Jumlah Kelompok Wanita Tani Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2021 adalah 9 kelompok, Tahun 2022 diusulkan sebanyak 10 Kelompok - Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tani dengan konsep Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yaitu memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga	- Minimnya kesadaran anggota kelompok untuk terus mengembangkan kegiatan P2L - Pelaksanaan kegiatan hanya sebatas pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dengan tanaman sayur dan buah serta sumber pangan hewani dengan memelihara ikan atau ternak ayam dan itik. - Seharusnya hasil panen dapat dijual dan menambah penghasilan anggota kelompok untuk meningkatkan pendapatan keluarga **b. Aspek Partisipasi:** - Kurangnya peran aktif seluruh anggota KWT dalam pengembangan kelompok P2L		- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurus syarat-syarat mendapatkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan kegiatan P2L - Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya anggota KWT untuk terus mengembangkan kegiatan Pekarangan pangan Lestari (P2L) yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya - Kurangnya SDM yang terlatih dalam mengolah pangan menjadi produk yang memiliki nilai tambah				Jumlah kelompok penerima manfaat tahap penumbuhan, pengembangan, dan tahap mandiri

Dipindai dengan CamScanner

Verifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
		- Kurangnya minat anggota kelompok dalam mengembangkan hasil panen menjadi olahan pangan yang lebih bernilai guna dan menambah penghasilan **c. Aspek Kontrol:** Pengurus kurang aktif saat melanjutkan kegiatan ditahap mandiri **d. Aspek Manfaat:** Masyarakat khususnya kelompok sudah diberikan pelatihan dan bantuan dalam pengembangan kelompok KWT, namun hanya bertahan selama bantuan masih diterima						

Painan, 21 Juni 2021
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PANGAN

Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Tangggal Verifikasi : 21 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Syopianori	
2	Desi Lalusmi Sarti, S.Pt (Dinas PPPPA)	
3	Irnawati (BPKAD	
4	Zuharpen	

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PANGAN

Program : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal

Tangggal Verifikasi : 21 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Syofianem (Dinas PPPA)	
2	Desi Lakasmi Sartiepi (Dinas PPPA	
3	Irnawati	
4	Zuhairan	

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
TAHUN ANGGARAN : 2022

HASIL VERIFIKASI

PROGRAM	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
KODE PROGRAM	2.19.3.36.05		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) – Tujuan kegiatan ini adalah memperkenalkan kepada masyarakat luas produk pelaku ekonomi kreatif Kab. Pesisir Selatan melalui media sosial serta berbagai event yang diikuti ; meningkatkan motivasi pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan inovasi terhadap produknya ; serta meningkatkan minat wisatawan untuk datang dan menginap di Kabupaten Pesisir Selatan. – Ruang lingkup kegiatan adalah : • Pembekan souvenir atau cendramata berupa selendang batik khas Kab.Pesisir Selatan sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang diperuntukkan bagi tamu-tamu daerah. • Memfasiltasi acara kedaerahan dengan penampilan seni pertunjukkan baik di dalam maupun luar daerah sebanyak 7 (tujuh) kali tampilan. • Memfasiltasi para pelaku ekonomi kreatif untuk dapat mengikuti event yang diadakan oleh Provinsi Sumatera Barat sebanyak 7 (tujuh) kali tampilan. • Pembuatan video promosi produk ekonomi kreatif sekaligus mengangkat daerah kunjungan wisata yang ada di Kab.Pesisir Selatan sebanyak 17 (tujuh belas) video promosi. –		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan • Masih kurangnya minat usia di bawah 30 tahun untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif • Keterbatasan dana yang dimiliki oleh peserta dalam mengembangkan potensi kepeloporannya b. Penyebab Internal • Tidak banyak Pemuda-Pemudi yang memiliki jiwa *entrepreneur* • Belum maksimal koordinasi dengan instansi terkait • Keterbatasan anggaran c. Penyebab Eksternal • Kurangnya minat dan bakat pemudali untuk mengikuti kegiatan ekonomi kreatif • Belum maksimalnya bantuan dari pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif untuk pengembangan produk		
CAPAIAN PROGRAM	3. Tolak Ukur Memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan dan mempromosikan produk ekonomi kreatif		
	4. Indikator dan Target Kinerja Pelaku ekonomi kreatif		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 363.256.178,-		
RENCANA AKSI	Sub Kegiatan 1	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
		Masukan	Rp. 314.932.700,-
		Keluaran	Terfasilitasinya proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi ekokomi kreatif
		Hasil	Pembuatan video promosi kanten ekonomi kreatif, penampilan seni pertunjukan dalam daerah, tersedianya cendramata untuk tamu daerah
	Sub Kegiatan 2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
		Masukan	Rp. 48.323.470,-
		Keluaran	Terfasilitasinya pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif
		Hasil	Terlaksananya pertunjukan seni ke luar daerah

Sago, 29 Juni 2022
A.n Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
SEKRETARIS,

DEWIRA S ST, MM
NIP. 19729101 199704 1 001

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
TAHUN ANGGARAN : 2022

HASIL VERIFIKASI

PROGRAM	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
KODE PROGRAM	3.26.02	
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) – Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun untuk pengembangan dan pemeliharaan daya tarik wisata se Kabupaten Pesisir Selatan demi meningkatkan pelayanan kepada pengunjung yang berujung pada peningkatan jumlah kunjungan. – Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata terdapat pada sub kegiatan perencanaan pengembangan daya tarik wisata yang berisi tentang pembuatan perencanaan objek wisata berupa Master Plan atau DED dan RAB maupun kajian pengembangan kepariwisataan. – Pelaksanaan kegiatan berupa survei daya Tarik wisata yang akan dikembangkan dengan mendatangi lokasi. – Dilokasi daya Tarik wisata dikumpulkan seluruh data yang dipergunakan untuk penyusunan perencanaan, baik berupa data fisik maupun sosial budaya. – Pengumpulan informasi melalui survei juga dilakukan terhadap masyarakat setempat.	
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan • Sedikitnya tenaga ahli di bidang jasa konsultansi perencanaan pembangunanMasih kurangnya peserta wanita yang memiliki minat dan bakat dibidang kepelaporan • Sedikitnya tenaga ahli di bidang Jasa Konstruksi Keterbatasan dana yang dimiliki oleh peserta dalam mengembangkan potensi kepelaporannya • masih kurangnya kesadaran masyarakat di destinasi wisata dalam memelihara destinasi dan melakukan pelayanan yang baik terhadap pengunjung • b. Penyebab Internal – kurangnya tenaga teknis yang memiliki kompetensi jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi pada dinas di luar dinas teknisBelum maksimal koordinasi dengan instansi terkait – Keterbatasan anggaran – Instansi teknis yang membidangi konstruksi belum memiliki jumlah tenaga teknis yang memadai. – Kurangnya tenaga ahli di bidang kepariwisataan yang memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan di bidang pariwisata. c. Penyebab Eksternal – Adanya pola pikir bahwa pekerjaan pada bidang perencanaan dan jasa konstruksi merupakan domain laki-laki. – Sedikitnya generasi yang mengambil pendidikan terkait dengan kegiatan kepariwisataan.	
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur – Terbukanya kesempatan bagi perempuan dalam melakukan pekerjaan perencanaan maupun pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi. – Terbukanya kesempatan bagi pelaku usaha jasa pariwisata dan kelompok masyarakat dalam menambah penghasilan di bidang ke pariwisataan	
	2. Indikator dan Target Kinerja – Adanya daya tarik dan destinasi wisata yang memberikan kepuasan bagi pengunjung dalam berwisata. – Adanya desa wisata, pariwisata halal dan CHSE – Terdapat masyarakat dan pengelola destinasi wisata yang memiliki kesadaran akan pentingnya pariwisata dalam menunjang kesejahteraan hidup.	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 2.010.000.000,-	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Masukan	Rp 515.000.000,-
	Keluaran	Terlaksananya Pembuatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Hasil	Master Plan dan Dokumen DED dan RAB

Sungai Nipah, 29 Juni 2021
A.n Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
SEKRETARIS,

DEVITRA S ST, MM
NIP. 19720101 199701 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

HASIL VERIFIKASI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Baso-Line)	Indikator Kinerja
Program : **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** **Kegiatan :** Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar **Sub Kegiatan :** 1. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 2. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif **Tujuan :** - Memperkenalkan kepada masyarakat luas produk pelaku ekonomi kreatif Kab. Pesisir Selatan melalui media sosial serta berbagai event yang diikuti ;	- Tujuan kegiatan ini adalah memperkenalkan kepada masyarakat luas produk pelaku ekonomi kreatif Kab. Pesisir Selatan melalui media sosial serta berbagai event yang diikuti ; meningkatkan motivasi pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan inovasi terhadap produknya.; serta meningkatkan minat wisatawan untuk datang dan menginap di Kabupaten Pesisir Selatan. - Ruang lingkup kegiatan adalah : • Pembelian souvenir atau cendramata berupa selendang batik khas Kab.Pesisir Selatan sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang diperuntukkan bagi tamu-tamu daerah. • Memfasilitasi acara kedaerahan dengan penampilan seni pertunjukkan baik di dalam maupun luar daerah sebanyak 7 (tujuh) kali tampilan. • Memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif untuk dapat mengikuti event yang diadakan	1). Akses : • Masih kurangnya minat mayarakat usia di bawah 30 tahun untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif • Keterbatasan dana yang dimiliki oleh peserta dalam mengembangkan potensi kepeloporannya 2). Partisipasi • Kurangnya minat para pelaku ekraf usia 30 tahun kebawah untuk menjadi enterpreneur 3). Manfaat : • Memberikan media kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan produknya	• Tidak banyak Pemuda-Pemudi yang memiliki jiwa *entrepreneur* • Belum maksimal koordinasi dengan instansi terkait • Keterbatasan anggaran	• Kurangnya minat dan bakat pemuda/i untuk mengikuti kegiatan ekonomi kreatif • Belum maksimalnya bantuan dari pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif untuk pengembangan produk	Memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan dan mempromosikan produk ekonomi kreatif	- Mengikutsertakan para pelaku ekonomi kreatif dalam kegiatan kedinasan - Membeli produk pelaku ekonomi kreatif untuk keperluan acara kedinasan	- Kegiatan diikuti oleh para pelaku ekonomi kreatif yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan - Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan tidak dibatasi	Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Masukan Rp. 314.932.700,- Keluaran: Terfasilitasinya proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi ekokomi kreatif Hasil : Pembuatan video promosi konten ekonomi kreatif, penampilan seni pertunjukan dalam daerah, tersedianya cendramata untuk tamu daerah

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- Meningkatkan motivasi pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan inovasi terhadap produknya.; - Meningkatkan minat wisatawan untuk datang dan menginap di Kabupaten Pesisir Selatan	oleh Provinsi Sumatera Barat sebanyak 7 (tujuh) kali tampilan. + Pembuatan video promosi produk ekonomi kreatif sekaligus mengangkat daerah kunjungan wisata yang ada di Kab.Pesisir Selatan sebanyak 17 (tujuh belas) video promosi.							2. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Masukan Rp. 48.323.470,- Keluaran : Terfasilitasinya pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif Hasil : Terlaksananya pertunjukan seni ke luar daerah

Sago, 29 Juni 2021

A.n Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
SEKRETARIS,

DEVITRA.S, ST, MM
NIP. 19720101 199701 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**

HASIL VERIFIKASI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata **Kegiatan :** Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan:** Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten **Tujuan :** Tersusunya dokumen perencanaan pengembangan Daya Tarik Wisata berupa Master Plan, Dokumen DED dan RAB	- Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun untuk pengembangan daya tarik wisata se Kabupaten Pesisir Selatan demi meningkatkan pelayanan kepada pengunjung yang berujung pada peningkatan jumlah kunjungan. - Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata terdapat pada sub kegiatan perencanaan pengembangan daya tarik wisata yang berisi tentang pembuatan perencanaan objek wisata berupa Master Plan atau DED dan RAB maupun kajian pengembangan kepariwisataan.	• Sedikitnya tenaga ahli di bidang jasa konsultansi perencanaan pembangunan • Sedikitnya tenaga ahli di bidang Jasa Konstruksi • Keterbatasan dana yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengembangkan potensi • masih kurangnya kesadaran masyarakat di daya tarik wisata dalam memelihara destinasi dan melakukan pelayanan yang baik terhadap pengunjung	- kurangnya tenaga teknis yang memiliki kompetensi jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi pada dinas di luar dinas teknis - Belum maksimal koordinasi dengan instansi terkait - Keterbatasan anggaran - Instansi teknis yang membidangi konstruksi belum memiliki jumlah tenaga teknis yang memadai. - Kurangnya tenaga ahli di bidang	- Adanya pola pikir bahwa pekerjaan pada bidang perencanaan dan jasa konstruksi merupakan domain laki-laki. - Sedikitnya generasi yang mengambil pendidikan terkait dengan kegiatan kepariwisataan.	- Terbukanya kesempatan bagi perempuan dalam melakukan pekerjaan perencanaan maupun pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi. - Terbukanya kesempatan bagi pelaku usaha jasa pariwisata dan kelompok masyarakat dalam menambah penghasilan di bidang ke pariwisataan	- Melakukan survei lapangan terhadap daya Tarik wisata dan destinasi wisata yang akan dikembangkan. - Merujuk kepada prioritas pembangunan sesuai regulasi yang telah dibentuk untuk dilakukan perencanaan lebih lanjut - Melakukan koordinasi dengan pentahelix dalam merencanakan pembangunan daya Tarik wisata dan destinasi wisata - Menampung aspirasi masyarakat setempat dalam penyusunan perencanaan - Melakukan	- Objek wisata yang dikembangkan atau ditata Kembali adalah Kawasan Pantai Carocok Painan, Air Terjun Timbulun Painan, Puncak Dilan dan Pantai Labuang Baruak. - Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan adalah masyarakat setempat, pemerintah setempat, tenaga ahli/konsultan pariwisata dan akademisi bidang kepariwisataan	**Kegiatan 1** Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota **Input :** **Rp.515.000.000,-** **Output :** Terlaksananya pembuatan perencanaan pengembangan pariwisata. **Outcome :** Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Destinasi Wisata dan Kawasan Strategis Wisata

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kegiatan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Baca Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
			kepariwisataan yang memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan di bidang pariwisata.			Kerjasama dengan tenaga ahli atau konsultan perencanaan pariwisata dalam penyusun master plan atau DED RAB pembangunan daya Tarik wisata dan destinasi wisata.	- Jumlah daya Tarik wisata yang dikembangkan adalah 4 kawasan.	

Sago, 29 Juni 2021

A.n Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
SEKRETARIS

DEVITRA S, ST, MM
NIP. 19720101 199701 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kegiatan/Sub kegiatan : - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi & konservasi Ekonomi Kreatif.
- Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Ekonomi kreatif

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Irnawati	
2	Desi Lakemi Sari	
3	Riftomi (Bappeda Litbang)	
4		

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA dan OLAHRAGA

Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan/Sub. Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Daya Tarik wisata Kabupaten

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Desi Lalusmi Sari.	
2	Irnawati	
3		
4	Riftomi (Bapak Litbang).	

Dipindai dengan CamScanner

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		
KODE PROGRAM	1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.02		
KEGIATAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
SUB KEGIATAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
HASIL OUTPUT	Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak		
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan -Jumlah sekolah SD se Kabupaten Pesisir Selatan adalah 403 unit sekolah -Jumlah siswa SD keseluruhan adalah 55.667 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 29.224 orang dan siswa perempuan 26.443 orang - Jumlah SD yang telah mendapatkan sarana air bersih & sanitasi: 469 unit ,WC laki-laki = 257 unit dan WC Perempuan =212 unit (Jumlah SD yang telah difasilitasi sarana air bersih: 277 sekolah) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan : -Belum seluruh sekolah mendapatkan akses sarana air berih dan sarana sanitasi, - Masih kurangnya partisipasi siswa dalam menjaga pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi, - Kurangnya pengawasan oleh dinas dan sekolah akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi; b. Penyebab internal : - Kurangnya pemahaman persoalan gender bagi pengambil kebijakan khususnya terhadap kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi (WC) bagi siswa perempuan dan laki-laki; c. Penyebab External :- Sebagian kepala sekolah belum melaporkan/mengusulkan akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi yang responsif gender; -Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan gutu tentang persoalan gender		
RENCANA AKSI	Komponen	1. Pembangunan sarana air bersih dan sarana sanitasi di seluruh sekolah 2. Sosialisasi kepada kepala sekolah tentang kesetaraan gender dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, khususnya WC 3.Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SD	
		Tujuan	Seluruh siswa SD di Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Akses Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan yang baik yang responsif gender
		Alokasi Anggaran	RP. 2.500.000.000,-
		Total Anggaran	RP. 2.500.000.000 ,-
Capaian Program	1. Tereviewnya rancang bangun WC untuk anak laki-laki dan perempuan 2. Terpenuhinya Kebutuhan Sanitasi dan air bersih seluruh siswa baik siswa laki-laki maupun perempuan 3. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak		

Painan, Juni 2021
Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan,

SUHENDRI,S.Pd,M.Si
NIP.196707231995121001

Dipindai dengan CamScanner

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		
KODE PROGRAM	**1.01.2.22.0.00.02.0000.1.01.02**		
KEGIATAN	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		
SUB KEGIATAN	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**		
HASILOUTPUT	**Meningkatkan kualitas guru sebagai pembina dalam persiapan peserta lomba siswa OSN tingkat Kecamatan dan Kabupaten**		
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan** **-Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan sebanyak 240 orang, yang terdiri dari peserta laki-laki : 53 orang dan perempuan : 187 orang** **-Jumlah Guru SD di Kabupaten Pessel = 2.284 orang dan Jumlah Guru SD yang belum mengikuti Bimtek = 1.934 orang** 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan : -Sebagian besar guru SD yang akan melatih peserta siswa OSN belum mengikuti bimtek – Masih ada guru SD dalam mendampingi peserta OSN yang belum maksimal – Kurangnya fasilitas dari Dinas untuk melaksanakan bimtek – Belum maksimalnya guru SD dalam menerima pelatihan bimtek untuk mendampingi anak b. Penyebab internal : - Pimpinan dalam pemerataan penempatan guru masih kurang optimal, - Belum menjadi skala prioritas kegiatan c. Penyebab External : - Terbatasnya kemampuan Akademis guru dalam membimbing siswa peserta OSN - Masih kurangnya kemauan Guru untuk mengikuti pelatihan		
RENCANA AKSI	Komponen	1. Advokasi dan sosialisasi bagi SDM tentang pentingnya PUG 2. Pelaksanaan bimtek bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	
		Tujuan	Meningkatkan kompetensi guru dalam persiapan pembinaan siswa peserta lomba OSN tingkat Kecamatan dan Kabupaten
		Alokasi Anggaran	RP. 1.800.000.000
		Total Anggaran	RP. 1.800.000.000
Capaian Program	**1. Tersosialisasinya bagi SDM tentang pentingnya PUG** **2. Meningkatnya kualitas guru sebagai pembina dalam persiapan peserta lomba siswa OSN tingkat kecamatan dan kabupaten**		

Painan, Juni 2021
Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan,

SUHENDRI,S.Pd,M.Si
NIP.196707231995121001

Dipindai dengan CamScanner

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program :	**Data terpilah :**	**Akses**						**Input :**
Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Sekolah SD : 403 sekolah	- Belum seluruh sekolah mendapatkan akses sarana air bersih dan sarana sanitasi	Kurangnya pemahaman persoalan gender bagi pengambil kebijakan khususnya terhadap kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi (WC) bagi siswa perempuan dan laki-laki	Sebagian kepala sekolah belum melaporkan/ mengusulkan akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi yang responsif gender	Meningkatnya Sarana Air bersih dan sanitasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan	-Pembangunan sarana air bersih dan sarana sanitasi di seluruh sekolah	Jumlah Sekolah SD : 403 (Jumlah SD yang telah difasilitasi sanitasi: 277 sekolah)	Dana : Rp.2.500.000.000,-
Kegiatan :	Jumlah Siswa : 56.667	**Partisipasi :**				-Sosialisasi ke pada Kepala Sekolah tentang kesetaraan gender dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, khususnya sanitasi/wc	Jumlah Siswa : Siswa SD Laki-laki : 29.224, Siswa SD Perempuan : 26.443	**Output :** Terbangunnya Kebutuhan air bersih dan Sanitasi
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Siswa SD Laki-laki : 29.224	Masih kurangnya partisipasi siswa dalam menjaga pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi		Kurangnya pemahanan kepala sekolah dan guru tentang persoalan gender				
Sub Kegiatan :		**Kontrol :**						**Outcome:**
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Siswa SD Perempuan : 26.443	Kurangnya pengawasan oleh dinas dan sekolah akan kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi					Jumlah SD yang telah mendapatkan sarana air bersih & sanitasi: 422 unit	Terpenuhinya Kebutuhan Sanitasi dan air bersih seluruh siswa baik siswa laki-laki maupun perempuan
Tujuan : Meningkatnya Sarana Air bersih dan sanitasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan	Jumlah SD yang telah mendapatkan sarana air bersih & sanitasi: 469 unit , WC laki-laki = 257 unit dan WC Perempuan = 212 unit (Jumlah SD yang telah difasilitasi sarana air bersih: 277 sekolah)	**Manfaat :** Fasilitas air bersih dan sanitasi yang tersedia belum memenuhi kebutuhan siswa				-Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SD	WC laki-laki = 189 unit, WC Perempuan =233 unit	**Hasil :** Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak

Painan, Juni 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

SUHENDRI,S.Pd,M.Si
NIP.196707231995121001

Dipindai dengan CamScanner

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program :	**Data terpilah :**	**Akses ;**						Input :
Pengelolaan Pendidikan **Kegiatan :** Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar **Sub Kegiatan :** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar **Tujuan Kegiatan :** Meningkatkan kompetensi guru dalam persiapan pembinaan siswa peserta lomba OSN tingkat kecamatan dan kabupaten	Jumlah pendidik yang mengikuti bimtek : 240 org Jumlah Peserta : Guru Laki-laki : 53 org, Guru Perempuan : 187 Jumlah Guru SD di Kab .Pessel = 2.284 Jumlah Guru SD yang belum mengikuti Bimtek = 1.934	Sebagian besar Guru SD yang akan melatih peserta siswa OSN belum mengikuti Bimtek **Partisipasi : Masih ada** Guru SD dalam mendampingi peserta OSN yang belum maksimal **Kontrol :** kurangnya fasilitas dari Dinas untuk melaksanakan bimtek **Manfaat :** Belum maksimalnya Guru SD dalam menerima pelatihan bimtek untuk mendampingi anak	- Pimpinan dalam pemerataan penempatan guru masih kurang optimal; . - Belum menjadi skala prioritas kegiatan	Terbatasnya kemampuan Akademis Guru dalam membimbing siswa peserta OSN Masih kurangnya kemauan Guru untuk mengikuti pelatihan	Meningkatkan kompetensi guru dalam persiapan pembinaan siswa peserta lomba OSN tingkat kecamatan dan kabupaten	Melaksanakan bimtek bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah pendidik yang mengikuti bimtek : 240 org Jumlah Peserta : Guru Laki-laki : 53 org Guru Perempuan : 187 Jumlah Guru SD di Kab .Pessel = 2.284 Jumlah Guru SD yang belum mengikuti Bimtek = 1.934	Dana : Rp. 1.800.000.000 **Output :** Terlatihnya tenaga pendidik tahun 2022, Guru perempuan : 187 org, dan guru laki-laki ; 53 org **Outcome:** Meningkatnya kualitas guru sebagai pembina dalam persiapan peserta lomba siswa OSN tingkat kecamatan dan kabupaten **Hasil :** Meningkatnya kualitas guru sebagai pembina dalam persiapan peserta lomba siswa OSN tingkat kecamatan dan kabupaten

Painan, Juni 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

SUHENDRI,S.Pd,M.SI
NIP.196707231995121001

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program : Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan/sub kegiatan : - Pembangunan Sarana, Prasarana & Utilitas Sekolah
- Pengembangan karir Pendidik & Tenaga kependidikan pd Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

Tangggal Verifikasi : 17 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Irnawati	
2	Desi Lalumisarti	
3	Riftomi (Bgn. Jabatan).	
4		

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2022
Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

PROGRAM	
KODE PROGRAM	2.15.02.2.06.05
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan** - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan - Tugas Forum LLAJ sebagai berikut : 1. Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah – masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Mewujudkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib, teratur dan selamat. 3. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. 4. Menfasilitasi, membantu memberikan solusi dan mendorong penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan melalui musyarawah untuk mufakat. 5. Mengadakan rapat bulanan dan tiga bulanan dan/atau sesuai kebutuhan forum untuk memantapkan koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul disetiap penyelenggara serta mencarikan jalan keluar secara proposional dan bertanggungjawab. 6. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara LLAJ serta ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrembang). 7. Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas angkutan jalan, registrasi kendaraan bermotor. 8. Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 9. Melakukan konsultasi publik melalui media masa untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat. 10. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ. - Asas pelayanan FLLAJ adalah: 1. Transparansi : Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; 2. Akuntabilitas : Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas; 4. Partisipatif : Mendorong partisipasi masyarakat; 5. Kesamaan hak : Tidak membedakan status sosial ekonomi, kedudukan, pangkat, suku, ras, agama, golongan dan gender;

Dipindai dengan CamScanner

	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** Akses: - Ruas jalan yang kecil dan sempit. - Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi - Minimnya Perlengkapan Jalan Kontrol - Kurangnya pengawasan terhadap jalan dan perlengkapan jalan Manfaat - Belum maksimalnya pelayanan yang dilakukan sehingga masih kurang dapat dirasakan pengaruhnya bagi pengguna jalan Partisipasi - Kurangnya peran serta kelompok masyarakat dalam menetukan kebijakan **b. Penyebab Internal** - Kurangnya Fasilitas Pendukung - Kurangnya pengawasan terhadap jalan dan perlengkapan jalan **c. Penyebab Eksternal**
	- Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi - Kurangnya peran serta kelompok masyarakat dalam menetukan kebijakan
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	2. Indikator dan Target Kinerja Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 19.505.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus lima juta rupiah)**

RENCANA AKSI	**Kegiatan**	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan : Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
		Masukan	Rp. 750.000.000,-
		Keluaran	Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
		Hasil	Tersedianya Jalan Yang Layak dan Terpenuhinya Perlengkapan Jalan

Painan, 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2022
Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan : Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

PROGRAM			
KODE PROGRAM	2.15.02.2.02.01		
ANALISA SITUASI	1. **Data Pembuka Wawasan** - Saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan sudah tersedia sebanyak 25 halte yang tersebar di 15 Kecamatan - Belum tersedianya halte yang dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat menyusui serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas		
	2. **Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. **Faktor Kesenjangan** Akses: - Masih belum memadainya fasilitas dan utilitas penunjang pada setiap lokasi halte - Lokasi halte belum memenuhi kebutuhan kantong-kantong penumpang - Perilaku pengendara yang menaikan dan menurunkan penumpang tidak pada lokasi halte yang tersedia - Perilaku calon penumpang yang tidak menunggu kendaraan angkutan pada lokasi halte yang tersedia - Belum tersedianya halte yang dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat menyusui serta jalur Khusus bagi penyandang disabilitas Kontrol - Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan halte Manfaat - Belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat akan manfaat Halte Partisipasi - Peran serta masyarakat dalam pembangunan halte		
	b. **Penyebab Internal** - Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan halte c. **Penyebab Eksternal** - Perilaku pengendara yang menaikan dan menurunkan penumpang tidak pada lokasi halte yang tersedia - Perilaku calon penumpang yang tidak menunggu angkutan umum pada lokasi halte yang tersedia		
CAPAIAN PROGRAM	1. **Tolak Ukur** Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
	2. **Indikator dan Target Kinerja** Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 19.505.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus lima juta rupiah)**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan**	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		Masukan	Rp. 300.000.000,-
		Keluaran	Terlaksananya Pembangunan Halte
		Hasil	Terpenuhinya Kebutuhan masyarakat akan halte yang memadai

Painan, 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Opd : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2022
Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

PROGRAM			
KODE PROGRAM	1.02.09.1.02.09.01.17.		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan** - Peraturaturan Menteri Perhubungan No. 13 tahun 2014 Tentang Rambu lalu Lintas - Rambu lalu lintas merupakan salah satu dari perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan di antaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan - Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** <u>Akses:</u> - Masih minimnya alat keselamatan lalu lintas seperti rambu rambu lalu lintas, warning light, Zoss dan Marka Jalan <u>Kontrol</u> - Kurang pengawasan terhadap alat keselamatan yang sudah terpasang <u>Manfaat</u> - Seringnya terjadi kecelakaan disebabkan minimnya alat keselamatan lalu lintas **b. Penyebab Internal** - Tidak tersedianya anggaran dalam pengadaan alat keselamatan lalu lintas - Minimnya warning light di persimpangan yang rawan keceelakaan - Banyaknya rambu lalu lintas yang sudah rusak - Tidak adanya penyediaan Zoss (Zona Selamat Sekolah) dan Marka Jalan. **c. Penyebab Eksternal** - Meningkatnya angka kecelakaan setiap tahun - Banyaknya permintaan alat keselamatan lalu lintas pada saat pelaksanaan Musrenbang - Adanya permintaan penyedian Zoss di area sekolah		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		
	2. Indikator dan Target Kinerja Persentase Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 14.729.400.000,- (empat belas miliyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan**	Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas	
		Masukan	Rp. 2.879.400.000,-
		Keluaran	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas
		Hasil	Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan

Painan, 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Hasil Verifikasi

SKPD : Dinas Perhubungan

Tahun : 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) KEGIATAN: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota TUJUAN: Tersedianya Jalan Yang Layak dan Terpenuhinya Perlengkapan Jalan	- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Akses: - Ruas jalan yang kecil dan sempit. - Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi - Minimnya Perlengkapan Jalan Kontrol - Kurangnya pengawasan terhadap jalan dan perlengkapan jalan Manfaat - Belum maksimalnya pelayanan yang dilakukan sehingga masih kurang dapat dirasakan pengaruhnya bagi pengguna jalan Partisipasi - Kurangnya peran serta kelompok masyarakat dalam menetukan kebijakan	- Kurangnya Fasilitas Pendukung - Kurangnya pengawasan terhadap jalan dan perlengkapan jalan	- Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi - Kurangnya peran serta kelompok masyarakat dalam menetukan kebijakan	Hakekat pelayanan Forum LLAJ adalah memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat secara cepat, tepat sasaran, serta tepat guna tentang lalu lintas dan angkutan jalan	- Rapat - Sosialisasi - Studi banding - Survey - Konsultasi dan Koordinasi - Monitoring dan Evaluasi	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Sub Kegiatan: Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Input : Rp. 750.000.000,- Output : Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Outcome : - Tersedianya Jalan Yang Layak dan Terpenuhinya Perlengkapan Jalan

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	- Tugas Forum LLAJ sebagai berikut : 1. Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah – masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Mewujudkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib, teratur dan selamat. 3. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan							

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	jalan. 4. Menfasilitasi, membantu memberikan solusi dan mendorong penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan melalui musyarawah untuk mufakat. 5. Mengadakan rapat bulanan dan tiga bulanan dan/atau sesuai kebutuhan forum untuk memantapkan koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul disetiap penyelenggara serta mencarikan jalan keluar secara proposional dan bertanggungjawab.							

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	6. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara LLAJ serta ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrembang). 7. Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas angkutan jalan, registrasi kendaraan bermotor. 8. Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 9. Melakukan konsultasi publik							

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	melalui media masa untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat. 10. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ. 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur NTT - Asas pelayanan FLLAJ adalah: 1. Transparansi : Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan							

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Hasil Verifikasi

SKPD : Dinas Perhubungan

Tahun : 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) KEGIATAN: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota TUJUAN: Terpenuhinya Kebutuhan masyarakat akan halte yang memadai	- Saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan sudah tersedia sebanyak 25 halte yang tersebar di 15 Kecamatan - Belum tersedianya halte yang dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat menyusui serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas	Akses: - Masih belum memadainya fasilitas dan utilitas penunjang pada setiap lokasi halte - Lokasi halte belum memenuhi kebutuhan kantong-kantong penumpang - Perilaku pengendara yang menaikan dan menurunkan penumpang tidak pada lokasi halte yang tersedia Perilaku calon penumpang yang tidak menunggu kendaraan angkutan pada lokasi halte yang tersedia Belum tersedianya halte yang dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat menyusui serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas Kontrol - Kurangnya pemenuhan	- Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan halte	Perilaku pengendara yang menaikan dan menurunkan penumpang tidak pada lokasi halte yang tersedia Perilaku calon penumpang yang tidak menunggu angkutan umum pada lokasi halte yang tersedia	Terpenuhinya Kebutuhan masyarakat akan halte yang memadai	- Rapat - Koordinasi - Survey - Pelaksanaan pembangunan halte - Monitoring	Saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan sudah tersedia sebanyak 25 halte yang tersebar di 15 Kecamatan	Sub Kegiatan: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Input : Rp. 300.000.000,- Output : Terlaksananya Pembangunan Halte Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan masyarakat akan halte yang memadai

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		kebutuhan masyarakat akan halte Manfaat - Belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat akan manfaat Halte Partisipasi - Peran serta masyarakat dalam pembangunan halte						

Painan, 22 Juni 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Hasil Verifikasi

SKPD : Dinas Perhubungan

Tahun : 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) KEGIATAN: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota SUB KEGIATAN: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota TUJUAN: Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan	- Peraturaturan Menteri Perhubungan No. 13 tahun 2014 Tentang Rambu lalu Lintas - Rambu lalu lintas merupakan salah satu dari perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan di antaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan - Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	Akses: - Masih minimnya alat keselamatan lalu lintas seperti rambu rambu lalu lintas, warning light, marka jalan dan Zoss Kontrol - Kurangnya pengawasan terhadap alat keselamatan yang sudah terpasang Manfaat - Seringnya terjadi kecelakaan disebabkan minimnya alat keselamatan lalu lintas Partisipasi - Kurangnya disiplin pengguna jalan dalam mentaati aturan lalu lintas yang berlaku	- Tidak tersedianya anggaran dalam pengadaan alat keselamatan lalu lintas - Minimnya warning light di persimpangan yang rawan keceelakaan - Banyaknya rambu lalu lintas yang sudah rusak - Tidak adanya penyediaan Zoss (Zona Selamat Sekolah) dan Marka Jalan.	- Meningkatnya angka kecelakaan setiap tahun - Banyaknya permintaan alat keselamatan lalu lintas pada saat pelaksanaan Musrenbang - Adanya permintaan penyedian Zoss di area sekolah	Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan	- Perencanaan Pengadaan Alat Keselamatan - Survey Lokasi Pemasangan Alat Keselamatan - Penunjukkan Rekanan - Pengadaan Suku Cadang - Pelaksanaan Pemasangan Alat Keselamatan - Serah Terima Hasil Pekerjaan	- Sampai saat ini rambu rambu yang ada pada aset dinas perhubungan tercatat sebanyak 948 buah - Masih banyaknya sekolah-sekolah yang tidak ada Zoss. - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan.	Kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas Input : Rp. 2.879.400.000,- Output : Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas Outcome : Tersedianya alat keselamatan lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan

Painan, 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 19700204 199101 1 002

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan/sub kegiatan : - Forum lalu lintas Angkutan jalan kab/kota.
- Pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota.
- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota.

Tangggal Verifikasi : 22 juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	R. F Tomi (Bappeda Litbang).	
3	Desi Lalumiarti	
4	Irnawati	

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD : DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		
KODE PROGRAM	X.XX.3.25.0.001.2		
KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
SUB KEGIATAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Setiap Tahun Anggaran Dinas Perikanan Kab.Pesisir Selatan menyediakan 36 eksemplar surat kabar untuk menambah wawasan ASN b. Surat Kabar yang diadakan tersebut adalah surat kabar/berita yang berisi isu politik dan pemerintahan (belum ada bacaan/tabloid khusus wanita c. Jumlah ASN Perempuan pada Dinas Perikanan adalah sebanyak 11 orang dan ASN laki-laki 24 orang. d. ASN Perempuan kurang berminat pada bacaan yang bertema politik atau pemerintahan .		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** 1. **Akses** Bahan bacaan yang sesuai minat ASN perempuan tidak tersedia/dianggarkan 2. **Partisipasi** Rendahnya minat baca bagi ASN perempuan karena di dominasi oleh laki-laki (lebih banyak waktu untuk membaca) 3. **Kontrol** Rendahnya inisiatif dari ASN perempuan untuk mengusulkan pengadaan bahan bacaan/tabloid untuk wanita ke atasan 4. **Manfaat** Bahan bacaan yang ada saat ini belum mengakomodir minat membaca bagi ASN Perempuan **b. Penyebab Internal** Pengelola kegiatan belum memandang hal ini sebagai ketimpangan dalam mengakomodasikan kebutuhan dan minat ASN perempuan akan bahan bacaan yang berdampak positif dalam pelaksanaan tugas. **c. Penyebab Eksternal** 1. Adanya anggapan bahwa tabloid wanita bukan merupakan kebutuhan bacaan yang penting 2. Adanya anggapan bahwa tabloid wanita hanya menyajikan artikel yang berhubungan dengan Hobi/minat perempuan seperti artikel masak dan gosip		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** .Meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN		
	2. Indikator dan Target Kinerja Output : tersedianya bahan bacaan/tabloid wanita, outcome: Bertambahnya pengetahuan dan wawasan ASN Perempuan		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp.8.000.000,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1		
		Masukan	Rp.8.000.000,-
		Keluaran	Tersedianya bahan bacaan/tabloid wanita
		Hasil	Bertambahnya pengetahuandan wawasan ASN Perempuan
	Kegiatan 2		
		Masukan	Rp.....,-
		Keluaran	
		Hasil	

Painan, 21 Juni 2021
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan

ANDI SYAFINAL, S.Pi.M.Si
NIP.19761006 200312 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD : DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
KODE PROGRAM	3.25.3.25.0.006.2		
KEGIATAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		
SUB KEGIATAN	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		
ANALISA SITUASI	1. **Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Indonesia masih rendah yakni hanya 43,79 kilogram per kapita b. Rendahnya konsumsi ikan karena kesadaran masyarakat untuk konsumsi rendah c. Gerakan masyarakat makan ikan selama ini hanya dihadiri oleh kaum perempuan dan tidak pernsh melibatkan laki-laki dan anak-anak terutama anak sekolah. d. Pada tahun 2020, kegiatan sosialiasi Gemar Masyarakat Makan Ikan telah dilaksanakan di TK Zanajfi Koto XI Tarusan dengan peserta anak-anak TK sebanyak 50 orang dan di Nagari Taratak Tengah Lumpo dengan peserta Ibu-Ibu Rumah Tangga sebanyak 20 orang		
	2. **Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. **Faktor Kesenjangan** 1. **Akses** Gemarikan ini hanya dihadiri oleh kaum perempuan 2. **Partisipasi** Rendahnya kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan 3. **Kontrol** Masih kurangnya perhatian dari pemerintah tentang gemarikan 4. **Manfaat** Kesadaran masyarakat akan makan ikan ini masih rendah b. **Penyebab Internal** Keterbatasan anggaran untuk gemarikan ini masih kecil. c. **Penyebab Eksternal** 1. Adanya anggapan bahwa Gemarikan ini tidak penting 2. Dalam Gemarikan ini kurang melibatkan laki-laki dan anak –anak (Anak Sekolah) 3. Banyak peserta yang telah mengikuti kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak mempraktekan hasil sosialisasi dan pelatihan di rumah		
CAPAIAN SUB KEGIATAN	**Tolak Ukur** .Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan		
	2. **Indikator dan Target Kinerja** Output : Inovasi makanan yang bahan baku ikan		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 315.000.000,-		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**		
		Masukan	Rp. 315.000.000,-
		Keluaran	Inovasi makanan yang berbahan baku ikan dan bahan lainnya
		Hasil	Bertambahnya kesadaran masyarakat yang mengkonsumsi ikan
	Kegiatan 2		
		Masukan	Rp.....,-
		Keluaran	
		Hasil	

Painan, 21 Juni 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan

ANDI SYAFINAL, S.Pi.M.Si
NIP.19761006 200312 1 003

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD :Dinas Perikanan Kab.Pesisir Selatan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota **KEGIATAN :** Administrasi Umum Perangkat Daerah **SUB KEGIATAN :** Penyediaan bahan bacaan/peraturan perundangan **TUJUAN :** Menumbuhkan minat baca guna menambah wawasan aparatur/ASN	• Setiap tahun anggaran, Dinas Perikanan Kab.Pesisir Selatan menyediakan 36 eksemplar surat kabar untuk menambah wawasan aparatur/ASN • Surat kabar yang diadakan tersebut adalah surat kabar / berita yang berisi isu politik dan pemerintahan (belum ada bacaan/tabloid khusus wanita) • Jumlah ASN perempuan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pessel adalah sebanyak 11 orang dan ASN laki laki sebanyak 24 orang . • ASN perempuan kurang berminat pada bacaan yang bertema politik atau pemerintah.	Akses Bahan Bacaan yang sesuai minat ASN perempuan tidak tersedia/dianggarkan Partisipasi • Rendahnya minat baca bagi ASN perempuan karena didominasi oleh laki-laki • ASN laki laki lebih sering meluangkan waktu untuk membaca surat kabar yang disediakan SKPD Kontrol • Rendahnya inisiatif dari ASN perempuan untuk mengusulkan pengadaan bahan bacaan/tabloid wanita ke atasan Manfaat • Bahan bacaan yang ada saat ini belum mengakomodir minat membaca bagi ASN perempuan.	Pengelola Kegiatan belum memandang hal ini sebagai ketimpangan dalam mengakomodasi kebutuhan dan minat ASN perempuan akan bahan bacaan yang bisa berdampak positif dalam pelaksanaan tugas	• Adanya anggapan bahwa tabloid wanita bukan merupakan kebutuhan bacaan yang penting sebagaimana bahan bacaan lain yang bertema politik dan pemerintahan . • Adanya anggapan bahwa tabloid wanita hanya menyajikan artikel artikel yang berhubungan dengan hobi/minat perempuan seperti artikel masakan atau gosip selebriti yang dinilai tidak mempunyai dampak langsung untuk mendukung pelaksanaan tugas.	Meningkatnya pengetahuann dan wawasan ASN	Kegiatan 1 Penyediaan bahan bacaan/peraturan perundangan	Media cetak yang digunakan saat ini Haluan, Padang Ekspres, , Pos Metro,	Kegiatan 1 Penyediaan bahan bacaan/peraturan perundangan Input : Rp. 8.000.000,- Output : Tersedianya bahan bacaan/tabloid wanita Outcome : Bertambahnya Pengetahuan dan wawasan ASN Perempuan

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan **KEGIATAN:** Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota **SUB KEGIATAN :** Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN) **TUJUAN:** Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Akan pentingnya mengkonsumsi ikan	- Tingkat Konsumsi Ikan masyarakat Indonesia masih rendah yakni hanya 43,79 kilogram per kapita - Rendahnya konsumsi ikan ini karena Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan rendah. - Gerakan masyarakat makan ikan ini bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk anak sekolah. - Pada tahun 2020, kegiatan sosialiasi Gemar Masyarakat Makan Ikan telah dilaksanakan di TK Zanajfi Koto XI Tarusan dengan peserta anak-anak TK sebanyak 50 orang dan di Nagari Taratak Tengah Lumpo dengan peserta Ibu-Ibu Rumah Tangga sebanyak 20 orang	Akses : - Gemarikan ini hanyadiikuti oleh orang dewasa tidak dengan anak Partisipasi : - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan Kontrol: - Masih kurangnya gemarikan yang dilakukan selama ini Manfaat: - Kesadaran masyarakat akan makan ikan ini masih rendah	Keterbatasan anggaran untuk Gemarikan masih kecil	- Ada anggapan bahwa gemarikan ini tidak penting. - Dalam gemarikan ini kurang melibatkan anak-anak sekolah - Banyak peserta yang telah mengikuti kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak mempraktekan hasil sosialisasi dan pelatihan di rumah	Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Akan pentingnya mengkonsumsi ikan	- Sosialisasi tentang gemar makan ikan kepada ibu-ibu rumah tangga - Gemarikan dengan melibatkan anak sekolah sebagai peserta - Pelatihan inovasi Olahan Aneka Produk Berbahan Dasar Ikan	- Kesadaran masyarakat akan mengkonsumsi ikan masih rendah sehingga menyebabkan IQ masyarakat masih rendah	Kegiatan 1: Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) Input: Rp 315.000.000,- Output : Inovasi makanan yang berbahan baku ikan dan bahan lainnya Outcome : Bertambahnya kesadaran masyarakat yang mengkonsumsi ikan

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PERIKANAN

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kab/kota.

Kegiatan/sub. keg : Penyediaan bahan bacaan/peraturan perundangan.

Tangggal Verifikasi : 21 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Irnawati	
2	Desti Lalumisarti (Dinas PPPA)	
3	Zuharjan	
4		

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun Anggaran : 2022

Program	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Kegiatan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tanaman dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
Analisa Situasi	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) – Rumah tangga pemeliharaan ternak pada tahun 2020 : Sapi potong 34.650 KK, Kerbau 2.407 KK, Kambing 5.955 KK, Ayam buras 58.802 KK, Ayam ras petelur 33 KK, Ayam ras pedaging 139 KK, Itik 9.804 KK. – Populasi ternak sapi pada tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 85.031 ekor – Realisasi akseptor inseminasi buatan untuk mendukung kegiatan SIKOMANDAN pada tahun 2020 sudah mencapai 7.635 ekor, angka kebuntingan 5.807 ekor, dan kelahiran anak hasil IB yaitu 4.778 ekor – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai 24 orang inseminator, petugas pemeriksa kebuntingan 11 orang, dan asisten teknik reproduksi 9 orang
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan – <u>Akses:</u> Akses lokasi untuk melakukan IB berbeda-beda. Kebanyakan yang meminta bantuan untuk dilakukakan IB adalah peternak yang tinggal di tempat yang sulit akses transportasi dan medan yang cukup sulit untuk dilewati – <u>Partisipasi:</u> Masih kurangnya pengetahuan masyarakat peternak tentang waktu yang tepat untuk melaksanakan IB. – <u>Kontrol:</u> Masih banyaknya ternak yang dikelola petani secara semi intensif sehingga menyulitkan untuk mendapatkan bibit unggul/ tidak mendapatkan IB, sehingga terjadinya inbreeding. – <u>Manfaat:</u> Masih kurangnya masyarakat memperoleh pelayanan IB terhadap ternak.

Dipindai dengan CamScanner

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">b. Penyebab Internal
– Masih kurangnya petugas IB dan tenaga medis dan paramedis veteriner.

c. Penyebab Eksternal
– Jam operasional untuk melakukan IB untuk kaum laki-laki lebih banyak dan tidak terbatas sementara perempuan memiliki akses yang terbatas
– Pola pikir masyarakat bahwa yang mencari nafkah adalah laki-laki sehingga dianggap perempuan tidak perlu melakukan IB</td></tr>
<tr><td>Capaian Program</td><td colspan="3">3. Tolak Ukur
– Terlaksananya kegiatan inseminasi buatan di 15 kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan
– Terlaksananya kegiatan monev inseminasi buatan</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">4. Indikator dan Target Kinerja

– Kegiatan 1: Melaksanakan Kegiatan Inseminasi Buatan di 15 kecamatan

Terlaksananya kegiatan inseminasi buatan di 15 kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan

– Kegiatan 2: Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan IB
Terlaksananya kegiatan monev inseminasi buatan</td></tr>
<tr><td>Jumlah anggaran</td><td colspan="3">Rp. 274.257.000,00</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Rencana Aksi</td><td rowspan="3">Kegiatan 1</td><td colspan="2">Melaksanakan Kegiatan Inseminasi Buatan di 15 kecamatan</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Terlaksananya kegiatan inseminasi buatan di 15 kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Terwujudnya peningkatan populasi ternak unggul sapi</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Kegiatan 2</td><td colspan="2">Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan IB</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Terlaksananya kegiatan monev inseminasi buatan</td></tr>
<tr><td>Hasil</td><td>Terwujudnya peningkatan populasi ternak unggul sapi</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Kegiatan 3</td><td colspan="2">Target pelaksanaan IB untuk tahun 2022 sebanyak 9.650 akseptor</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>Terlaksananya kegiatan IB</td></tr>
</table>

Dipindai dengan CamScanner

		Hasil	Terwujudnya peningkatan populasi ternak unggul sapi

Painan, 23 Juni 2021

EFRIANTO Z, S.Pt
NIP. 19640404 198903 1 009

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun Anggaran : 2022

Program	Penyuluhan Pertanian
Kegiatan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Analisa Situasi	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) – Pesisir Selatan memiliki dua plasma nutfah yaitu sapi pesisir dan itik bayang. – Itik Bayang merupakan plasma nutfah ternak itik di Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pertanian Nomor 2835/Kpts/LB.430/8/ 2012, sebagai rumpun ternak nasional. – Itik bayang merupakan itik lokal yang dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan dan sangat potensial dikembangkan sebagai penghasil telur. – Populasi itik bayang tahun 2020 menurut data statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah 179.445 ekor. – Usaha pasca panen peternakan yang ada baru berupa usaha rumah tangga dengan kapasitas kecil berupa usaha dendeng, rendang, telur asin, dan kerupuk kulit. – Masih sedikit unit usaha yang tergabung dalam kelompok usaha, sehingga pengembangan modal tergantung pada modal pribadi. – Total kelompok 537 kelompok, kelompok yang aktif sebanyak 123 kelompok.
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan – Akses: Untuk pemasaran ternak dan produk olahan asal ternak, kondisi pasar masih belum kondusif untuk perempuan, termasuk transportasi dan kondisi lapangan. – Partisipasi: Partisipasi masyarakat/kelompok pelaku usaha dalam kegiatan sosialisasi produk hasil peternakan sangat tinggi, terutama kaum ibu-ibu, ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran kaum perempuan lebih banyak dari laki-laki. – Kontrol: Masih kurangnya pemantauan terhadap kelompok yang telah dibina. – Manfaat: Para pelaku usaha masih kurang berperan aktif dalam mempromosikan

Dipindai dengan CamScanner

	pengolahan hasil dan pemasaran hasil produk peternakannya. b. Penyebab Internal – Masih kurangnya tenaga teknis untuk penyuluhan produk hasil peternakan. – Keterbatasan anggaran dan tenaga untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan di semua kecamatan. c. Penyebab Eksternal – Pergaulan di lingkungan pemasaran hasil peternakan dan produk hasil peternakan relatif keras dan tidak aman bagi perempuan – Pasar ternak umumnya dikuasai oleh kaum laki-laki – Dibutuhkan sarana transportasi dan tenaga yang besar untuk pemasaran ternak – Kurangnya menguasai pangsa pasar bagi pengelola hasil ternak.		
Capaian Program	3. Tolak Ukur – Terlaksana dan diikutinya 3 even promosi hasil peternakan baik ditingkat kabupaten, propinsi, maupun nasional – Terlaksananya pendataan kembali unit usaha pengolahan hasil peternakan – Terlaksananya pelatihan produk pasca panen hasil peternakan – Terlaksananya monev terhadap pelatihan produk pasca panen hasil peternakan yang telah dilakukan		
	4. Indikator dan Target Kinerja – Kegiatan 1: Mengikuti even promosi produk hasil peternakan Mengikuti kegiatan promosi produk hasil peternakan dalam even tingkat kabupaten, propinsi, maupun nasional – Kegiatan 2: Pendataan UPH peternakan Target UPH yang akan didata adalah 20 unit – Kegiatan 3: Melakukan pelatihan produk pasca panen hasil peternakan Target pelatihan produk pasca panen hasil peternakan adalah 30 orang – Kegiatan 4: Melakukan monitoring dan evaluasi Target kegiatan monev yang akan dilaksanakan minimal 4x dalam setahun		
Jumlah anggaran	Rp.105.194.920,00		
Rencana Aksi	Kegiatan 1	Mengikuti even promosi produk hasil peternakan	
		Keluaran	Terlaksana dan diikutinya 3 even promosi hasil

Dipindai dengan CamScanner

			peternakan baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional.
		Hasil	Jumlah even yang berhasil diikuti dalam rangka promosi hasil produksi peternakan daerah
	Kegiatan 2	Pendataan UPH peternakan	
		Keluaran	Terlaksananya pendataan kembali unit usaha pengolahan hasil peternakan
		Hasil	Target UPH yang akan didata adalah 20 unit
	Kegiatan 3	Melakukan pelatihan produk pasca panen produk hasil peternakan	
		Keluaran	Terlaksananya pelatihan produk pasca panen hasil peternakan
		Hasil	Target pelatihan produk pasca panen hasil peternakan adalah 30 orang
	Kegiatan 4	Melakukan monitoring dan evaluasi	
		Keluaran	Dilakukannya monitoring dan evaluasi pelatihan pasca panen produk hasil peternakan
		Hasil	Dilaksanakan minimal 4 kali dalam setahun monev

Painan, 23 Juni 2021

(EFRIANTO Z, S.Pt)

NIP. 19640414 198903 1 009

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan**
BIDANG : **Produksi**
PRIORITAS : **Mengatasi Kesenjangan Gender yang Terjadi**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	- Rumah tangga pemelihara ternak tahun 2020: Sapi potong 34.650 KK Kerbau 2.407 KK Kambing 5.955 KK Ayam buras 58.802 KK Ayam ras petelur 33 KK Ayam ras pedaging 139 KK Itik 9.804 KK	**Akses:** Akses lokasi untuk melakukan IB berbeda-beda. Kebanyakan yang meminta bantuan untuk dilakukakan IB adalah peternak yang tinggal di tempat yang sulit akses transportasi dan medan yang cukup sulit untuk dilewati	- Masih kurangnya petugas IB, dan tenga medis dan paramedis veteriner	- Jam operasional petugas untuk melakukan IB untuk kaum laki-laki lebih banyak dan tidak terbatas sementara perempuan memiliki akses yang terbatas	Meningkatkan jumlah populasi sapi unggul melalui inseminasi buatan yang berbasis responsif gender.	- Melaksanakan kegiatan IB di 15 kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan	- Populasi ternak sapi pada tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 85.031 ekor	**Rencana Anggaran:** Rp.274.257.000
Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tanaman dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	- Populasi ternak sapi pada tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 85.031 ekor	**Partisipasi** Masih kurangnya pengetahuan masyarakat peternak tentang waktu yang tepat untuk melaksanakan IB		- Pola pikir masyarakat bahwa yang mencari nafkah adalah laki-laki sehingga dianggap perempuan tidak perlu melakukan IB		- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan IB	- Rumah tangga pemelihara ternak tahun 2020: Sapi potong 34.650 KK Kerbau 2.407 KK Kambing 5.955 KK Ayam buras 58.802 KK Ayam ras petelur 33 KK Ayam ras pedaging 139 KK Itik 9.804 KK	**Output:** 1. Terlaksananya kegiatan inseminasi buatan di 15 kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan 2. Terlaksananya kegiatan monev inseminasi buatan terhadap masyarakat peternak

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	- Realisasi akseptor inseminasi buatan untuk mendukung kegiatan SIKOMANDAN pada tahun 2020 sudah mencapai 7.635 ekor, angka kebuntingan 5.807 ekor, dan kelahiran anak hasil IB yaitu 4.778 ekor	**Kontrol** Masih banyaknya ternak yang dikelola petani secara semi intensif sehingga menyulitkan untuk mendapatkan bibit unggul/ tidak mendapatkan IB, sehingga terjadinya inbreeding.				- Target pelaksanaan IB untuk tahun 2022 sebanyak 9.650 akseptor		**Outcome:** Meningkatnya populasi ternak unggul dengan tinggi nya angka kelahiran anak hasil IB.
	- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai 24 orang inseminator, petugas pemeriksa kebuntingan 11 orang, dan asisten teknik reproduksi 9 orang	**Manfaat:** Masih kurangnya masyarakat memperoleh pelayanan IB terhadap ternak						
Tujuan : Meningkatkan jumlah populasi sapi unggul melalui inseminasi buatan yang berbasis responsif gender.								

Painan, 23 Juni 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

EFRIANTO Z, S.Pt
NIP. 19640414198903 1 009

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN

Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Kegiatan/sub kegiatan: Peningkatan kualitas SDG Hewan / tanaman.

Tangggal Verifikasi : 22 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	Zuharpen	
3	Desti Lakesmiarti (Dinas PPPA)	
4	Irnawati (BPKAD)	

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan
BIDANG : Bina Usaha, Kelembagaan, dan Pengolahan Hasil Peternakan
PRIORITAS : Mengatasi Kesenjangan Gender yang Terjadi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program: PENYULUHAN PERTANIAN	- Pesisir Selatan memiliki dua plasma nutfah yaitu sapi pesisir dan itik bayang.	**Akses :** Untuk pemasaran ternak dan produk olahan asal ternak, kondisi pasar masih belum kondusif untuk perempuan, termasuk transportasi dan kondisi lapangan	Masih kurangnya tenaga teknis untuk penyuluhan produk hasil peternakan	- Pergaulan di lingkungan pemasaran hasil peternakan dan produk hasil peternakan relatif keras dan tidak aman bagi perempuan - Pasar ternak umumnya dikuasai oleh kaum laki-laki - Dibutuhkan sarana transportasi dan tenaga yang besar untuk pemasaran ternak	Dikenalnya produk hasil peternakan dari Kabupaten Pesisir Selatan oleh masyarakat luas	- Mengikuti kegiatan promosi produk hasil peternakan dalam even festival langkisau, Sumbar expo, dan livestock expo propinsi Sumatera Barat	- Pesisir Selatan memiliki dua plasma nutfah yaitu sapi pesisir dan itik bayang	**Rencana Anggaran** Rp.105.194.920
Kegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Itik Bayang merupakan plasma nutfah ternak itik di Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pertanian Nomor 2835/Kpts/LB.430/8/2012, sebagai rumpun ternak nasional	**Partisipasi:** Partisipasi masyarakat/Kelompok pelaku usaha dalam kegiatan sosialisasi produk hasil peternakan sangat tinggi, terutama kaum ibu-ibu, ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran kaum perempuan lebih banyak dari laki-laki.	Keterbatasan anggaran dan tenaga untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan di semua kecamatan	Kurang menguasai Pangsa pasar bagi pengelola hasil ternak		- Melakukan penjaringan, pembinaan dan pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) peternakan	- Rumah tangga pemelihara ternak tahun 2020: Sapi potong 34.650 KK Kerbau 2.407 KK Kambing 5.955 KK Ayam buras 58.802 KK Ayam ras petelur 33 KK Ayam ras pedaging 139 KK Itik 9.804 KK	**Output :** 1. Jumlah even yang berhasil diikuti dalam rangka promosi hasil produksi peternakan daerah sebanyak 3 kali even. 2. Jumlah usaha pengolahan yang berhasil didata dan dibina. 3. Jumlah pelatihan produk pasca panen hasil peternakan 6 kecamatan pada tahun 2019, untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan karena covid-19. 4. Pelaksanaan monev terhadap pelatihan produk pasca panen yang telah dilakukan

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	- Itik bayang merupakan itik lokal yang dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan dan sangat potensial dikembangkan sebagai penghasil telur	**Kontrol:** Masih kurangnya pemantauan terhadap kelompok yang telah dibina				- Melakukan pelatihan produk pasca panen hasil peternakan	- Usaha pasca panen peternakan yang ada baru berupa usaha rumah tangga dengan kapasitas kecil berupa usaha dendeng, rendang, telur asin, dan kerupuk kulit	Outcome: 1. Terlaksana dan dikutinya 3 even promosi hasil peternakan baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti penyuluhan terutama kaum ibu-ibu 4. Terlaksananya monev terhadap pelatihan produk pasca panen hasil peternakan yang telah dilakukan
Tujuan: Dikenalnya produk hasil peternakan dari Kabupaten Pesisir Selatan oleh masyarakat luas	- Populasi itik bayang tahun 2020 menurut data statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah 179.445 ekor	**Manfaat:** para pelaku usaha Masih kurang berperan aktif dalam mempromosikan pengolahan hasil dan pemasaran hasil produk peternakannya				- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan produk pasca panen hasil peternakan yang telah dilakukan	- total kelompok 537 - kelompok yang aktif 123 kelompok	
	- Usaha pasca panen peternakan yang ada baru berupa usaha rumah tangga dengan kapasitas kecil berupa usaha dendeng, rendang, telur asin, dan kerupuk kulit							

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Sensi Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	- Masih sedikit unit usaha yang tergabung dalam kelompok usaha sehingga pengembangan modal tergantung pada modal pribadi							
	- total kelompok 537 - kelompok yang aktif 123 kelompok							

Painan, 22 Juni 2021

EFRIANTO Z, S.Pt

NIP. 19640414198903 1 009

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN

Program : Penyuluhan Pertanian

Kegiatan/sub kegiatan : Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa.

Tangggal Verifikasi : 22 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	Juharjun	
3	Desri Lakemiarti (Dinas PPPA)	
4	Irnawati (BPKAD)	

Dipindai dengan CamScanner

GBS (*GENDER BUDGET STATEMENT*)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program Kegiatan	• Rehabilitasi Jembatan • Jembatan Simpang 3 - Tabing	
2	Output Kegiatan	1. Terlaksananya rehabilitasi jembatan 2. Tersedianya jembatan yang aman, ramah dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat umum 3. Mudahnya akses penyeberangan masyarakat menggunakan jembatan	
3	Analisa Situasi	Panjang Jembatan Simpang 3 - Tabing sepanjang 50 meter Faktor Kesenjangan : **AKSES,** Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses perekonomian masyarakat setempat **PARTISIPASI,** Hasil musrenbang kabupaten belum memprioritaskan penggantian jembatan yang baru **KONTROL,** Tidak sesuainya beban kendaraan yang lewat dengan tonase jembatan yang ada **MANFAAT,** Belum optimalnya pemakaian Jembatan Simpang 3 - Tabing oleh Masyarakat Faktor internal dan Eksternal : Belum menjadi kegiatan prioritas anggaran Adanya pandangan bahwa proses rehabilitasi jembatan dapat dilakukan secara umum tanpa memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi masyarakat.	
4	Rencana Aksi	Kegiatan 1	• Melakukan Survey Lapangan
		Kegiatan 2	• Merencanakan rehabilitasi jembatan yang ramah dan aman untuk wanita, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.
5	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Tahun 2022	Jumlah Anggaran Rp. 850.000.000,-
6	Dampak / Hasil Output Kegiatan	Output : • Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan Simpang 3 - Tabing yang responsive gender Outcome : • Tersedianya Rehabilitasi Jembatan Simpang 3 - Tabing sepanjang 50 meter	

Painan, 24 Juni 2021
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001

Dipindai dengan CamScanner

GBS (*GENDER BUDGET STATEMENT*)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program Kegiatan	• Rekonstruksi Jalan • Peningkatan Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah Kec. IV Jurai	
2	Output Kegiatan	1. Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten 2. Tersedianya jalan kabupaten yang aman, ramah dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat umum 3. Mudahnya akses masyarakat menuju ke lokasi tersebut	
3	Analisa Situasi	Panjang Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah Kec. IV Jurai adalah 2,6 Km Faktor Kesenjangan : **AKSES,** Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah Kec. IV Jurai yang masih rusak memberikan rasa tidak nyaman terhadap pengguna jalan. **PARTISIPASI,** Hasil musrenbang kabupaten belum memprioritaskan perbaikan Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah **KONTROL,** • Kurang pedulinya masyarakat terhadap kondisi jalan yang ada • Tidak sesuainya beban kendaraan yang lewat dengan tonase jalan yang ada **MANFAAT,** Belum optimalnya pemakaian Jalan Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah oleh Masyarakat Faktor internal dan Eksternal : Belum menjadi kegiatan prioritas anggaran Adanya pandangan bahwa proses pembangunan dapat dilakukan secara umum tanpa memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi masyarakat.	
4	Rencana Aksi	Kegiatan 1	Melakukan Survey Lapangan
		Kegiatan 2	Merencanakan pembangunan jalan yang ramah dan aman untuk wanita, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.
5	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Tahun 2022	Jumlah Anggaran Rp. 10.000.000.000,-
6	Dampak / Hasil Output Kegiatan	Output : • Terlaksananya Peningkatan Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah Kec. IV Jurai Outcome : • Tersedianya Peningkatan Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah Kec. IV Jurai sepanjang 2,6 Km	

Painan, 24 Juni 2021

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan`	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Penyelenggaraan Jalan **Kegiatan :** Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Rehabilitasi Jembatan **Paket :** Jembatan Simpang 3 - Tabing **Tujuan :** Tersedianya jembatan yang aman, ramah dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat umum	– Panjang Jembatan Simpang 3 - Tabing adalah 50 m. Dengan kondisi rusak berat. – Jembatan ini terletak di kawasan Nagari Pasar Baru, Kec. Bayang	AKSES : Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses perekonomian masyarakat setempat PARTISIPASI : Hasil musrenbang kabupaten belum memprioritaskan penggantian jembatan yang baru KONTROL : Tidak sesuainya beban kendaraan yang lewat dengan tonase jembatan yang ada MANFAAT : Belum optimalnya pemakaian jembatan Simpang 3 - Tabing oleh Masyarakat	Belum menjadi kegiatan prioritas anggaran	Adanya pandangan bahwa proses rehabilitasi jembatan dapat dilakukan secara umum tanpa memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi masyarakat.	Tersedianya jembatan yang aman, ramah dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat umum	–Melakukan Survey Lapangan –Merencanakan rehabilitasi jembatan yang ramah dan aman untuk wanita, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.	– Panjang Jembatan Simpang 3 - Tabing adalah 50 m. – Dengan kondisi rusak berat. – Jembatan ini terletak di kawasan Nagari Pasar Baru, Kec. Bayang	Input : • Rp. 850.000.000,- Output : – Terlaksananya rehabilitasi Jembatan Simpang 3 - Tabing yang responsive gender Outcome : – Tersedianya rehabilitasi Jembatan Simpang 3 - Tabing sepanjang 50 meter

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Penyelenggaraan Jalan **Kegiatan :** Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Rekonstruksi Jalan **Paket :** Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah **Tujuan :** Tersedianya jalan kabupaten yang aman, ramah dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat umum	- Panjang Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah 2,6 Km - Panjang penanganan Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah dengan sepanjang 2,6 Km	AKSES : Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah yang masih rusak memberikan rasa tidak nyaman terhadap pengguna jalan. PARTISIPASI : Hasil musrenbang kabupaten belum memprioritaskan perbaikan Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah. KONTROL : - Kurang pedulinya masyarakat terhadap kondisi jalan yang ada - Tidak sesuainya beban kendaraan yang lewat dengan tonase jalan yang ada MANFAAT : Belum optimalnya pemakaian Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah Kec. IV Jurai oleh Masyarakat	Belum menjadi kegiatan prioritas anggaran	Adanya pandangan bahwa proses pembangunan dapat dilakukan secara umum tanpa memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi masyarakat.	- Tersedianya jalan kabupaten yang aman, ramah dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat umum	- Melakukan Survey Lapangan - Merencanakan pembangunan jalan yang ramah dan aman untuk wanita, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.	- Panjang Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah 2,6 Km - Panjang penanganan Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah dengan sepanjang 2,6 Km	Input : • Rp.10.000.000.000,- Output : • Terlaksananya Peningkatan Pincuran Boga - Sei. Nipah Kec. IV Jurai Outcome : • Tersedianya Peningkatan Jalan Pincuran Boga - Sei. Nipah Kec. IV Jurai

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program : Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan/sub kegiatan : - Rehabilitasi Jembatan
- Rekonstruksi Jalan

Tangggal Verifikasi : 21 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	R. F Tomi (Bagian Kesbang)	
2		
3	Irnawati	
4	Dewi Lalumi Sari	

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : **Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
KODE PROGRAM	3.27.05
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Produksi padi tahun 2020 sebesar 382.838 Ton - Produksi jagung tahun 2020 sebesar 241.163 Ton - Produksi ubi kayu tahun 2020 sebesar 7.019 Ton - Produksi kacang tanah tahun 2020 sebesar 398 Ton - Produksi cabe merah tahun 2020 sebesar 5.512 Ton - Produksi bawang merah tahun 2020 sebesar 39 Ton - Produksi semangka tahun 2020 sebesar 7.940 Ton - Produksi jeruk tahun 2020 sebesar 16.536 Ton - Produksi manggis tahun 2020 sebesar 2.375 Ton - Produksi pisang tahun 2020 sebesar 10.859 Ton - Jumlah Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) tahun 2020 sebanyak 8 orang - Luas serangan tikus tahun 2020 seluas 482 Ha - Luas serangan penggerek batang tahun 2020 seluas 421 Ha - Luas serangan wereng coklat tahun 2020 seluas 676 Ha - Luas serangan kepinding tanah tahun 2020 seluas 476 Ha - Luas serangan blast tahun 2020 seluas 110 Ha - Luas serangan tungro tahun 2020 seluas 89 Ha - Luas lahan sawah 30.317 Ha - Jumlah Kelompok Tani 1.907 Unit
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan **Aspek Akses** Petani/Kelompok Tani berlokasi jauh dari kegiatan pengendalian OPT. **Aspek Partisipasi** Peran /partisipasi Petani/Kelompok Tani masih rendah **Aspek Control** Masih kurangnya Kontrol dari Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) di masing – masing Kecamatan **Dari aspek manfaat** Sebagian kecil Petani/Kelompok Tani belum merasakan manfaat kegiatan. b. Penyebab Internal - Jumlah peserta Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura dibatasi - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pengendalian OPT tanaman pertanian c. Penyebab Eksternal - Petani/Kelompok Tani masih jarang melakukan pengamatan dini terhadap gejala awal serangan OPT pada tanaman pertanian - Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam budidaya tanaman - Sebagian Petani/Kelompok Tani mengikuti kegiatan karena motif ingin mendapatkan uang penggantian transportasi.
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Berkurangnya tingkat serangan OPT pada tanaman pertanian sebesar 5% di Kabupaten Pesisir Selatan

Dipindai dengan CamScanner

	2. Indikator dan Target Kinerja **Kegiatan :** Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan **Input :** Rp. 906.000.000,00 **Output:** - Berkurangnya tingkat serangan OPT Tanaman Pertanian sebesar 5% - Terlaksananya Bimtek Pengendalian OPT sebanyak 50 peserta - Tersedianya pestisida sebagai sarana pengendalian OPT sebanyak 3.000 liter - Meningkatnya peran Petani/Kelompok Tani dalam melakukan pengamatan dini terhadap gejala awal serangan OPT tanaman pertanian **Outcomes/manfaat :** Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat Tani	
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp. 906.000.000,00	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian OPT
	Kegiatan 2	Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian serangan OPT tingkat Kabupaten
	Kegiatan 3	Melakukan pengamatan rutin oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT)
	Kegiatan 4	Rekomendasi pengendalian yang dikeluarkan oleh POPT
	Kegiatan 5	Gerakan pengendalian OPT dilapangan
	Kegiatan 6	Evaluasi

Painan, 25 Juni 2021

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. NUZIRWAN, N., M.T.
NIP. 19670826 199803 1 001

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : **Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	Penyuluhan Pertanian
KODE PROGRAM	3.27.07
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebanyak 15 unit b. Jumlah Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 182 Nagari c. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Pesisir Selatan Penyuluh PNS 50 orang d. Jumlah Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 63 orang e. Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) 187 orang f. Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebanyak 157 Gapoktan g. Jumlah Kelompok Tani sebanyak 1.907 Kelompok Tani. h. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebanyak 145 unit i. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sebanyak 71 unit j. Jumlah Pos Penyuluhan Nagari (POSLUHNAG) sebanyak 144 unit k. Luas Lahan Sawah Kabupaten Pesisir Selatan seluas 30.317 Ha
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan **Aspek Akses** Terbatasnya akses Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terhadap Kelompok Tani dikarenakan sebagian besar Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merangkap beberapa Wilayah Kerja yang meliputi beberapa Nagari. **Aspek Partisipasi** Kurangnya respon petani terhadap informasi dan teknologi pertanian yang disampaikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) **Aspek Control** Penambahan Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) **Dari aspek manfaat** Sulitnya akses terhadap Petani/Kelompok Tani menyebabkan penyebaran informasi teknologi pertanian telat diterima Petani/Kelompok Tani. b. Penyebab Internal - Kurangnya komitmen pejabat pembuat kebijakan mengenai penambahan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) - Minimnya Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian Lapangan - Kurangnya media pembelajaran dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh Pertanian c. Penyebab Eksternal - Lokasi Petani/Kelompok Tani jauh dari lokasi tempat tinggal Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) - Banyaknya jumlah Petani/Kelompok Tani yang harus dibina.
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Penyuluh Pertanian Lapangan
	2. Indikator dan Target Kinerja **Kegiatan :** Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Dipindai dengan CamScanner

	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa **Input :** Rp. 864.500.000,- **Output :** Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) **Outcomes/manfaat :** Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani	
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp. 864.500.000,-	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pembuatan Juklak/Juknis pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL)
	Kegiatan 2	Pendidikan dan Latihan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
	Kegiatan 3	Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian
	Kegiatan 4	Training
	Kegiatan 5	Supervisi
	Kegiatan 6	Evaluasi
	Kegiatan 7	Permohonan penambahan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Painan, 25 Juni 2021

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Dan Perkebunan

PEMERINTAH KABU... DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULT... DAN PERKEBUN... PESISIR SELA...

Ir. NUZIRWAN, N., M.T.
NIP. 19670826 199803 1 001

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : **Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**

PROGRAM : **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian **Kegiatan :** Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan **Tujuan :** Berkurangnya tingkat serangan Organisme	- Produksi padi tahun 2020 sebesar 382.838 Ton - Produksi jagung tahun 2020 sebesar 241.163 Ton - Produksi ubi kayu tahun 2020 sebesar 7.019 Ton - Produksi kacang tanah tahun 2020 sebesar 398 Ton - Produksi cabe merah tahun 2020 sebesar 5.512 Ton - Produksi bawang merah tahun 2020 sebesar 39 Ton - Produksi semangka tahun 2020 sebesar 7.940 Ton - Produksi jeruk tahun 2020 sebesar 16.536 Ton - Produksi manggis	**Akses ;** Akses Petani/Kelompok Tani berlokasi jauh dari kegiatan pengendalian OPT **Partisipasi :** Peran /partisipasi Petani/Kelompok Tani masih rendah **Kontrol :** Masih kurangnya Kontrol dari Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) di masing – masing Kecamatan. **Manfaat :** Sebagian kecil Petani/Kelompok	- Jumlah peserta Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura dibatasi - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pengendalian OPT tanaman pertanian	- Petani/Kelompok Tani masih jarang melakukan pengamatan dini terhadap gejala awal serangan OPT pada tanaman pertanian - Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam budidaya tanaman - Sebagian Petani/Kelompok Tani mengikuti kegiatan karena motif ingin mendapatkan uang penggantian transportasi.	Berkurangnya tingkat serangan OPT pada tanaman pertanian sebesar 5% di Kabupaten Pesisir Selatan	- Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian OPT - Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian serangan OPT tingkat Kabupaten - Melakukan pengamatan rutin oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) - Rekomendasi pengendalian yang dikeluarkan oleh POPT - Gerakan pengendalian OPT dilapangan - evaluasi	- Bimbingan Teknis (Bimtek) pengendalian OPT diikuti oleh 50 orang peserta - Gerakan pengendalian OPT yang diikuti sebanyak 1.350 orang. - Banyaknya Laporan Peringatan Bahaya (LPB) yang dikeluarkan oleh POPT Kecamatan tidak sebanding dengan jumlah gerakan pengendalian OPT yang difasilitasi. - Pengendalian yang dilakukan hanya baru mampu menangani terhadap luasan serangan	**Kegiatan :** Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan **Input :** Rp. 906.000.000,00 **Output:** - Berkurangnya tingkat serangan OPT Tanaman Pertanian sebesar 5% - Terlaksananya Bimtek Pengendalian OPT sebanyak 50 peserta - Tersedianya pestisida sebagai sarana pengendalian OPT sebanyak 3.000 liter

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman pangan dan hortikultura sebesar 5%	tahun 2020 sebesar 2.375 Ton - Produksi pisang tahun 2020 sebesar 10.859 Ton - Jumlah Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) tahun 2020 sebanyak 8 orang - Luas serangan tikus tahun 2020 seluas 482 Ha - Luas serangan penggerek batang tahun 2020 seluas 421 Ha - Luas serangan wereng coklat tahun 2020 seluas 676 Ha - Luas serangan kepinding tanah tahun 2020 seluas 476 Ha - Luas serangan blast tahun 2020 seluas 110 Ha - Luas serangan tungro tahun 2020 seluas 89 Ha - Luas serangan OPT Perkebunan seluas	Tani belum merasakan manfaat kegiatan					OPT dan belum mampu untuk menangani luasan yang terdampak bencana.	- Meningkatnya peran Petani/Kelompok Tani dalam melakukan pengamatan dini terhadap gejala awal serangan OPT tanaman pertanian **Outcomes/manfaat** Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat Tani

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	6.744 Ha - Luas lahan sawah 30.317 Ha - Jumlah Kelompok Tani 1.907 Unit							

Painan, 25 Juni 2021

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Dan Perkebunan

PEMERINTAH KABUPATEN SISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Ir. NUZIRWAN, N., M.T.
NIP. 19670826 199803 1 001

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Dinas : Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Program : Penyuluhan Pertanian

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penyuluhan Pertanian Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa Tujuan : Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Penyuluh Pertanian Lapangan	1. Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebanyak 15 unit 2. Jumlah Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 182 Nagari 3. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Pesisir Selatan - Jumlah Penyuluh PNS 50 orang - Jumlah Penyuluh PPPK 63 orang - Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) 187 orang 4. Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebanyak 157 Gapoktan 5. Jumlah Kelompok Tani sebanyak 1.907 Kelompok Tani. 6. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)	- **Aspek Akses** Terbatasnya akses Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terhadap Kelompok Tani dikarenakan sebagian besar Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merangkap beberapa Wilayah Kerja yang meliputi beberapa Nagari. - **Aspek Partisipasi** Kurangnya respon petani terhadap informasi dan teknologi pertanian yang disampaikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) - **Aspek Control** Penambahan Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	- Kurangnya komitmen pejabat pembuat kebijakan mengenai penambahan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) - Minimnya Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian Lapangan - Kurangnya media pembelajaran dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh Pertanian	- Lokasi Petani/ Kelompok Tani jauh dari lokasi tempat tinggal Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) - Banyaknya jumlah Petani/ Kelompok Tani yang harus dibina.	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Penyuluh Pertanian Lapangan	- Pembuatan Juklak/Juknis pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) - Pendidikan dan Latihan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) - Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian - Training - Supervisi - Evaluasi - Permohonan penambahan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	- Jumlah Penyuluh PNS 50 orang - Jumlah Penyuluh PPPK 63 orang - Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) 187 orang - Jumlah Kelompok Tani 1.907 unit - Jumlah Gapoktan 157 unit	**Kegiatan :** Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian **Sub Kegiatan :** Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa **Input :** Rp. 864.500.000,- **Output :** Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) **Outcomes/manfaat :** Meningkatnyapendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani

Dipindai dengan CamScanner

Verifikasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	sebanyak 145 Unit 7. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sebanyak 71 unit 8. Jumlah Pos Penyuluhan Nagari (POSLUHNAG) sebanyak 144 Unit 9. Luas Lahan Sawah Kabupaten Pesisir Selatan seluas 30.317 Ha	- **Dari aspek manfaat:** Sulitnya akses terhadap Petani/Kelompok Tani menyebabkan penyebaran informasi teknologi pertanian telat diterima Petani/Kelompok Tani.						

Painan, 25 Juni 2021

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Dan Perkebunan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Ir. NUZIRWAN, N., M.T.
NIP. 19670826 199803 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA & PERKEBUNAN

Program : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Kegiatan/sub. kegiatan : Pengendalian Organisme Penggangu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan.

Tangggal Verifikasi : 24 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Desri Lasmidarti (Dinas PPKPA)	
2	Inalwati	
3		
4	R'F Tomi (Bag. Adlit Bang)	

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA & PERKEBUNAN.

Program : Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan/Sub kegiatan : Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan di kecamatan dan desa.

Tangggal Verifikasi : 24 juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Irnawati	
2	Desi Lalumidarti	
3	RIFTOMI (Bgo de(itbony)	
4		

Dipindai dengan CamScanner

Gender Budget Statement
(Pernyatan Anggaran Gender)

Organisasi Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN KAB.PESSEL TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : P2M

Program	Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	
Kegiatan	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
Indikator Kinerja Kegiatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	
Output Kegiatan	Meningkatnya persentase skrining usia produktif	
Analisa Situasi	Jumlah Penduduk : 467.062,- Jumlah usia produktif : (15-59) tahun : 277.912 Jumlah usia produktif yang dilakukan skrining tahun 2020 : 58.889 0rang (21%)	
Rencana Aksi	Komponen 1	Melakukan pendataan sasaran usia produktif
	Komponen 2	Melengkapi sarana prasarana
	Komponen 3	Melakukan pelatihan/sosialisasi ke petugas tentang skrining Kesehatan pada usia produktif
	KOmponen 4	Sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya skrining Kesehatan usia produktif
	Komponen 5	Bimtek dan Monev tentang pelaksanaan skrining usia produktif
Alokasi anggaran Output Kegiatan	Rp.394.067.100,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Menurunnya kasus penyakit tidak menular	

Painan, 18 Juni 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Dipindai dengan CamScanner

Gender Budget Statement

(Pernyatan Anggaran Gender)

Organisasi Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN KAB.PESSEL TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : KESGA & GIZI

Program	Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	
Kegiatan	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	
Indikator Kinerja Kegiatan	Meningkatnya pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai standar	
Output Kegiatan	Meningkatnya persentase K1 dan K4	
Analisa Situasi	Jumlah Penduduk : 467.062,- Laki-laki : 231.998, - jiwa dan perempuan : 235.064 Jiwa Ibu hamil : 10.088 orang Jumlah bayi lahir hidup : 8581 Jiwa AKI tahun 2020 : 105/100.000 KH (9 orang)	
Rencana Aksi	Komponen 1	Melengkapi sarana prasarana puskesmas dalam melaksanakan 10 T pada ibu hamil sesuai standar SPM
	Komponen 2	Sosialisasi/Bimtek tentang pelayanan Kesehatan sesuai standar
	Komponen 3	Melaksanakan Monev program KIA Puskesmas
	KOmponen 4	Melaksanakan Pertemuan LP/LS dan tatalaksana ibu hamil
	Komponen 5	Melaksanakan program kelas ibu hamil
Alokasi anggaran Output Kegiatan	Rp.50.000.000-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Menurunnya angka kematian ibu	

Painan, 18 Juni 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Dipindai dengan CamScanner

Format 1
Gender Analysis Pathway (GAP)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
		ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat **Kegiatan :** Penyediaan pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tk Daerah Kab/Kota **Sub Kegiatan :** Pengelola pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah : Penduduk (2020) 467.062,- laki-laki ; 231.998 jiwa dan Perempuan ; 235.064 jiwa dan ibu hamil : 9.136 org Jumlah usia produktif (15-59) tahun : 277.912 orang Laki-laki : 137.539 0rang Perempuan : 140.373	**Sarana dan Prasarana:** Sarana prasarana Tidak memadai sesuai dengan standar Permenkes tentang SPM **SDM :** Pemahaman tenaga tentang skrening usia produktif belum maksimal Beban kerja petugas yang besar **Masyarakat:** Pengetahuan masyarakat	1. Anggaran yang belum tersedia 2. Pelatihan yang belum dilaksanakan 3. Promosi ke masyarakat yang masih kurang	1. dukungan lintas program/lintas sector belum maksimal 2. kepedulian masyarakat tentang deteksi dini masih kurang	Setiap usia produktif mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	1. melakukan pendataan sasaran usia produktif 2. melengkapi sarana prasarana 3. melakukan pelatihan /sosialisasi ke petugas tentang skrining Kesehatan pada usia produktif 4. sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya skrining Kesehatan usia produktif 5. bimtek dan monev tentang pelaksanaan skrining usia	Usia produktif yang dilakukan scrining : 58.889 orang (21,9%)	Input : Rencana Aksi 1 : Rp.394.067.100,- Output : Meningkatnya persentase skrining usia produktif Outcome : Menurunnya kasus penyakit tidak menular

Dipindai dengan CamScanner

Tujuan: Setiap usia produktif (15-59) tahun mendapatkan pelayanan sesuai standar	Usia produktif yang dilakukan scrining : 58.889 orang (21,9%)	yang kurang				produktif		

Painan, 18 Juni 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR
SELATAN

dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Dipindai dengan CamScanner

Format 1
Gender Analysis Pathway (GAP)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9
		ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat **Kegiatan :** Penyediaan pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tk Daerah Kab/Kota **Sub Kegiatan :** Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil **Tujuan**: Setiap Ibu hamil	Jumlah : Penduduk (2020) 467.062,- laki-laki ; 231.998 jiwa dan Perempuan ; 235.064 jiwa dan ibu hamil : 9.136 org Jumlah Pasangan Usia Subur : 85.157 Jumlah ibu hamil : 10.088. bayi lahir laki-laki : 4.514 org perempuan :	**Sarana dan Prasarana:** Tidak memadai dan tidak sesuai dengan PMK 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas **Partisipasi :** Kurangnya kepedulian masyarakat tentang kesehatan Ibu hamil **Control :** Kurangnya dukungan suami dan keluarga dalam pengambil keputusan	1. Kurangnya Sarana Prasarana Puskesmas 2. Kurang tanggapnya petugas kesehatan terhadap keselamatan ibu hamil	1. Terbatasnya alat Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan pada ibu hamil di fasilitas kesehatan 2. Kurangnya pengetahun masyarakat tentang keselamatan ibu hamil 3.Masalah ekonomi yang biasanya meyertai ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	1. Meminta Wali Nagari dan Puskesmas untuk dapat melengkapi sarana prasarana di fasyankes baik Poskesri ataupun Pustu 2. sosialisasi / Bintek tentang pelayanan ibu hamil sesuai standar. 3. Melaksanakan Monev Program KIA ke Puskesmas 4. Melaksanakan pertemuan lintas program dan tatalaksana bumil 5. Melaksanakan Review Program Kelas Ibu Hamil 6. Melaksanakan Review Kohor,P4K,MTBM/Mtbs di Puskesmas.	Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2020: 105/100.000 KH (9 Org), Tahun 2020	Input : Rencana Aksi 1 : Rp.50.000.000,- Output : 1. Meningkatnya Persentase K1 dan K4 Outcome : Menurunnya angka kematian ibu

Dipindai dengan CamScanner

mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar oleh tenaga Kesehatan (bidan,dokter, SpOG yang memiliki STR) sebanyak 4 kali dengan, Yaitu : 1 kali padq Trimester pertama 1 kali pada trimester kedua 2 kali pada trimerster ketiga	4.067 org Rasio RS 1 : 100.000 pdkk RS yang ada 3 unit, kurang 2 unit AKI tahun 2020 : 105 / 100.000 KH (9 org) AKB tahun 2020 : 7,5 / 1000 KH (64 org) Jumlah Kelahiran Hidup 8581 org							

Painan, 18 Juni 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Dipindai dengan CamScanner

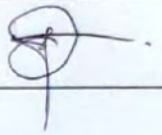
Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS KESEHATAN

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. Daerah Kabupaten /Kota

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2024

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	YEFRINK (INSPEKTORAT)	
2	Dewi Yulianti (Dinkes PPrPA)	
3		
4		

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS KESEHATAN

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewilayahan

Tangggal Verifikasi : Tk. Daerah Kabupaten / Kota
18 - Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	YETRIAL (IMPLEMENTASI)	
2	Dewi Lalusmidarti (Dinas PPPA)	
3		
4		

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
KODE PROGRAM	
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** Semenjak Kongres perempuan pertama kali tahun 1928 di Jogyakarta merupakan tonggak sejarah perjuangan bagi kaum perempuan di Indonesia, sehingga pada kongres ke III di Bandung tahun 1938 ditetapkan tanggal 22 Desember sebagai hari Ibu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang sisitim Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 sebesar : 508.691 jiwa dengan komposisi, laki-laki :257.040 dan perempuan 251.651 jiwa perempuan. Data perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 6543 KK. Data rumah KK miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Selatan 45.346 KK Masih kurangnya kontrol terhadap organisasi-organisasi Perempuan dalam menyikapi isu-isu kesenjangan gender terhadap perempuan Terbatasnya tenaga terampil pelayanan ataupun pendampingan korban kekerasan
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** ***Akses*** - Rendahnay pengetahuan dan pendidikan perempuan menyebabkan perempuan lebih bergantung pada Laki-laki (suami) dalam keluarga - pengertian dan pemahaman masyarakat secara umum - Organisasi perempuan yang ada belum sepenuhnya membantu mengatasi isu-isu kesenjangan gender yang terjadi dalam masyarakat ***Kontrol*** - Organisasi Perempuan yang ada belum memahami peran organisasi terhadap isu-isu gender yang ada Organisasi perempuan yang ada masih berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program dan Kegiatan ***Manfaat*** Belum sepenuhnya organisasi perempuan/lembaga pemerhati perempuan berperan sebagai wadah untuk menampung aspirasi kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender **b. Penyebab Internal** Masih kurangnya pembinaan organisasi perempuan yang ada terhadp perspektif gender sebab itu isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius. **c. Penyebab Eksternal** Organisasi perempuan yang ada masih berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program dan kegiatannya Kurangnya komunikasi antara pemangku kepentingan dengan unsur-unsur yang ada dalam

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	organisasi/lembaga berkaitan dengan peningkatan kualitas perempuan dan kesetaraan gender	
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** **Meningkatkan peran Organisasi dan lembaga pemerhati perempuan terhadap isu-isu gender yang terjadi dan dapat berperan aktif untuk mewujudkan pembangunan yang responsive gender**	
	2. Indikator dan Target Kinerja Output : - Terlaksananya sosialisasi Forum PUSPA terhadap tugas dan fungsi forum untuk memahami isu-isu kesenjangan gender yang terjadi - Terlaksananya pelatihan/workshop organisasi perempuan (GOW,DW) tentang peran organisasi dalam pembangunan yang responsif gender Outcome : - Meningkatnya peran forum PUSPA dalam mengatasi kesenjangan gender - Meningkatnya peran organisasi perempuan (GOW,DW) sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan yang responsive gender.	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp 50.000.000,-**	
RENCANA AKSI RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Sosialisasi Forum Puspa terhadap tugas dan fungsi forum dalam memeahami isu-isu kesenjangan gender yang terjadi
	Kegiatan 2	Pelatihan/workshop Organisasi Perempuan tentang peranserta organisasi dalam pembangunan yang responsive gender

Padang, Juni 2021

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ZULFIAN APRIYANTO, S.I.M.Si
NIP. 19651116 198602 1 007

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program : Kegiatan : Sub. Kegiatan :	Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Alat Bantu
2	Indikator kinerja kegiatan	Jumlah pelayanan sosial bagi disabilitas berupa pemberian alat bantu. Meningkatnya pelayanan bantuan sosial alat bantu disabilitas yang responsive gender
3	Tujuan kegiatan	Mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas bagi Disabilitas
4	Analisa situasi	Data Terpilah Angka Disabilitas 2.429 jiwa L : 1.345 P: 1.084 Jumlah Disabilitas yang telah dibantu dengan alat bantu kursi roda 70 orang L: 18 P: 52 Mayoritas disabilitas yang telah dibantu adalah perempuan Kesenjangan Adanya Ketidaksetaraan Gender dibidang kesejahteraan sosial khususnya dalam hal pelayanan kepada disabilitas khususnya disabilitas laki-laki. **Akses:** Informasi disabilitas untuk mendapatkan bantuan masih rendah **Partisipasi :** Jumlah Disabilitas masih relative rendah dalam bantuan sosial **Kontrol :** Semua pengambil keputusan lebih dominan non disabilitas laki-laki dan non disabilitas perempuan. **Manfaat :** Manfaat dari bantuan sosial lebih didominasi oleh non disabilitas **Faktor Kesenjangan Internal dan Eksternal** **Sebab Kesenjangan Internal :** 1. Kurangnya pemahaman tentang PUG bagi tenaga pelayanan sosial 2. Lemahnya komitmen untuk mendukung PUG dalam pemberian bantua sosial 3. Belum ada produk hukum yang menjamin PUG dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial **Sebab Kesenjangan Eksternal :** 1. Faktor budaya, bahwa disabilitas kurang berperan dalam masyarakat. Persyaratan memperoleh bantuan belum responsive gender

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	Rencana Aksi (diambil dari langkah 7 analisis GAP)	Aktivitas 1 Menyusun Panduan Bantuan Sosial yang responsive gender	**Tujuan** Sebagai pedoman bagi pengelola bantuan sosial **Langkah kegiatan** 1. Membentuk Tim Penyusun panduan 2. Rapat Tim penyusun panduan 3. Menggandakan panduan Bantuan Sosial bagi Disabilitas
		Aktivitas 2 Sosialisasi PUG bagi pengelola Bantuan Sosial	**Tujuan** Menyamakan persepsi dalam pengelolaan bantuan sosial **Langkah kegiatan** 1. Membentuk panitia sosialisasi pelayanan bantuan sosial. 2. Melaksanakan sosialisasi bagi SDM penyelengaraan kesejahteraan sosial
6	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 74.048.964,-	
7	Dampak/hasil Output Kegiatan	1. Terjadinya peningkatan kesejahteraan anggota KUBE dengan meningkatkan pendapatan keluarga 2. Terjadinya persamaan hak dan kesempatan dalam memperoleh bantuan bagi laki-laki dan perempuan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	

Painan, Juni 2021
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSILAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Ilyas Yacub - Painan

GENDER BUDGET STATEMENT

(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

SKPD	: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.PESSEL
T.A	: 2022
PROGAM	**Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
KEGIATAN	Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan singkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
KODE REKENING	1.06.2.08.0.00.02.0000.2.08.02.2.01.01
ANALISIS SITUASI	Evaluasi terhadap peraturan yang terkait mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan perlunya penguatan dasar hukum percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Pada tahun 2013 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) sebagai motor penggerak (driver) PPRG mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Adapun tujuan dari stranas tersebut agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis baik di tingkat nasional maupun daerah. Menyikapi hal tersebut sangat penting dilakukan penguatan kelembagaan PUG diantaranya peran Focal Point (perencana program) dalam melaksanakan PPRG di masing-masing SKPD.
	• **Data Pembuka Wawasan** Berdasarkan Surat Keputusan Bupati no : 445 /159/Kpts/BPT-PS / 2020 Tentang Pembentukan kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2020, Komponen perencana terdiri dari 30 SKPD dan 15 Kecamatan yang tergabung dalam Pokja PUG dan focal point Kab.Pessel dengan anggota Focal point 148 anggota dari seluruh OPD • Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 445/160/Kpts/BPT-

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PS/2020 tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencnaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan , anggota Tim Driver PPRG terdiri dari Bappedalitbang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat dan BPKD

- Berdasarkan instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 5.55/Ins-2020 tentang Implementasi Gender Analysis Pathwy (GAP) dan Gender Budget Statemen (GBS) Dalam rencana Kerja anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ditetapkan secara bertahap 30 OPD yang membuat GAP dan GBS tahun 2021

1. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender

Akses:

- Akses untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahanan tentang PUG serta fungsi focal point dalam POKJA PUG melalui sosialisasi maupun media lainnya sangat kurang
- Menganggap PUG hanyalah bentuk program yang hanya merupakan urusan perempuan saja sehingga kurang direspon oleh OPD dan masyarakat secara umum

Partisipasi

Masih kurangnya Partisipasi dan pemahaman pengambil kebijakan terhadap PUG.

Masih adanya anggapan bahwa PUG hanya lah terkait urusan perempuan saja sehingga kurangnya kepedulian laki-laki sebagai pemangku kebijakan terhadap PUG

Kontrol

Masih kurangnya keterlibatan semua lapisan masyarakat, laki-laki dan perempuan serta masyarakat berkebutuhan khusus dalam perencanaaan program pembangunan yang responsie gender

Manfaat

Para pemangku kebijakan serta perencana program (focal point) di SKPD belum mendapatkan manfaatnya dari program dan kegiatan yang responsif gender

Penyebab Internal

- Semua anggota focal point dan perencana program di SKPD belum memahami, dan mendapatkan pembekalan ilmu tentang PPRG
- Sering terjadi rotasi dan mutasi SDM sebagai anggota focal point pada SKPD
- Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang PUG

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	dan PPRG dikarenakan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan **Penyebab Eksternal** • Koordinasi dan integrasi antar lintas SKPD dalam melaksanakan PPRG masih lemah. • Belum sinerginya anggota TAPD dalam memahami PPRG • Belum seluruh elemen masyarakat disosialisasikan PUG • Belum seluruh data gender yang dibutuhkan tersedia di SKPD dan stake holder.

RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	***Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender***	
		Tujuan	Meningkatkan kompetensi para perencana yang tergabung pada focal pooint dalam menerapkan PPRG di masing-masing SKPD
		Aktifitas 1	Advokasi dan sosialisasi regulasi yang dapat dijadikan pedoman dasar penerapan PPRG di daerah (peraturan perundangan pusat maupun derah) Tujuan : Memastikan agar para penentu kebijakan dan stakeholder dapat memahami dan komit.
		Aktifitas 2	Pelatihan PPRG bagi semua anggota Focal Point SKPD Tujuan : Memasrtikan seluruh focal point memahami dan mampu melaksanakan penyusunan PPRG
		Aktifitas 3	Workshop ketersediaan data terpilah guna mendukung analisys gender (GAP) dalam mewujudkan PPRG
		Aktifitas 4	Evaluasi dan momitoring pelaksanaan PPRG di masing-masing SKPD • Koordinasi dengan semua lintas pelaksana pembangunan tentang pelaksanaan PPRG

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

		Sumber Daya/ Input	a. 4 orang Nara Sumber (4 orang paraktisi/akademisi b. Anggota Focal Point c. Program dan kegiatan yang akan dianalisis
		Out Put	1. 45 orang anggota Focal Point yang sudah Paham tentang Integrasi Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Penguatan kelembagaan PUG terutama Focal Point dalam melaksanakan PPRG 3. Lahirnya program dan kegiatan yang responsif gender di Kabupaten Pesisir Selatan
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 114,807,880	
	SDM	3 orang nara sumber Jumlah peserta pelatihan PPRG 45 orang yang terdiri dari anggota Focal Point SKPD Jumlah Peserta sosialisasi PUG dari Nagari 182 Nagari	
DAMPAK/HASIL/ MANFAAT	1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi para perencana program yang tergabung dalam Focal Point dalam merealisir dan mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Pesisir Selatan 2. Tersusunya anggran Responsif Gender di masing-masing SKPD dengan melampirkan GAP dan GBS 3. Terwujudnya pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Pesisir Selatan		

Painan, Juni : 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program : Kegiatan :	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2	Indikator kinerja kegiatan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar bagi PNS
3	Tujuan kegiatan	Tersedianya bahan bacaan berupa media cetak dan peraturan perundang-undangan bagi PNS
4	Kode Rekening Kegiatan	1.01.06.01.01...
5	Analisa situasi	Data Terpilah Jumlah PNS dan tenaga honorer 46 orang L : 18 P: 28 Jumlah surat kabar/ media : 3 media berupa surat kabar lokal, Padang Ekspres, Singgalang dan Haluan Semua media yang disediakan berupa media lokal yang berisi isu yang hampir sama berupa berita politik dan pemerintahan dan lebih diminati oleh laki-laki. Kesenjangan Adanya ketidaksetaraan gender dibidang penyediaan media bacaan bagi PNS khususnya dalam hal bacaan yang lebih didominasi oleh laki-laki dan belum adanya bacaan khusus untuk perempuan, serta belum adanya penyediaan peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan PNS **Akses:** Bahan Bacaan yang sesuai minat perempuan tidak tersedia/dianggarkan **Partisipasi :** - Rendahnya minat baca bagi perempuan karena didominasi oleh laki-laki. - PNS laki laki lebih sering meluangkan waktu untuk membaca surat kabar yang disediakan OPD

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

		Kontrol : - Rendahnya inisiatif dari PNS perempuan untuk mengusulkan pengadaan bahan bacaan/tabloid wanita. - Perempuan yang ada belum pernah mengusulkan ke atasan **Manfaat :** Bahan bacaan yang ada saat ini belum mengakomodir minat membaca bagi perempuan. **Faktor Kesenjangan Internal dan Eksternal** **Sebab Kesenjangan Internal :** Pengelola Kegiatan belum memandang hal ini sebagai ketimpangan dalam mengakomodasi kebutuhan dan minat PNS perempuan akan bahan bacaan yang bisa berdampak positif dalam pelaksanaan tugas **Sebab Kesenjangan Eksternal :** - Adanya anggapan bahwa tabloid wanita bukan merupakan kebutuhan bacaan yang penting sebagaimana bahan bacaan lain yang bertema politik dan pemerintahan. - Adanya anggapan bahwa tabloid wanita hanya menyajikan artikel artikel yang berhubungan dengan hobi/minat perempuan seperti artikel masakan atau gosip selebriti yang dinilai tidak mempunyai dampak langsung untuk mendukung pelaksanaan tugas. - Tidak ada usulan/permintaan dari PNS perempuan yang ada	
6	**Rencana Aksi** **(diambil dari langkah 7 analisis GAP)**	**Aktivitas 1** Penyediaan bahan bacaan/peraturan perundangan	**Tujuan** Sebagai pedoman bagi pengelola Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan menyediakan bahan bacaan untuk PNS **Langkah kegiatan** 1. Mengkoordinasikan kebutuhan penyediaan bahan bacaan PNS dengan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan. 2. Melaksanakan penyediaan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan PNS

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

7	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 11.440.000,-	
8	Dampak/hasil Output Kegiatan	1. Terjadinya peningkatan wawasan bagi PNS melalui bahan bacaan. 2. Terjadinya persamaan hak dan kesempatan dalam memperoleh bacaan bagi PNS laki-laki dan perempuan	

Painan, Juni 2021
Kepala Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ZULFIAN APRIYANTO,SH, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/kota Sub Kegiatan : Sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 1 Tujuan Kegiatan: Meningkatkan kualitas hidup perempuan, produktivitas	Semenjak Kongres perempuan pertama kali tahun 1928 di Jogyakarta merupakan tonggak sejarah perjuangan bagi kaum perempuan di Indonesia, sehingga pada kongres ke III di Bandung tahun 1938 ditetapkan tanggal 22 Desember sebagai hari Ibu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang sisitim Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak Pereturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 sebesar : 511. 725 jiwa dengan komposisi, laki-laki :257.913 dan perempuan 253.812 jiwa perempuan.	*Akses* *Rendahnya pengetahan dan pendidikan perempuan menyebabkan perempuan lebih bergantung pada laki-laki (Suami)dalam keluarga* - Terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam penyelesaian kasus-kasus *Partisipasi* - Organisasi perempuan yang ada belum sepenuhnya membantu mengtasi isu-isu kesenjangan gender yang terjadi dalam masyarakat	Masih kurangnya pembinaan pada ogranisasi-organisasi perempuan terhadap perspektif gender sebab itu isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius	Organisasi perempuan yang ada masih berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program dan kegiatan Kuranghya komunikasi antara pemangku kepentingan dengan unsur-unsur yang ada dalam organisasi perempuan berkaitan dengan Identifikasi kebutuhan perempuan dan anak	Meningkatkan kesejahtraan dan Kualitas Hidup Perempuan serta kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan	Melaksanakan sosialisasi Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUSPA) Pelatihan/workshop Organisasi Perempuan terhadap Kesetaraan Gender bidang politik Dan Pembinaan Ekonomi Perempuan	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang sisitim Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan anak Pereturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Pelatihan /Workshop Organisasi Perempuan (GOW dan DW) terhadap Kesetaraan gender Terlaksananya sosialisasi terhadap Forum PUSPA, terhadap tugas dan fungsi forum untuk mewujudkan kesetaraan Gender dalam pembangunan

untuk menampung aspirasi kaum perempuan

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
ekonomi perempuan serta kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui Forum PUSPA Terbinanya organisasi Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan Gender	Data perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 6543 KK. Data rumah KK miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Selatan 45.346 KK Masih kurangnya kontrol terhadap organisasi-organisasi Perempuan dalam menyikapi isu-isu kesenjangan gender terhadap perempuan Terbatasnya tenaga terampil pelayanan ataupun pendampingan korban kekerasan	***Kontrol*** - Organisasi Perempuan yang ada belum memahami peran organisasi terhadap isu-isu gender yang ada ***Manfaat*** Belum sepenuhnya organisasi perempuan / lembaga pemerhati perempuan lainnya sebagai tempat/wadah untuk menampung aspirasi kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan						

Padang, Juni 2021

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ZULFIAN APRIYANTO, SH.M.Si

19651116 199602 1 007

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS SOSIAL, PPrPA.

Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Kegiatan/sub kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	Zuharsyah	
3	Desri Lakesmiarti (Dinsos PPrPA)	
4	Irnawati (BPKAD)	

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Kebijakan : Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial **Program :** Rehabilitasi Sosial **Kegiatan :** Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Angka Penyandang Disabilitas 2.429 jiwa P : 1.084 L : 1.345 Jumlah Disabilitas yang telah dibantudengan alat bantu kursi roda 70 orang Mayoritas penerima bantuan alat bantu kursi roda saat ini adalah perempuan. L : 18 P : 52	Adanya Ketidaksetaraan Gender dibidang kesejahteraan sosial khususnya dalam hal pelayanan kepada Disabilitas laki-laki dan perempuan **Akses:**Informasi disabilitas untuk mendapatkan bantuan masih rendah **Partisipasi :** Jumlah Disabilitas masih relative rendah dalam bantuan sosial **Kontrol :** Semua pengambil keputusan lebih	1. Kurangnya pemahaman tentang PUG bagi tenaga pelayanan sosial 2. Lemahnya komitmen untuk mendukung PUG dalam pemberian bantua sosial 3. Belum ada produk hukum yang menjamin PUG dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Faktor budaya, bahwa disabilitas kurang berperan dalam masyarakat. -2.Persyaratan memperoleh bantuan belum responsive gender	Mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS baik disabilitas maupun non disabilitas.maupun perempuan dalam pemberian bantuan KUBE	1. Menyusun Panduan Bantuan Sosial yang responsive gender 2.Sosialisasi PUG bagi pengelola Bantuan Sosial .	Jumlah Disabilitas yang telah diberikan bantuan alat bantu disabilitas 70 orang disabilitas. L: 18 P: 52	Jumlah pelayanan sosial bagi disabilitas berupa pemberian alat bantu. Outcome Meningkatnya pelayanan bantuan sosial alat bantu disabilitas yang responsive gender P : 1.084 L : 1.345 Input: Rp.74.048.964,-

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Sub. Kegiatan: Penyediaan Alat Bantu **Output :** Rehabilitasi sosial sabilitas luar panti **Tujuan :** Mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas bagi Disabilitas		dominan non disabilitas laki-laki dan non disabilitas perempuan. **Manfaat :** Manfaat dari bantuan sosial lebih didominasi oleh non disabilitas						

Painan, Juni 2021
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ZULFIAN APRIYANTO,SH.M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS SOSIAL, PPrPA.

Program : Rehabilitasi sosial

Kegiatan/Sub Kegiatan: Penyediaan Alat Bantu.

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	Zuharpen	
3	Desti Lakesmidarti (DINSOS PPrPA)	
4	Irnawati (BPKAD)	

Dipindai dengan CamScanner

GAP (Gender Analysis Pathway)

SKPD: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 2021

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : **Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** **KEGIATAN:** **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten** **SUB KEGIATAN :** **Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG**	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Ke Depan**		**Pengukuran Hasil**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Data Dasar (Base-lina)**	**Indikator Gender**
	• Berdasarkan Surat Keputusan Bupati no : 445/159/Kpts/BPT-PS / 2020 Tentang Pembentukan kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2020. • Komponen perencana terdiri dari 30 SKPD dan 15 Kecamatan yang tergabung Pokja PUG dan focal point Kab.Pessel	***Akses:*** • Akses untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahanan tentang PUG melalui sosialisasi maupun media lainnya sangat kurang • Masih kurangnya pedoman atau modul pelaksanaan PUG di daerah • Menganggap PUG hanyalah bentuk program yang	• Sebagian besar anggota focal point dan perencana program di SKPD belum memahami, dan mendapatkan pembekalan ilmu tentang PPRG • Sering terjadi rotasi dan mutasi SDM sebagai anggota focal point pada SKPD • Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan	• Koordinasi dan integrasi antar lintas SKPD dalam melaksanakan PPRG masih lemah. • Belum sinerginya anggota TAPD dalam memahami PPRG • Sering peserta sosialisai PUG dari OPD mengutus	Meningkatan kompetensi para perencana yang tergabung dalam focal point dalam menerapkan PPRG di masing-masing SKPD serta sinergi tim TAPD dalam	• Advokasi dan sosialisasi kepada semua Pokja PUG dan Focal Point terkait PUG dalam Pembangunan • Advokasi dan sosialisasi kepada semua	• Komponen perencana dari 30 SKPD dan 15 Kecamatan yang tergabung Pokja PUG dan focal point Kab.Pessel yang berdasarkan Kep. Bupati no : 460 /81/Kpts/BPT-PS / 2019 berjumlah 45 OPD dan 148	**In Put** : Rp. 114,807,880 **Out Put :** • Terlaksananya sosialisasi PUG terhadap Pokja PUG dan 182 Nagari • Terlatihnya Focal point PPRG yang mampu menyusun anggaran yang responsif gender • Meingkatnya pemahaman

Dipindai dengan CamScanner

TUJUAN: Meningkatan Pemahaman Pokja PUG serat kompetensi para perencana yang tergabung dalam Pokja PUG dan focal point dalam menerapkan PPRG dalam pembangunan	dengan anggota Focal point 148 anggota dari seluruh OPD • Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 445/160/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencnaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan , anggota Tim Driver PPRG terdiri dari Bappedalitbang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat dan BPKD Berdasarkan instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 5.55/Ins-2020 tentang Implementasi Gender Analysis Pathwy (GAP)	hanya merupakan urusan perempuan saja sehingga kurang direspon oleh OPD dan masyarakat secara umum ***Partisipasi*** Masih kurangnya Partisipasi dan pemahaman pengambil kebijakan terhadap PUG. Masih adanya anggapan bahwa PUG hanya lah terkait urusan perempuan saja sehingga kurangnya kepedulian laki-laki sebagai pemangku kebijakan terhadap PUG	sosialisasi tentang PUG dan PPRG dikarenakan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan • Kurangnya SDM terlatih yang mampu mensosialisasikan(gender campion) yang meguasai PUG sebagai narasumber untuk memberikan advokasi terhadap Pokja PUG • Sering terjadi rotasi dan mutasi SDM sebagai anggota focal point pada SKPD	staf yang tidak kompeten dalam pengambilan kebijakan tentang PUG • Belum seluruh elemen masyarakat disosialisasikan PUG • Belum seluruh data gender yang dibutuhkan tersedia di SKPD dan stake holder.	pelaksanaan PPRG	pimpinan SKPD dan stakehol der terkait tentang PPRG • Bintek PPRG terhadap anggota focal point • Bintek Tim Driver PPRG terhadap tugas dan fungsi tim driver • Sosialisasi PUG di Nagari	anggota Focal Poin dari seluruh OPD • Berlum semua anggota Pokja PUG dan Focal Point memahami tugas mereka sebagai anggota pokja dan Focal Point	Anggota Pokja PUG dan Focal Point terhadap Tupoksinya sebagai Anggota Pokja PUG dan Focal Point **Out Camp** : Terwujudnya pembangunan yang responsif gender di kabupaten Pesisir Selatan

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	dan Gender Budget Statemen (GBS) Dalam rencana Kerja anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ditetapkan secara bertahap 30 OPD yang membuat GAP dan GBS tahun 2021	***Kontrol*** Dalam menetapkan Prioritas program pembangunan masih kurang memperhatikan isu-isu gender dalam pembangunan Masih kurangnya keterlibatan semua lapisan masyarakat, laki-laki dan perempuan dan berkebutuhan khusus dalam perencanaaan program pembangunan ***Manfaat*** Para pemangku kebijakan serta perencana program (focal point) di SKPD belum						

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

		mendapatkan manfaatnya dari program dan kegiatan yang responsif gender Pendekatan pembangunan yang belum mengakomudir tentang pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, anak perempuan dan anka laki-laki						

Painan, Juni 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

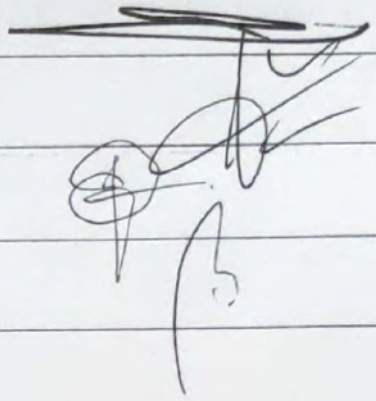
OPD : DINAS SOSIAL, PPrPA.

Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Kegiatan/sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan kebijakan PUG.

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	Juharjun	
3	Desri Lakismidarti (Dinas PPrPA)	
4	Irnawati (BPKAD)	



Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota **Kegiatan :** Penyediaan bahan bacaan/peraturan perundangan	• Setiap tahun anggaran, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan 3 media surat kabar. • Surat kabar yang diadakan tersebut adalah surat kabar/majalah/berita yang berisi isu politik dan pemerintahan (belum ada bacaan/tabloid khusus wanita) • Dari 3 media bahan bacaan tersebut, belum ada surat kabar/bahan bacaan khusus wanita yang mengakomodasi minat dan hobi perempuan • Jumlah PNS dan honorer pada Dinas Sosial,	Akses Bahan Bacaan yang sesuai minat perempuan tidak tersedia/dianggarkan Partisipasi • Rendahnya minat baca bagi perempuan karena didominasi oleh laki-laki • PNS laki laki lebih sering meluangkan waktu untuk membaca surat kabar yang disediakan OPD Kontrol • Rendahnya inisiatif dari PNS perempuan untuk mengusulkan pengadaan bahan bacaan/tabloid wanita • Perempuan yang ada belum pernah mengusulkan ke	Pengelola Kegiatan belum memandang hal ini sebagai ketimpangan dalam mengakomodasi kebutuhan dan minat PNS perempuan akan bahan bacaan yang bisa berdampak positif dalam pelaksanaan tugas	• Adanya anggapan bahwa tabloid wanita bukan merupakan kebutuhan bacaan yang penting sebagaimana bahan bacaan lain yang bertema politik dan pemerintahan. • Adanya anggapan bahwa tabloid wanita hanya menyajikan artikel artikel yang berhubungan dengan hobi/minat perempuan seperti artikel masakan atau gosip selebriti yang dinilai tidak	Meningkatnya pengetahuann dan wawasan ASN	Penyediaan bahan bacaan/peraturan perundangan	Media cetak yang dgunakan saat ini adalah Padang Ekspres, Singgalang dan Haluan	**Kegiatan 1** Penyediaan bahan bacaan/peraturan perundangan **Input :** **Rp. 11.440.000,-** **Output :** Tersedianya bahan bacaan bagi PNS **Outcome :** Meningkatnya wawasan PNS dari jumlah media yang disediakan

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 46 orang dan laki laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 28 orang • PNS perempuan kurang berminat pada bacaan yang bertema politik atau pemerintah	atasan Manfaat • Bahan bacaan yang ada saat ini belum mengakomodir minat membaca bagi perempuan.		mempunyai dampak langsung untuk mendukung pelaksanaan tugas. • Tidak ada usulan/permintaan dari PNS perempuan yang ada				

Painan, Juni 2021
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ZULFIAN APRIYANTO,SH,M.SI
NIP. 19851116 198602 1 002

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS SOSIAL, PPrPA.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan/sub kegiatan : Penyediaan bahan bacaan/peraturan perundangan.

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	Zuharjun	
3	Desri Lakemidarti (Dinsos PPrPA)	
4	Irnawati (BPKAD)	

Dipindai dengan CamScanner

Telah diverifikasi

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax (0756) 21293
dppmdppkbkabpessel@gmail.com
PAINAN

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan**

TAHUN ANGGARAN : **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2022**

PROGRAM	**Pembinaan Keluarga Berencana**
KEGIATAN	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota**
SUB KEGIATAN	**Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**
KODE Kegiatan	**2.14.03.2.03.03**
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat memiliki: ▪ Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka tahun 2018 berjumlah 460.716 jiwa , Tahun 2018 yaitu 228.571 Jiwa Laki-laki dan 232.145 Jiwa Perempuan. ▪ Jumlah Nagari di Pesisir Selatan sebanyak 182 Nagari/Desa. ▪ Jumlah Pasangan Usia Subur Di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebanyak 80.949 orang ▪ Jumlah Aseptor KB yang Menggunakan Aseptor KB: 7.383 aseptor (1.992 MKJP dan 5.391 Non MKJP) **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** ***a. Faktor Kesenjangan*** **Akses:** - Rendahnya rasio penggunaan kontrasepsi KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, MOW, Implant dan MOP) - Masih kurangnya informasi tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang - Memotifasi masyarakat untuk menggunakan MKJP dengan pemberian Dana Stimulan **Partisipasi:** . Kurangnya peran aktif masyarakat dalam menggunakan Kontrasepsi Jangka Panjang

Dipindai dengan CamScanner

	Kontrol: - Banyaknya PUS yang telah mempunyai anak lebih dari dua orang tidak mendapat persetujuan dari pasangan. **Manfaat:** - Kurangnya pelayanan KB dengan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. ***b. Penyebab Internal*** ▪ Kurangnya tenaga penyuluh KB dalam menfasilitasi penggunaan alat kontrasepsi KB Jangka Panjang ***c. Penyebab Eksternal*** - Stigma masyarakat bahwa yang memakai kontrasepsi itu perempuan - Kurangnya kesadaran lelaki untuk menggunakan kontrasepsi. - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kontrasepsi jangka panjang - Adanya beberapa kejadian komplikasi penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang yang membuat masyarakat takut menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang		
RENCANA TINDAK	**Kegiatan**	**Bakti KB Kes IBI/IDI/TNI/Bhayangkara/PKK dan Jambore**	
		Tujuan	**Meningkatkan Pemakaian Konrasepsi Jangka Panjang** (IUD, IMPLANT, MOW, MOP)
		Aktivitas	1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang metode kontrasepsi jangka panjang 2. Meningkatkan Peran Aktif dari TNI untuk mencari aseptor KB untuk metode Kontrasepsi Jangka Panjang. 3. Meningkatkan Peran Aktif Penyuluh KB.
		Sumber Daya (Input)	Dana: APBD
			Penyuluh KB
			Kader KB
			Kelembagaan KB
			Sarana dan prasarana: transportasi, untuk pelayanan yaitu mobil pengangkut aseptor KB Kabupaten Pessel
		Output	▪ Meningkatnya Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.
ALOKASI SUMBER DAYA	***Anggaran***	Rp. 881.526.830	

Dipindai dengan CamScanner

Telah diverifikasi

	dan Mesin	
Outcome	Jumlah Aseptor Pelayanan MKJP sebanyak 1.992 Orang	

Painan, Juni 2021

Kepala DPMDPPKB,

WENDY, S.H., M.Hum

NIP. 19760407 199803 1 005

Dipindai dengan CamScanner

Telah diverifikasi

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax (0756) 21293
dppmdppkbkabpessel@gmail.com
PAINAN

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan**

TAHUN ANGGARAN : **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2022**

PROGRAM	**Pembinaan Keluarga Berencana.**
KEGIATAN	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal (DAK Non Fisik)**
Sub Kegiatan :	**Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang**
KODE Kegiatan	**2.14.03.2.01.04**
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat memiliki: ▪ Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka tahun 2018 berjumlah 460.716 jiwa , Tahun 2018 yaitu 228.571 Jiwa Laki-laki dan 232.145 Jiwa Perempuan. ▪ Jumlah Nagari di Pesisir Selatan sebanyak 182 Nagari/Desa. ▪ Jumlah Pasangan Usia Subur Di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebanyak 80.949 orang ▪ **Komunikasi kesehatan adalah usaha sistematis untuk mempengaruhi perilaku positif dimasyarakat, dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi baik menggunakan komunikasi pribadi maupun komunikasi massa.** ▪ **Informasi adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui masy (pesan yang disampaikan)** ▪ **Edukasi adalah proses perubahan perilaku ke arah yang positif. Pendidikan kesehatan merupakan kompetensi yang dituntut dari tenaga kesehatan karena merupakan salah satu peranan yang harus dilaksanakan dalam setiap memberikan pelayanan kesehatan** **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** ***a. Faktor Kesenjangan*** **Akses:** - Rendahnya rasio penggunaan kontrasepsi KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, MOW, Implant dan MOP) - Masih Kurangnya Informasi Tentang Metode Kontrasepsi Jangka

Dipindai dengan CamScanner

	kesehatanm reproduksi dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui media KIE - **Mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat (klien) secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawa** **Partisipasi:** . Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Menggunakan Kontrasepsi Jangka Panjang dan Jangka Pendek **Kontrol:** - PUS yang telah mempunyai anak lebih dari dua orang dan telah mendapat persetujuan dari Pasangan. **Manfaat:** - Meningkatkan pelayanan KB dengan Menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. - Meningkatnya pelayanan KB dengan Mengunakan Metode Jangka Pendek ***b. Penyebab Internal*** ▪ Keterbatasan anggaran yang tersedia. ▪ Kurangnya kesadaran masyarakat tentang metode kontrasepsi jangka panjang ▪ Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi jangka pendek seperti: Kondom, Suntik, dan Pil ▪ Adanya beberapa kejadian Komplikasi penggunaan kontrasepsi jangka panjang yang membuat masyarakat takut menggunakan kontrasepsi jangka panjang ***c. Penyebab Eksternal*** - Stigma masyarakat bahwa yang memakai kontrasepsi itu Perempuan - Kurangnya kesadaran lelaki untuk mnggunakan kontrasepsi.	
RENCANA TINDAK	**Kegiatan**	**Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)**	
		Tujuan	. **Meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek KB sehingga tercapai penambahan peserta baru** . **Membina kelestarian peserta KB** . **Meletakkan dasar bagi mekanisme sosio-kultural yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan** . **Mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat (klien) secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara**

Dipindai dengan CamScanner

Telah diverifikasi

			melalui media KIE 2. Meningkatkan Peran Aktif dari TNI untuk mencari aseptor KB untuk metode Kontrasepsi jangka panjang. 3. Meningkatkan Peran Aktif Penyuluh KB. 4. Meningkatkan peran aktif dari lembaga lembaga KB
		Sumber Daya (Input)	Dana: APBN
			Media KIE KB
			Kader KB
			Kelembagaan KB
			Sarana dan prasarana: Media informasi outdor dan indor
		Output	▪ Meningkatnya Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan Jangka Pendek.
ALOKASI SUMBER DAYA	***Anggaran***	Rp. 192.370.000	
	SDM	Penyuluh KB, Kader KB dan Lembaga KB	
	Peralatan dan Mesin	Obat obatan untuk pelayanan MKJP dan Non MKJP. Media spanduk, plamlet outdor dan indor	
Outcome	Jumlah Aseptor Pelayanan MKJP sebanyak 1.992 Orang dan Non MKJP 5.391 orang		

Painan, ____ Juni 2021

Kepala DPMDPPKB,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

WENDI, S.H., M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005

Dipindai dengan CamScanner

Telah diverifikasi

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : DPMDPPKB KABUPATEN PESISIR SELATAN

PROGRAM : 2.14.03 – Pembinaan Keluarga Berencana.

KEGIATAN : 2.14.03.2.03 – Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan: 2.14.03.2.03.03 – Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pembinaan Keluarga Berencana **Kegiatan :** Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota **Sub Kegiatan :** Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) **Tujuan :** **Meningkatkan Pelayanan Kontrasepsi Jangka**	Data Jumlah penduduk pesisir selatan menurut pesisir selatan dalam angka tahun 2019 yaitu 460.716 dengan rincian 228.571 (jiwa).laki-laki dan 232.145 (Jiwa)perempuan. Jumlah nagari di pesisir selatan.182 Nagari/Desa Jumlah Pasangan Usia Subur di Kab Pessel 80.949 Jumlah Aseptor KB yang menggunakan aseptor KB: 7.383 (1.992 MKJP	**Akses :** - Sedikitnya Rasio Penggunaan Kontrasepsi KB menggunakan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, MOW, Implan dan MOP) - Masih Kurangnya Informasi Tentang MKJP - Memotifasi masyarakat untuk menggunakan metode MKJP dengan Pemberian Dana Stimulan **Partisipasi :** -. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam menggunakan	- Kurangnya tenaga penyuluh KB dalam memfasilitasi pengguna KB jangka panjang	- Stigma masyarakat bahwa yang memakai konrasepsi itu perempuan . - Kurangnya kesadaran lelaki untuk menggunakan kontrasepsi - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang metode kontrasepsi jangka panjang - Adanya beberapa kejadian komplikasi	**Meningkatkan Pelayanan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang metode kontrasepsi jangka panjang Meningkatkan peran aktif Masyarakat dan TNI untuk mencari aseptor KB untuk metode kontrasepsi jangka panjang Pengusulan Penambahan tenaga penyuluh KB ke Pusat	Data Jumlah penduduk pesisir selatan menurut pesisir selatan dalam angka tahun 2019 yaitu 460.716 dengan rincian 228.571 (jiwa).laki-laki dan 232.145 (Jiwa)perempuan . Jumlah nagari di pesisir selatan.182 Nagari/Desa Jumlah Pasangan Usia Subur di Kab Pessel 80.949	Input : Jumlah Dana Rp. 881.526.830 Output : Jumlah Pemakaian kontrasepsi MKJP sebanyak 1.992 IUD sebanyak 246 Orang, IMPLAN 1.605 Orang, MOW 141 Orang, dan MOP - Outcome : Menurunya angka Kelahiran

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Panjang (MKJP)	dan 5.391 Non MKJP)	kontrasepsi Jangka Panjang **Control :** **Banyaknya PUS yang telah mempunyai Anak lebih dari dua orang tidak mendapat persetujuan dari pasangan** **Manfaat :** - **Kurangnya Pelayanan KB dengan Menggunakan metode Kontrasepsi Jangka Panjang**		penggunaan konrasepsi jangka panjang yang membuat masyarakat takut menggunakan kontrasepsi jangka panjang			Jumlah Aseptor KB yang menggunakan aseptor KB; 7.383 (1.992 MKJP dan 5.391 Non MKJP)	

Painan, Juni 2021

Kepala DPMDPPKB,

WENDY, S.H., M.Hum

NIP. 19730407 199803 1 005

Dipindai dengan CamScanner

Telah diverifikasi

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : **DPMDPPKB KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PROGRAM : **2.14.03 – Pembinaan Keluarga Berencana.**

KEGIATAN : **2.14.03.2.01 – Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.04 – Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pembinaan Keluarga Berencana. **Kegiatan :** Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal **Sub Kegiatan :** Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Data Jumlah penduduk pesisir selatan menurut pesisir selatan dalam angka tahun 2019 yaitu 460.716 dengan rincian 228.571 (jiwa).laki-laki dan 232.145 (Jiwa)perempuan. Jumlah nagari di pesisir selatan.182 Nagari/Desa Jumlah Pasangan Usia Subur di Kab Pessel 80.949 Jumlah Aseptor KB yang menggunakan aseptor KB: 7.383 (1.992 MKJP dan 5.391 Non MKJP)	**Akses :** - Kurangnya media komunikasi, informasi dan Edukasi tentang program Keluarga Berencana bagi Masyarakat - Masih Kurangnya Informasi Tentang Pemakaian Kontrasepsi **Partisipasi :** -. Masih rendahnya kepedulian Masyarakat terhadap informasi Keluarga Berencana **Control :** Masih kurangnya	Media KIE masih bias Gender	- Stigma masyrakat bahwa yang memakai konrasepsi itu perempuan . - Kurangnya kesadaran lelaki untuk menggunakan kontrasepsi	**Tujuan :** Meningkatkan Pelayanan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Kontrasepsi Jangka Pendek	Pengadaan Media Informasi KIE	Data Jumlah penduduk pesisir selatan menurut pesisir selatan dalam angka tahun 2019 yaitu 460.716 dengan rincian 228.571 (jiwa).laki-laki dan 232.145 (Jiwa)perempuan . Jumlah nagari di pesisir selatan.182 Nagari/Desa Jumlah Pasangan Usia Subur di Kab Pessel 80.949	Input : Jumlah Dana Rp. Rp. 192.370.000, Output : Jumlah Media KIE yang dilaksanakan Outcome : Meningkatnya pengetahuan Masarakat tentang pemakaian kontrasepsi jangka panjang dan Pendek

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Kontrasepsi Jangka Pendek		Media komunikasi Manfaat : Media belum mampu memberikan informasi secara menyeluruh kepada Masyarakat tentang Program KB					Jumlah Aseptor KB yang menggunakan aseptor KB: 7.383 (1.992 MKJP dan 5.391 Non MKJP)	

Painan, __ Juni 2021

Kepala DPMDPPKB,

WENDY, S.H., M.Hum

NIP. 19760407 199803 1 005

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DPMAPPKB

Program : Pembinaan Keluarga Berencana.

Kegiatan/Sub keg : Promosi dan KIE Program UKBPK melalui media massa cetak dan media luar ruangan.

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Yefrizal (Inspektorat)	
2	Irnawati (BPKAD)	
3	Dewi Lalusmi Sarti (Dinas PPPA)	
4	Riftomi (Bappeda Litbang)	

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DPMPPKB

Program : Pembinaan Keluarga Berencana.

Kegiatan /Sub. keg : Peningkatan Ketertaan Penggunaan Metoda kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	[illegible] (Inspektorat)	
2	Irnawati (BPKB)	
3	Desri Laksmiarti (Dinas PPPA)	
4	Rif Tomi (Bapeda Sitbang)	

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

NO	ASPEK		URAIAN	
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :		Penyelenggaraan Pegawasan Penyelenggaran Pengawasan Internal Reviu Laporan Kinerja	
2	Output kegiatan		Rp150.000.000,-	
3	Analisa situasi			
4	Rencana Aksi		Reviu Laporan Kinerja	1. Reviu laporan Kinerja atas Dokumen Perencanaan dan Laporan (45 Perangkat Daerah). 2. Mengajukan usulan formasi PNS tenaga Fungsional Pemeriksa ke BKPSDM. 3. Pengembangan dan Peningkatan wawasan aparatur pengawasan
5	Alokasi Anggaran Output Kegiatan			Jumlah Anggaran sebesar Rp150.000.000,-
6	Dampak/hasil Output Kegiatan			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja
Program				Penyelenggaraan Pegawasan
Sasaran Program				Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah
Sub. Kegiatan				Reviu Laporan Kinerja
Latar Belakang		Dasar Hukum		APBD
		Gambaran Umum		-

Dipindai dengan CamScanner

Kegiatan	Uraian Kegiatan	Reviu RPJMD, Reviu RKPD, PPRG, LPPD , Lkj IPLnja Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
	Indikator Kinerja	-Persentase akuratnya data dalam mencapai visi dan mis Kepala Daerah, terstrukturnya perencana kegiatan sesuai dengan aturan, standar atau norma, selarasnya dokumen renstra, IKU PD, LKj-IP I Perjanjian Kinerja dan lain-lainnya yang baik dan sesuai aturan yang berlaku
	Batasan Kegiatan	12 Bulan
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan pemahaman terhadap protap dan aturan dan melaksanakan pertanggungajawaban sesuai dengan Aturan yang berlaku.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Memberikan Solusi dan menegaskan kepada PD dan Pejabat Pengelola keuangan langsung ke PD masing-masing.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Pesisir Selatan.
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Inspektur
Jadwal		Januari s.d. Desember
Biaya		Rp150.000.000,-

Painan, 18 Juni 2021
Plt. Inspektur,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT

RUSDIANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PD :Inspektorat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kine
Program : Penyelenggaraan Pegawasan **Kegiatan :** Penyelenggaran Pengawasan Internal. **Sub Kegiatan :** Reviu Laporan Kinerja **Tujuan :** Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.	- Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. - Jumlah Perangkat Daerah sebanyak 45 - Reviu RPJMD, RKPD, LPPD, Lkj-IP, PPRG. - Data kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 - Jumlah PNS Inspektorat sebanyak 48 orang terdiri dari Pejabat Struktural 9 orang, Pejabat Fungsional 27 orang dan 12 orang fungsional umum. - Jumlah Tim Pemeriksa sebanyak 27 orang yang terdiri dari: 14 orang laki-laki dan 13 orang perempuan.	**Akses :** Keterbatasan waktu pemeriksa dalam pemeriksaan evaluasi. **Partisipasi :** Keterbatasan Ruang Gerak bagi perempuan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. **Kontrol :** Dalam hal pengambilan keputusan lebih didominasi oleh keputusan pimpinan. **Manfaat :** - Akuratnya data dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. - Terstrukturnya perencaraan kegiatan sesuai dengan aturan, standar atau norma yang berlaku. - Selarasnya dokumen Renstra, IKU PD, Lkj-IP PD, Perjanjian Kinerja dan lainnya yang disajikan dalam dokumen yang direviu. - Pengendalian terhadap	- Belum maksimalnya pemahaman pemeriksa terhadap Pelaksanaan Reviu. - Keterbatasan jumlah SDM pemeriksa untuk memfasilitasi pelaksanaan reviu. - Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata baik dari segi kapasitas dan kompetensinya - Belum proporsional tingkatan jabatan fungsional yang tersedia dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan - Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara	-Belum optimalnya Tenaga Fungsional tertentu Auditor yang dibutuhkan berdasarkan Obrik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. -Ketuhan Auditor seharusnya 67 orang yang ada baru 27 orang masih ada kekurangan 40 orang.	- Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.	- Reviu laporan Kinerja atas Dokumen Perencanaan dan Laporan (45 Perangkat Daerah). - Mengajukan usulan formasi PNS tenaga Fungsional Pemeriksa ke BKPSDM - Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	- Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. - Jumlah Perangkat Daerah sebanyak 45 - Reviu RPJMD, RKPD, LPPD, Lkj-IP, PPRG - Data kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 - Jumlah Pegawai 48 orang terdiri dari Pejabat Struktural 9 orang, Pejabat Fungsional 27 orang dan 12 orang fungsional umum. - Jumlah Tim Pemeriksa sebanyak 27 orang yang terdiri dari: 14 orang laki-laki dan 13 orang	Sub Kegiatan Reviu Lapo Kinerja Input : Rp.150.000.0 .- Output: Terlaksanany Reviu Lapo Kinerja Outcome: Laporan h Reviu y baik dan ses aturan.

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kine
		pelaksanaan kebijakan pengawasan Inspektorat dan terukurnya tingkat keberhasilan/tidaknya melalui inventarisasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.	dini - Belum pahamnya konsep gender oleh pengelola kegiatan				perempuan.	

Painan, 18 Juni 2021
Plt. Inspektur,

RUSDIYANTO, S.K., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 1992 1 008

Dipindai dengan CamScanner

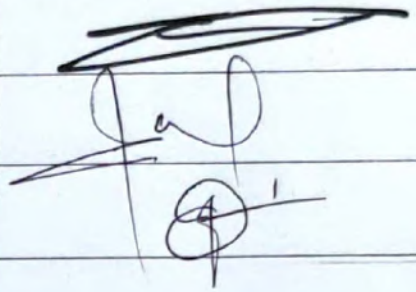
Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : INSPEKTORAT

Program : Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	YEFRIZAL (INSPEKTUR)	
2	Sofiarneri (Dinas PPPA)	
3	Desi Lakusmidarti (Dinas PPPA)	
4		

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	1. Informasi dan Komunikasi Publik	
KODE PROGRAM	1. 2.16.02 (Program Informasi dan Komunikasi Publik)	
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a) Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/ 220 /Kpts/BPT-PS/2021 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/142/Kpts/BPT-PS/2021 tentang penetapan admin/operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada perangkat Daerah Tahun 2021 b) Jumlah yang sudah dibimtek tahun 2019 sebanyak 90 orang c) Tahun 2020 dan 2021 bimtek tidak bisa dilaksanakan karena refocusing anggaran d) Target tahun 2022 sebanyak 60 orang (30 Nagari X 2 Orang) e) Jumlah keseluruhan operator sebanyak 234 orang f) Keterlibatan perempuan sebanyak 30% dari jumlah operator keseluruhan	
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** 1. Masih kurangnya Pengelolaan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat 2. Keterbukaan informasi publik belum dapat diakses oleh seluruh masyarakat **b. Penyebab Internal** 1. Keterbatasan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika **c. Penyebab Eksternal** a. Pengalokasian anggaran belum mempertimbangkan untuk keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik b. Penguatan untuk melaksanakan pengelolaan keterbukaan informasi publik belum banyak melibatkan perempuan c. Masih adanya mindset aparatur terhadap kualitas perempuan d. Pengalokasian anggaran belum mempertimbangkan untuk keterlibatan perempuan dalam pejabat pengelola (Admin) keterbukaan informasi publik e. Pengalokasian anggaran belum mempertimbangka peningkata kinerja ASN Perempuan	
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** a. Tersedianya dana yang sesuai dengan alokasi kegiatan b. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan (pmobilitas untuk melaksanakan Pembinaan)	
	2. Indikator dan Target Kinerja **a.** Pelayanan dan pengelolaan informasi publik	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 300.000.000,-**	
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	
	Masukan	Rp. 300.000.000,-
	Keluaran	Terlatihnya 60 operator
	Hasil	Tersampaikan dan terlaksananya keterbukaan informasi publik

Painan, 22 Juni 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan,

JUNAIDI,S.Kom,ME
NIP. 19700609 199703 1 002

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Informasi dan Komunikasi Publik **KEGIATAN:** Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Pelayanan Informasi Publik **TUJUAN:** Terlaksananya keterbukaan informasi public di Perangkat daerah, nigari,sekolah,BUMD se Kabupaten Pesisir Selatan	- Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren bidang komunikasi dan informatika - Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/ 220 /Kpts/BPT-PS/2021 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/142/Kpts/BPT-PS/2021 tentang penetapan admin/operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada perangkat Daerah Tahun 2021 - Jumlah yang sudah dibimtek tahun 2019 sebanyak 90 orang - Tahun 2020 dan	Akses : Masih kurangnya Pengelolaan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat Partisipasi : Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi publik Kontrol: Tidak adanya keinginan masyarakat yang melaksanakan keterbukaan informasi publik yang mengikutsertakan atau keterlibatan perempuan. Manfaat: Belum bisa memanfaatkan keterbukaan infomasi Publik	Keterbatasan anggaran	-Pengalokasian anggaran belum mempertimbangkan untuk keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik -Penguatan untuk melaksanakan pengelolaan keterbukaan informasi publik belum banyak melibatkan perempuan -Masih adanya mindset aparatur terhadap kualitas perempuan	Meningkatnya kinerja aparatur admin OPD, Kecamatan sampai Nagari	-Pembinaan terhadap kelompok informasi masyarakat dalam penyampaian informasi pemerintah daerah	- Kelompok Informasi Masyarakat yang mampu menyampaikan informasi pemerintah daerah - Sarana dan prasrana untuk pembinaan Kelompok Informasi Masyakarat hanya terbatas terutama untuk mobilitas ke daerah-daerah binaan yang tersebar diseluruh Kab.Pessel.	Kegiatan 1: Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Input: Rp.300.000.000,- Output : Terlatihnya 60 operator Outcome : Tersampaikan dan tersebarnya pelaksanaan informasi public melalui pelayanan PPID

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	2021 bimtek tidak bisa dilaksanakan karena refocusing anggaran - Target tahun 2022 sebanyak 60 orang (30 Nagari X 2 Orang) - Jumlah keseluruhan operator sebanyak 234 orang - Keterlibatan perempuan sebanyak 30% dari jumlah operator keseluruhan							

Painan, 22 Juni 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JUNAIDI, S.Kom, ME
NIP.19700609 199703 1 002

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : Informasi dan komunikasi Publik

Kegiatan/sub kegiatan: Pelayanan Informasi Publik.

Tangggal Verifikasi : 22 juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	RIFTOMI (Bgpdolitbang).	
2	Desi' Lalumi Dati'	
3	Irnawati	
4		

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR
Lampiran I

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
TAHUN : 2022

PROGRAM	Perencanaan dan Pembangunan Industri
KODE PROGRAM	12.17.07
KEGIATAN	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Data pada tahun 2020 Jumlah IKM di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 2513 IKM yang tersebar menjadi 5 (lima) 7 industri : Industri Sandang dan Kulit 280 IKM, Industri Pangan 1064, Industri Kerajinan 156, Industri Kimia dan Bangunan 913 IKM, Industri Logam dan elektronika 101 IKM. - Pada saat ini masyarakat konsumen sudah mulai cerdas dalam memanfaatkan produk yang dipasarkan atau dikonsumsi. Legalitas produk salah satu parameter mutu produk, misalnya sertifikasi halal, legalitas merk dagang (HKI), izin edar produk (MD/ PIRT), SNI untuk produk berserta serta keterangan nilai gizi yang terdapat pada produk. - Kemudian legalisasi Industri berupa Izin Usaha Industri (IUI) juga dimiliki bagi IKM. Izin Usaha Industri (IUI) diwajibkan untuk menjamin kelestarian IKM tersebut diterima baik secara lingkungan (tidak mencemari lingkungan) serta lokasi yang memenuhi kriteria perencanaan tata ruang dan wilayah - Dari 2.503 IKM tersebut yang memiliki sertifikat halal hanya 37 produk, legalitas merek (HKI) yang sudah terbit dan masih berlaku hanya 1 merek. Sedangkan untuk SNI belum ada produk SNI wajib serta 5 produk berinformasi nilai gizi. - Penerima manfaat produk IKM adalah masyarakat dari semua kalangan baik perempuan, laki-laki, anak-anak, tua dan muda. **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** **a. Faktor Kesenjangan** **Akses :** - Kurangnya informasi tentang halal, Legalitas Merek Dagang (HKI) dan Izin edar bagi Pelaku IKM - Kurangnya pengetahuan pelaku IKM tentang diversifikasi produk potensi daerah **Partisipasi :** - Kurangnya partisipasi pelaku IKM dalam pengurusan Sertifikat Halal, legalisasi merek dagang (HKI) dan Izin edar - Kurangnya partisipasi pelaku IKM dalam pengembangan produk, diversifikasi dan inovasi produk **Kontrol :** - Perlunya pemahaman kepada pelaku IKM terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal, Legalisasi Merk Dagang (HKI) serta Izin Edar guna melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk di pasaran. - Perlunya upgrade wawasan pelaku IKM mengenai pengembangan produk, diversifikasi dan inovasi produk **Manfaat:** Dengan adanya legalitas produk : 1. Sertifikat Halal dan Izin Edar : - Kenyamanan dan keamanan konsumen akan meningkat. - Daya beli masyarakat meningkat. - Omset meningkat - Memperluas market share. 2. Legalitas merek Dagang (HKI) - Mempunyai brand sendiri dan tidak ada yang bisa menyamai dengan brand yang lain. - Merk dan produk bisa dikenal luas oleh masyarakat. - Omset meningkat Dengan adanya pelatihan diversifikasi produk pangan : - Meningkatnya jumlah varian produk yang beredar di pasaran - Omset IKM meningkat - Memperluas segmen pasar dan market share **b. Penyebab Internal** 1. Masih rendahnya alokasi anggaran khususnya untuk pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Halal dan HKI produk IKM 2. Pelaku IKM yang dibina tersebar dan daerahnya luas. 3. Jumlah SDM bidang perindustrian kurang/sedikit untuk memberikan pembinaan dan pengawasan produk IKM 4. Untuk industri kimia dan bahan bangunan tertutu, masalah gender masih diperlonggar

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	c. **Penyebab Eksternal** 1. Jarak tempuh dari lokasi IKM ke lokasi Dinas/Kantor Pengelola legalitas yang jauh 2. Usaha yang dikelola IKM merupakan usaha sampingan sehingga mereka menganggap legalitas usaha tidak terlalu penting 3. Kurangnya informasi akan pentingya legalitas usaha bagi IKM 4. Pimpinan dari IKM lebih sering mengirim pegawainya dalam acara sosialisasi sehingga informasi yang diberikan tidak tepat sasaran 5. Minimnya pelatihan untuk mengupgrade kawasan pelaku IKM dalam diversifikasi produk		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** • Meningkatnya kualitas produk IKM yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan		
	2. Indikator dan Target Kinerja - Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi Halal dan HKI		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah)		
RENCANA AKSI	**Sub Kegiatan 1**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
		Masukan	Rp. 220.000.000.-
		Keluaran	- Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi halal dan HKI
		Hasil	Meningkatnya produk bersertifikat halal dan HKI (30 produk)

Painan, 21 Juni 2021
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. A Z R A L
NIP. 19621231 198602 1 039

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

VERIFIKASI

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2022

OPD : DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri **Kegiatan** Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Undang – Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Berdasarkan data pada tahun 2020 jumlah IKM di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 2.503 IKM yang dibagi menjadi 5 (lima) klasifikasi industri : Industri Sandang dan Kulit 280 IKM, Industri Pangan 1051, Industri Kerajinan 156, Industri Kimia dan Bangunan 913	Akses - Kurangnya informasi tentang halal, Legalitas Merek Dagang (HKI) dan Izin edar bagi Pelaku IKM - Kurangnya pengetahuan pelaku IKM tentang diversifikasi produk potensi daerah Partisipasi - Kurangnya partisipasi pelaku IKM dalam pengurusan	1 Masih rendahnya alokasi anggaran khususnya untuk pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Halal dan HKI produk IKM 2 Pelaku IKM yang dibina tersebar dan daerahnya luas 3 Jumlah SDM bidang perindustrian kurang/sedikit untuk memberikan pembinaan dan pengawasan produk IKM 4 Untuk industri	1 Jarak tempuh dari lokasi IKM ke lokasi Dinas/Kantor Pengelola legalitas yang jauh 2 Usaha yang dikelola IKM merupakan usaha sampingan sehingga mereka menganggap legalitas usaha tidak terlalu penting 3 Kurangnya informasi akan pentingya legalitas usaha bagi IKM 4 Pimpinan dari IKM lebih sering mengirim pegawainya dalam acara sosialisasi	Meningkatnya kualitas dan variasi produk IKM yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan	• Melakukan pembinaan sekaligus pendataan produk-produk yang layak untuk mendapatkan Sertifikat Halal dan HKI (Pendaftaran Merk), Berpotensi mendapatkan Izin edar MD BPOM • Melakukan pembinaan sekaligus pendataan jenis produk baru IKM yang masih bisa dikembangkan dan potensial dari sisi bahan baku mapun kemampuan tenaga kerja	• Data pada tahun 2020 jumlah IKM di Pesisir Selatan berjumlah 2.503 IKM yang dibagi menjadi 5 (lima) klasifikasi industri : Industri Sandang dan Kulit 280 IKM, Industri Pangan 1051, Industri Kerajinan 156, Industri Kimia dan Bangunan 913 IKM, Industri Logam dan elektronika 103 IKM. Pada saat ini masyarakat/ konsumen sudah	• Input : • Jumlah IKM yang dibina • Jumlah IKM yang diawasi • Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi • Jumlah IKM yang dievaluasi untuk pengurusan sertifikasi halal dan HKI • Jumlah IKM yang difasilitasi • Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi produk • Jumlah inovasi/ diversifikasi produk

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

VERIFIKASI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Tujuan Meningkatnya kualitas dan varian produk UMK	IKM Industri Legam dan elektronika 103 IKM Pada saat ini masyarakat/ konsumen sudah mulai cerdas dalam menentukan produk yang digunakan atau dikonsumsi Legalitas produk salah satu penentu mutu produk, misalnya sertifikasi halal, legalitas merk dagang (HKI), izin edar produk (MD/ P-IRT), SNI untuk produk tertentu serta kandungan	Sertifikat Halal, legalisasi merek dagang (HKI) dan Izin edar - Kurangnya partisipasi pelaku IKM dalam pengembangan produk, diversifikasi dan inovasi produk Kontrol - Perlunya pemahaman kepada pelaku IKM terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal, Legalisasi Merk Dagang (HKI) serta Izin Edar guna melindungi konsumen dan	kimia dan bahan bangunan tertentu, masalah gender masih dipertimbangkan	sehingga informasi yang diberikan tidak tepat sasaran 5 Minimnya pelatihan untuk mengupgrade wawasan pelaku IKM dalam diversifikasi produk		- Melakukan pengawasan terhadap pengolahan produk IKM - Melakukan sosialisasi tentang Sertifikat Halal dan Izin edar MD BPOM - Melakukan evaluasi terhadap IKM yang mendapatkan sosialisasi tersebut - Memfasilitasi pengurusan Sertifikat Halal dan HKI	mulai cerdas dalam menentukan produk yang digunakan atau dikonsumsi Legalitas produk salah satu penentu mutu produk, misalnya sertifikasi halal, legalitas merk dagang (HKI), izin edar produk (MD/ P-IRT), SNI untuk produk tertentu serta kandungan nilai gizi yang terdapat pada produk - Kemudian legalisasi Industri berupa Izin Usaha Industri (IUI) juga	Output : - Jumlah IKM yang terbina - Jumlah IKM yang telah diawasi - Jumlah IKM yang telah dilatih diversifikasi produk dan standarisasi industri - Jumlah IKM yang memenuhi kriteria halal, HKI dan MD BPOM - Jumlah inovasi/ diversifikasi produk Outcome Meningkatnya produk bersertifikat halal dan HKI (30 produk) -

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

VERIFIKASI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	nilai gizi yang terdapat pada produk - Kemudian legalisasi Industri berupa Izin Usaha Industri (IUI) juga diuntut bagi IKM Izin Usaha Industri (IUI) diwajibkan untuk menjamin keberadaan IKM tersebut diterima baik secara lingkungan (tidak mencemari lingkungan) serta lokasi yang memenuhi kriteria perencanaan tata ruang dan wilayah - Dari 2.503 IKM tersebut yang	meningkatkan daya saing produk itu sendiri - Perlunya upgrade wawasan pelaku IKM mengenai pengembangan produk, diversifikasi dan inovasi produk Manfaat: - Dengan adanya legalitas produk: 1. Sertifikat Halal dan Izin Edar : - Kenyamanan dan keamanan konsumen akan meningkat - Daya beli masyarakat meningkat - Omset						diuntut bagi IKM Izin Usaha Industri (IUI) diwajibkan untuk menjamin keberadaan IKM tersebut diterima baik secara lingkungan (tidak mencemari lingkungan) serta lokasi yang memenuhi kriteria perencanaan tata ruang dan wilayah - Dari 2.503 IKM tersebut yang memiliki sertifikat halal hanya 37 produk, legalitas merek (HKI) yang sudah terbit dan masih berlaku hanya 1 merek	

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kegiatan/ Program/Kegiatan	Data Pendukung Wawancara	RISIKO			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kemungkinan	Sebab Kemungkinan Internal	Sebab Kemungkinan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base Line)	Indikator Kinerja
	[illegible]	[illegible]					Sedangkan untuk SNI belum ada produk SNI wajib serta 1 produk berstifikasi halal gan Pemerima manfaat produk IKM adalah masyarakat dan semua kalangan baik perempuan, laki-laki, anak-anak tua dan muda	

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

VERIFIKASI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
		produk yang beredar di pasaran 2 Omset IKM meningkat 3 Memperluas segmen pasar dan market share						

Painan,21 Juni 2021
Kepala Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. AZRAL
NIP 19621231 198602 1 039

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan/sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sarana dan prasarana Industri

Tangggal Verifikasi : 21 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	RIFTOMI (Bappeda Litbang).	
3	Dwi' Lalumi Sarti (Dinas PPPA)	
4	Irnawati (BPKAD)	

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KEGIATAN : PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI

Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

PROGRAM	
KODE PROGRAM	1.02.01.1.02.01.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Kurangnya instruktur pelatihan yang ada karena telah banyak yang pensiun b. Peralatan pelatihan masih memakai peralatan yang lama. c. Tidak adanya asrama untuk siswa d. Rata- rata instruktur yang ada belum menguasai teknologi IT
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** 1. Perlunya penambahan instruktur pelatihan yang PNS. 2. Penambahan peralatan pelatihan. 3. Perlunya pembangunan Asrama Siswa pelatihan. 4. Instruktur yang ada harus mengikuti kursus pelatihan IT **b. Penyebab Internal** 1. Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi. 2. Kurangnya kemauan instruktur untuk menambah wawasan. 3. Kondisi peralatan pelatihan yang sudah tidak memadai **c. Penyebab Eksternal** 1. Belum adanya asrama untuk peserta pelatihan sehingga menyulitkan bagi peserta yang berlokasi jauh dari BLK 2. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan pelatihan
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** a. Terpenuhinya peralatan pelatihan di setiap jurusan b. Tersedianya asrama siswa yang representatif c. Terpenuhinya instruktur pelatihan yang menguasai teknologi IT.
	2. Indikator dan Target Kinerja a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c. Pembangunan sarana prasarana gedung kantor
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**

Masukan	Rp. 3.376.807.160,-
Keluaran	1. Terlatihnya tenaga pencari kerja sebanyak 750 orang 2. Tersedianya asrama siswa yang representatif

Dipindai dengan CamScanner

			3. Tersedianya instruktur pelatihan yang menguasai teknologi IT.
		Hasil	1. meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pencari kerja 2. Tersedianya asrama siswa yang reperesentatif 3. Terpenuhinya instruktur pelatihan yang menguasai teknologi IT

Painan, 29 Juni 2021

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan

SIRDIN MASRUL, SH. M.Si
NIP. 19671212 198903 1011

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. **Kegiatan** : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi **Sub Kegiatan** : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	1. Undang-undang No 13 tentang ketenagajaan 2. Jumlah Instruktur pelatihan yang ada 6 (enam) orang, kekurangan instruktur 18 orang. 3. Peralatan pelatihan masih memakai peralatan yang lama. Peralatan pelatihan jurusan pembangunan yang rusak (ketam tangan besi panjang, ketan tangan besi pendek, ketam tangan bes menengah, ketam tangan besi pelides, pahat	**Akses :** Masih kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan yang ada. **Partisipasi :** Masih banyaknya masyarakat laki-laki dan perempuan yang	1. Ketersediaan anggaran yang belum mencukup 2. Kurangnya kemauan atau kesadaran instruktur untuk menambah wawasan. 3. Kurangnya instruktur pelatihan yang ada	1. Belum adanya asrama untuk peserta pelatihan sehingga menyulitkan bagi peserta yang berlokasi jauh dari BLK 2. Tidak tersedianya sarana dan	Tersediany a pencari kerja (Calon Tenaga Kerja yang terlatih)	1. Koordinasi dengan PEMDA tentang kurangnya instruktur pelatihan yang PNS. 2. Koordinasi dengan Kementrian Tenaga kerja dan PEMDA 3. Koordinasi dengan	1. Jumlah Instruktur pelatihan yang ada 6 (enam) orang, kekurangan instruktur 18 orang. 5. Peralatan pelatihan masih peralatan yang lama. Peralatan pelatihan jurusan pembangunan yang rusak (ketam tangan besi panjang, ketan tangan besi pendek, ketam	Input : Rp. 3.376.807.160 Outcome : Terlatihnya tenaga pencari kerja sebanyak 750 orang Output :meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pencari kerja

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
berdaserkan Klaster Kompetensi Tujuan : Tersedianya pencari kerja (Calon Tenaga Kerja yang terlatih)	tangan cembung, speed cat wagum, mesin bubut kayu, mesin bor duduk, mesin gesrindra biasa, mesin gerinda/ knife gerinden) **peralatan pelatihan jurusan otomotif** ysng rusak (sprak plug gap, torque wrench handle, kotak pekakas,offset wrench, socket wrench, ratchet handle, kunci busi, adjustable wrench12, combination plier, water pump plier, pipe wrech, pound trough screw driver) **peralatan pelatihan jurusan bubut dan las** kurang baik (mesin bubut, mesin bor, mesin skrup, mesin pemotong plat, mesin gergaji, pompa air, mesin las, maximat, mesin fres, mesin ulir pipa, mesin tempa, ragum)	membutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi kencari kerja. **Kontrol :** 1. Masih kurangnya pemantauan terhadap peserta pelatihan yang sudah diberikan 2. Perlunya penambahan instruktur pelatihan yang PNS. 3. Penambahan peralatan pelatihan.	karena telah banyak yang pensiun. 4. Kondisi peralatan pelatihan yang sudah tidak memadai 3. Minimnya instruktur yang PNS.	prasarana yang mendukung untuk pelaksanaa n pelatihan. 3. Jumlah peserta pelatihan terbatas		Kementrian Tenaga Kerja dan PEMDA. 5. Mengusulkan penambahan instruktur bagi instruktur kejuruan yang telah pensiun dan kejuruan yang belum ada instrukturnya 6. Mengusulkan ke Kementrian Tenaga Kerja dan PEMDA pengadaan peralatan pelatihan baru. 7. Mengusulkan	tangan bes menengah, ketam tangan besi pelides, pahat tangan cembung, speed cat wagum, mesin bubut kayu, mesin bor duduk, mesin gesrindra biasa, mesin gerinda/ knife gerinden) **peralatan pelatihan jurusan otomotif** ysng rusak (sprak plug gap, torque wrench handle, kotak pekakas,offset wrench, socket wrench, ratchet handle, kunci busi, adjustable wrench12,	1.Terpenuhinya peralatan pelatihan di setiap jurusan. 2.Tersedianya asrama siswa yang representatif 3. Terpenuhinya instruktur pelatihan yang menguasai teknologi IT

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	4. Tidak adanya asrama untuk siswa untuk pelatihan. 3. Rata-rata instruktur yang ada belum menguasai teknologi IT. 4. Pelatihan yang sudah dilakukan pada tahun 2020 pelatihan pengelasan smaw 3G (jumlah peserta pelatihan laki-laki sebanyak 16 orang), pelatihan asisten pembuat pakaian (jumlah peserta pelatihan perempuan sebanyak 16 orang), pelatihan pembuatan roti dan kue (jumlah peserta pelatihan perempuan sebanyak 16 orang), pelatihan pemeliharaan berkala kendaraan ringan (jumlah	4. Perlunya pembangunan Asrama Siswa pelatihan. 5. Instruktur yang ada harus mengikuti kursus pelatihan IT				pembangunan a srama siswa. 8. melaksanakan sosialisasi pelatihan disetiap kecamatan/naga ri di kabupaten pesisir selatan 9. melakukan pelatihan untuk tenaga kerja sebanyak 750 dari 15 kecamatan 10. melaksanakan evaluasi pelatihan di	combination plier, water pump plier, pipe wrech, pound trough screw driver) peralatan pelatihan jurusan bubut dan las kurang baik (mesin bubut, mesin bor, mesin skrup, mesin pemotong plat, mesin gergaji, pompa air, mesin las, maximat, mesin fres, mesin ulir pipa, mesin tempa, ragum) 2. Tidak adanya asrama untuk siswa untuk pelatihan.	

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	peserta platihan laki-laki sebanyak 16 orang), pelatihan pemasangan listrik bangunan sederhana (jumlah peseerta pelatian laki-laki sebnyak 16 orang pelatihan pembuatan masker (jumlah peserta pelatihan perempuan sebnyak 31 orang dan laki-laki sebanyak 1 orang). 5. Jumlah tenaga kerja teriatih tahun 2020 sebanyak 128 orang, laki sebanyak 65 orang dan perempuan sebanyak 63 orang 6. Jumlah pencari kerja tahun 2020 sebanyak 1867 orang, laki-laki					nagari tersebut 11. Pengadakan sarana dan prasarana tentang Teknologi IT untuk intruktur 12. Pengadaan peralatan untuk sarana dan prasarana pelatihan	7. Pelatihan yang sudah dilakukan pada tahun 2020 pelatihan pengelasan smaw 3G, pelatihan asisten pembuat pakaian, pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan pemeliharaan berkala kendaraan ringan, pelatihan pemasangan listrik bangunan sederhana, pelatihan pembuatan masker. 8. Jumlah peserta pelatihan tahun	

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
	sebanyak 826 orangdan perempuan sebanyak 1041 orang.						2020 sebanyak 128 orang, laki sebanyak 65 orang dan perempuan sebanyak 63 orang	

Painan, 29 Juni 2021
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan

SIRDIN MASRUL, SH. M.Si
NIP. 19671212 198903 1011

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan/sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.

Tangggal Verifikasi : 22 juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Irnawati	
2	Dwi Lalumidarti (Dinas PPPA)	
3	RIFTONI (Bpp.Ut.Ahli)	
4		

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
KODE PROGRAM	1.04.04
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** Jumlah rumah tahun 2017 sebanyak 107.469 dari 182 Nagari di kabupaten Pesisir Selatan. Adapun rumah layak 113.778 rumah dan tidak layak 6.309 rumah Tahun 2018 Jumlah rumah menjadi 114.188 rumah, adapun yang layak 110.095 rumah dan tidak layak 4.093 Rumah. Pada tahun 2019 jumlah rumah meningkat 114.238.Sedangkan rumah tidak layak huni 2.467 Unit. Adapun rumah layak huni menjadi 111.771 rumah Pada Tahun 2020 jumlah rumah 114.308 Unit. Penanganan RTLH Tahun 2020 adalah sebanyak 2.309 Unit. Jumlah rumah tidak layak huni yang sudah direhap dari tahun 2017-2020 sebanyak 7.937 unit rumah. Data TNP2K Tahun 2016 Jumlah RTLH adalah 6.387 Unit. Sedangkan total penanganan adlah 7.937 Unit. Berarti sudah melebihi target dan data sebanyak 1.552 Unit. . Dasar hukum kegiatan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: • **Aspek Akses:** Tidak semua rumah tidak layak huni bisa direhabilitasi. Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas. • **Aspek Partisipasi:** Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan primer dan sekunder nya. • **Aspek Kontrol:** kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap pelaksanaan rumah layak huni • **Aspek Manfaat:** Karna bantuan rumah tidak layak huni masih bersifat stimulan (ransangan) dan masyarakat harus menyediakan dana tambahan untuk menyelesaikan pembangunan rumah **b. Penyebab Internal** • keterbatasan anggaran. • Dinas belum memiliki data base yang valid jumlah rumah tidak layak huni • Masih kurangnya pemahaman wali nagari tentang kriteria rumah tidak layak huni yang berpengaruh terhadap data **c. Penyebab Eksternal** • Masih banyaknya data-data rumah tidak layak huni yang belum divalidasi • Lahan yang digunakan untuk pembangunan RTLH belum bebas atau belum dihibahkan
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Terwujudnya Rumah Layak Huni di kab. Pesisir Selatan
	2. Indikator dan Target Kinerja • **Kegiatan 1:** Perbaikan Rumah Tidak Layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Input :** Rp. 9.484.879.890,- **Output:** Tersedianya pembangunan Rumah tidak layak huni dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Dipindai dengan CamScanner

	Outcome: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah • **Kegiatan 2:** Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Input :** Rp. 165.501.820,- **Output:** Tersedianya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Outcome:** Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 9.650.381.710,-**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Perbaikan Rumah Tidak Layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
		Masukan	Rp.9.484.879.890,-
		Keluaran	Tersedianya pembangunan Rumah tidak layak huni dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni
		Hasil	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah
	Kegiatan 2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
		Masukan	Rp. 165.501.820,-
		Keluaran	Tersedianya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Hasil	Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM	**PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**
KODE PROGRAM	**1.04.05**
ANALISA SITUASI	**3. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** Berdasarkan proposal dari wali nagari masih ada data masyarakat yang belum memilik jamban. Data yang masuk dari wali nagari sebanyak 3.252 unit. Data Masyarakat yang belum memiliki Sambungan Listrik sebanyak 2.896 Unit Penanganan Sanitasi Tahun 2017 – 2020 : 1.626 Unit Penanganan Sambungan Listrik 2017 – 2020 sebanyak 1.417 Unit **4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** **d. Faktor Kesenjangan** Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: • **Aspek Akses:** Tidak semua rumah masyarakat bisa dibantu sanitasi layak dan sambungan listrik. Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas.. • **Aspek Partisipasi:** Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan primer dan sekunder nya. • **Aspek Kontrol:** kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap pelaksanaan Sanitasi layak • **Aspek Manfaat:** Bantuan bisa langsung dimanfaatkan dan difungsikan oleh masyarakat. **e. Penyebab Internal** • keterbatasan anggaran. • Dinas belum memiliki data base yang valid jumlah Masyarakat yang belum memiliki sanitasi layak dan sambungan listrik. • Masih kurangnya pemahaman wali nagari tentang kriteria masyarakat penerima bantuan adalah masyrakat berpenghasilan rendah **f. Penyebab Eksternal** • Masih banyaknya data-data rumah yang belum divalidasi • Lahan yang digunakan untuk pembangunan Sanitasi Layak yang belum bebas atau belum dihibahkan
CAPAIAN PROGRAM	**3. Tolak Ukur** Terwujudnya Rumah Bersanitasi Layak dan Memiliki Sambungan Listrik di kab. Pesisir Selatan **4. Indikator dan Target Kinerja** • **Kegiatan 1:** Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian **Input :** Rp. 2.073.281.740,- **Output:** Tersedianya PSU Perumahan untuk meningkatkan fungsi hunian **Outcome:** Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak • **Kegiatan 2:** Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian **Input :** Rp. 2.073.281.740,- **Output:** Tersedianya PSU Perumahan untuk meningkatkan fungsi hunian **Outcome:** Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak

Dipindai dengan CamScanner

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 2.073.281.740,-**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	
		Masukan	Rp.2.073.281.740,-
		Keluaran	Tersedianya PSU Perumahan untuk meningkatkan fungsi hunian
		Hasil	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak
	Kegiatan 2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	
		Masukan	Rp 39..999.980,-
		Keluaran	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
		Hasil	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak

Painan 21 Juni 2021

Kepala OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. PESISIR SELATAN,

WIJKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Verifikasi

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh **Kegiatan:** Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan:** Perbaikan Rumah Tidak Layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	• Jumlah total rumah di Kab. Pesisir Selatan sampai kondisi Tahun 2019 adalah 114.238 rumah. Adapun jumlah rumah berdasarkan kondisi layak/tidak layak yaitu: Layak (111.771 rumah) dan Tidak Layak (2.467 rumah). • Jumlah rumah tidak layak huni yang sudah direhap dari tahun 2017-2019 sebanyak 4.960 unit rumah	Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: a. **Aspek Akses:** Tidak semua rumah tidak layak huni bisa direhabilitasi. Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas. b. **Aspek Partisipasi:** Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menentukan skala prioritas	keterbatasan anggaran. Dinas belum memiliki data base yang valid jumlah rumah tidak layak huni Masih kurangnya pemahaman wali nagari tentang kriteria rumah tidak layak huni yang berpengaruh terhadap data	Masih banyaknya data-data rumah tidak layak huni yang belum divalidasi Lahan yang digunakan untuk pembangunan RTLH belum bebas atau belum dihibahkan	Terwujudnya Rumah Layak Huni di kab. Pesisir Selatan	• Pendataan dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni • Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni • Melalukan Evaluasi terhadap tenaga pendamping RTLH	Jumlah rumah tahun 2017 sebanyak 107.469 dari 182 Nagari di kabupaten Pesisir Selatan. Adapun rumah layak 113.778 rumah dan tidak layak 6.309 rumah Tahun 2018 Jumlah rumah menjadi 114.188 rumah, adapun yang layak 110.095 rumah dan tidak layak 4.093 Rumah. Pada tahun 2019 jumlah rumah meningkat 114.238 sedangkan jumlah	• **Kegiatan 1:** Perbaikan Rumah Tidak Layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Input :** Rp. 9.484.879.890,- **Output:** Tersedianya pembangunan

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Sub Kegiatan:** Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Tujuan:** Terwujudnya Rumah Layak Huni di kab. Pesisir Selatan	• Sasaran jumlah rumah yang tidak layak huni yang akan direhap sebanyak 2.467 unit rumah • Dasar hukum kegiatan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah	kebutuhan primer dan sekunder nya. c. **Aspek Kontrol:** kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap pelaksanaan rumah layak huni d. **Aspek Manfaat:** Karna bantuan rumah tidak layak huni masih bersifat stimulan (ransangan) dan masyarakat harus menyediakan dana tambahan untuk menyelesaikan pembangunan rumah					RTLH adalah 2.467 unit, adapun rumah layak huni menjadi 111.771 Unit Tahun 2020 Jumlah Rumah 114.308, penagangan RTLH Tahun 2020 sebanyak 2.309 unit. • Jumlah rumah tidak layak huni yang sudah direhap dari tahun 2017-2020 sebanyak 7.937 unit rumah Secara penanganan dan target penanganan berdasarkan data TNP2K Tahun 2016 Jumlah RTLH adalah 6.387 Unit. Jadi total penanganan sudah melbihin 1.552. unit.	Rumah tidak layak huni dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni **Outcome:** Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah • **Kegiatan 2 :** Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Input :** Rp. 165.501.820,-

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
								Output: Tersedianya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Outcome:** Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program: Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) **Kegiatan:** Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan **Sub Kegiatan:** Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian **Sub Kegiatan:** Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	• Masih banyak rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sanitasi layak • Masih banyak rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sambungan listrik dan masih menumpang sambungan ke tetangga • Dasar hukum kegiatan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah	Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: a. **Aspek Akses:** Tidak semua rumah masyarakat bias dibantu sanitasi layak dan sambungan listrik. Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas. b. **Aspek Partisipasi:** Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan primer dan sekunder nya. c. **Aspek Kontrol:** kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap	keterbatasan anggaran. Dinas belum memiliki data base yang valid jumlah Masyarakat yang belum memiliki sanitasi layak dan sambungan listrik Masih kurangnya pemahaman wali nagari tentang kriteria masyarakat penerima bantuan adalah masyrakat berpenghasilan rendah	Masih banyaknya data-data rumah yang belum divalidasi Lahan yang digunakan untuk pembangunan Sanitasi Layak yang belum bebas atau belum dihibahkan	Terwujudnya Rumah Bersanitasi Layak dan Memiliki Sambungan Listrik di kab. Pesisir Selatan,	• Pendataan dan Validasi Data Sanitasi Layak dan Sambungan Listrik • Sambungan Listrik Untuk Masyarakat Berenghasilan Rendah • Melakukan Evaluasi terhadap Hasil Kegiatan	• Berdasarkan proposal dari wali nagari masih ada data masyarakat yang belum memilik jamban. Data yang masuk dari wali nagari sebanyak 3.252 unit • Data Masyarakat yang belum memiliki Sambungan Listrik sebanyak 2.896 Unit • Penanganan Sanitasi Tahun 2017 – 2020 : 1.626 Unit • Penanganan Sambungan Listrik 2017 – 2020 sebanyak 1.417 Unit	• **Kegiatan 1 :** Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian **Input :** Rp 2.033.281.760,- **Output:** Tersedianya PSU Perumahan untuk meningkatkan fungsi hunian **Outcome:** Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Tujuan: Terwujudnya Rumah Bersanitasi Layak dan Memiliki Sambungan Listrik di kab. Pesisir Selatan,		pelaksanaan Sanitasi layak d. **Aspek Manfaat:** Bantuan bisa langsung dimanfaatkan dan difungsikan oleh masyarakat.						di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak • **Kegiatan 2 :** Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan **Input :** Rp 39..999.980,- **Output:** Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
								Outcome: Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak

Painan 21 Juni 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. PESISIR SELATAN

MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Program : Perumahan dan kawasan Permukiman kumuh.

Kegiatan/Sub kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh & Berkembangnya Permukiman kumuh diluar kawasan

Tangggal Verifikasi : Permukiman kumuh dgn luas dibawah 10 (sepuluh) Ha.
21 juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	[illegible]	
2	Riftomi (Bgs. Adbitbag).	
3	Dsn' Ldumi Sarh (Dinas PUPR)	
4	Irnawati	

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : RSUD Dr. Muhammad ZeinPainan

TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
SUBKEGIATAN	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan
PEKERJAAN	Pembangunan Drainase RS
KODE PROGRAM	
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat manusia. Dalam bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong – gorong dibawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir. - Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. (Dr. Ir. Suripin, M.Eng.2004) - drainase kota pada dasarnya telah diatur dalam SK menteri PU No. 233 tahun 1987. Menurut SK tersebut, yang dimaksud drainase kota adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai melintas di dalam kota - Debit air hujan atau debit limpasan adalah apabila intensitas hujan yang jatuh di suatu Daerah Aliran Sungai melebihi kapasitas infiltrasi, setelah laju infiltrasi terpenuhi air akan mengisi cekungan – cekungan pada permukaan tanah. Setelah cekungan – cekungan tersebut penuh, selanjutnya air akan mengalir diatas permukaan tanah. - Banyaknya debit air hujan yang ada dalam suatu kawasan harus segera di alirkan agar tidak menimbulkan genangan air. Untuk dapat mengalirkannya diperlukan saluran yang dapat menampung dan mengalirkan air tesebut ke tempat penampungan. Penampungan tersebut dapat berupa sungai atau kolam retensi. Kapasitas pengaliran dari saluran tergantung pada bentuk, kemiringan dan kekasaran saluran. Sehingga penentuan kapasitas tampung harus berdasarkan atas besarnya debit air hujan - Drainase memiliki peran yang sangat penting di kawasan berpenghuni. Sistem drainase yang baik membantu mencegah banyak persoalan, seperti mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air tanah, erosi tanah dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan yang ada - Intensitas air hujan yang turun di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tidak bisa ditampung oleh drainase RSUD dan tidak bisa disalurkan ke Drainase yang ada di luar RSUD

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	- Apabila hujan deras sekitar 1 atau 2 jam, maka RSUD di bagian-bagian tertentu terjadi genangan air karena tidak adanya saluran yang memadai - Jumlah kunjungan pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah : IGD : 8.457orang Rawat jalan : 86.336 orang Rawat inap : 7.716 orang - Data Sarana dan prasarana RSUD Dr.M Zein Painan berdasarkan data ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan) terpenuhi sebanyak 64,64 % - Jumlah SDM RSUD Dr. M. Zein Painan tahun 2020 : 688 orang Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan di tahun 2020 adalah 356 orang
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** **Akses:** - Tidak semua bagian atau ruangan memliliki saluran pembuangan air hujan yang memadai sesuai dengan standar **Partisipasi:** - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan **Control :** - Sudah adanya bagian yang bertugas untuk penyehatan lingkungan, akan tetapi masih belum maksimal dikarenakan prasarana drainase yang belum memadai **Manfaat :** - Masyarakat dan RS belum maksimal merasakan manfaat dari drainase **b. Penyebab Internal** - Kurangnya sarana dan prasarana menanggulangi masalah banjir di RSUD DR. M. Zein Painan - Padatnya bangunan RSUD yang membuat tempat penyaluran air hujan tidak memadai **c. Penyebab Eksternal** - Pengetahuan masyarakat yg kurang tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Terwujudnya pembangunan drainase RSUD sesuai standar
	2. Indikator dan Target Kinerja
	Output : Terwujudnya pembangunan drainase RSUD Dr. M. Zein Painan

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan baik tanpa adanya gangguan banjir diakibatkan tidak adanya saluran pembuangan air yang memadai	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 500.000.000,-	
SUMBER DANA	DAU	
RENCANA AKSI RENCANA AKSI	Kegiatan	Pembangunan Drainase RSUD

Painan, 25 Juni 2021

Direktur,

dr. H. SUTARMAN, MM

NIP. 196907092001121002

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : RSUD Dr. Muhammad ZeinPainan

TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	Upaya Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SUBKEGIATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
KODE PROGRAM	
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Pada tahun 2015 kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat diterapkan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan - serapan dana pada program ini berkaitan dengan 1. Pasien tidak dikenal, 2. Pasien pada saat acara kegiatan/event pemerintah Daerah, Kasus Luar Biasa (KLB), Gizi buruk dan lain-lain 3. Pasien yang tidak memiliki asuransi kesehatan 4. Pemeriksaan Napza yang diminta oleh pihak kepolisian 5. Visum dengan korban kekerasan pada perempuan dan anak 6. Pasien tidak mampu dan makan 1 (satu) orang penunggu pasien yang bermasalah - Masyarakat yang mendapat dana bantuan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mendapat hak yang sama - Jumlah kunjungan pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2020 adalah : IGD : 8.457 Rawat jalan : 86.336 Rawat inap : 7.716 - Jumlah kunjungan pasien yang mendapatkan bantuan dengan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat tahun 2020 berjumlah : 274 orang - Data Sarana dan prasarana RSUD Dr.M Zein Painan berdasarkan data ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan) terpenuhi sebanyak 64,64% - Jumlah SDM RSUD Dr. M. Zein Painan tahun 2020 : 688 orang Jumlah SDM yang telah mendapatkan pelatihan : 356 orang. **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** **a. Faktor Kesenjangan** **Akses ;** - Tidak semua pasien bisa terlayani **Partisipasi :** - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurus

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	jaminan kesehatan	
	Kontrol : -Pasien yang mendapatkan dana pasien bermasalah adalah pasien yang terdata di Basis Data Terpadu -Ada Surat Keputusan Direktur yang mengatur pemakaian dana ini **Manfaat :** -Belum semua masyarakat mendapat bantuan dana Pasien bermasalah ini	
	b. Penyebab Internal - Kurangnya data-data tentang pasien miskin - Belum memanfaatkan data-data dinas Sosial secara intens - Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangnya SDM terlatih **c. Penyebab Eksternal** - Tidak ada nya biaya untuk mengurus jaminan kesehatan - Pengetahuan masyarakat yg kurang tentang pentingnya mengurus jaminan kesehatan - Akses untuk mengurus jaminan kesehatan yang terlalu jauh	
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Meningkatkan jumlah penerima dana pasien bermasalah	
	2. Indikator dan Target Kinerja Output : Terwujudnya pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dan pasien bermasalah Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dan pasien bermasalah	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp 600.000.000,-**	
RENCANA AKSI RENCANA AKSI	**Kegiatan**	Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Painan, 25 Juni 2021
Direktur,

dr. H. SUTARMAN, MM
NIP. 196907092001121002

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : RSUD Dr. Muhammad ZeinPainan

TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
SUBKEGIATAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
PEKERJAAN	rehab ruangan IGD PONEK
KODE PROGRAM	
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Instalasi Gawat Darurat RS merupakan salah satu instalasi yang memberi penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit. IGD adalah salah satu unit pelayanan di Rumah Sakit yang menyediakan penanganan awal (bagi pasien yang datang langsung ke rumah sakit)/lanjutan (bagi pasien rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan lain), menderita sakit ataupun cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya (Permenkes RI No. 47 tahun 2018) - IGD memiliki tujuan utama diantaranya adalah menerima, melakukan triage, menstabilisasi, dan memberikan pelayanan kesehatan akut untuk pasien, termasuk pasien yang membutuhkan resusitasi dan pasien dengan tingkat kegawatan tertentu (Australasian Collage for Emergency Medicine, 2014). - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Muhammad Zein Painan, adalah salah satu institusi kesehatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang didirikan pada tahun 1930 dengan nama Rumah Sakit Pembantu yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Mulai beroperasi pada tahun tersebut dengan beberapa orang tenaga perawat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi penderita asma, TBC dan malaria, karena pada saat itu pada umumnya masyarakat Pesisir Selatan cenderung menderita penyakit tersebut. Setelah Indonesia merdeka Rumah Sakit ini diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan dengan demikian maka seluruh pendanaan Rumah Sakit dibantu oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dengan status RSU tipe D. Sejalan dengan perkembangan pembangunan di bidang kesehatan, maka pada tahun 1970-an Rumah Sakit ini sudah dilengkapi dengan tenaga medis, keperawatan, non keperawatan, dan non medis serta alat-alat penunjang lainnya. - Berdasarkan SK Menkes RI No. 51/Menkes/Sk/I/79 tanggal 2 Februari 1979, sebagai Rumah Sakit Kelas D dengan kepemilikan PemdaTk.I. Dengan Keputusan Menkes tanggal 15 Desember 1993 Nomor 1154/Menkes/SK/XII/1993 menjadi kelas C milikPemda Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan dengan tempat tidur sebanyak 53 buah. Nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan diangkat dari nama seorang dokter pertama dan putera daerah Pesisir Selatan yang lahir di Bayang. Beliau menjadi dokter pada tahun 1940-an ditengah – tengah zaman penjajahan Belanda dimana pada masa itu tenaga medis dan para medis sangat terbatas sedangkan jumlah penduduk yang mempunyai masalah kesehatan cukup banyak di Pesisir Selatan, sehingga kehadiran beliau sebagai seorang dokter dirasakan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Pesisir Selatan pada saat itu. Untuk saat ini RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 180 tempat tidur.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit dalam lokus penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Kondisi sekarang IGD bergabung antara IGD biasa dan IGD PONEK. Untuk IGD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan hanya memiliki 2 bed (tempat tidur) untuk pasien kebidanan, dan IGD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sangat kecil sekali yang hanya bisa menampung sekita 8 (delapan) orang pasien umum sehingga diperlukan juga perluasan IGD. Dan untuk ruangan rawat inap kebidanan sendiri masih terpisah antara ruangan VK dan ruangan bangsalnya sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penggabungan antara IGD PONEK dengan ruangan VK dan ruang bersalin kebidanan. Hal ini bertujuan untuk menfokuskan pemberian pelayanan yang optimal terhadap pasien kebidanan dalam penurunan AKI dan AKB.

- Jumlah kunjungan pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah :
  IGD 2016 : 19.165 orang
  IGD 2017 : 15.003 orang
  IGD 2018 : 15.498 orang
  IGD 2019 : 13.831 orang
  IGD 2020 : 8.457orang

- Data Sarana dan prasarana RSUD Dr.M Zein Painan berdasarkan data ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan) terpenuhi sebanyak 64,64 %

- Jumlah SDM RSUD Dr. M. Zein Painan tahun 2020 : 688 orang
  Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan di tahun 2020 adalah 356 orang

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan

Akses:

- Ruangan IGD untuk pelayanan kebidanan belum sesuai dengan standar.

Partisipasi:

- Kurangnya lahan untuk pengembangan rumah sakit, sehingga membuat terhambatnya pembangunan dan pengembangan RS

Control :

- Sudah adanya bagian/petugas untuk menangani pasien dengan kasus gawat darurat, akan tetapi belum maksimal karena sarana dan prasarana belum memadai.

Manfaat :

- Masyarakat belum maksimal merasakan kenyamanan dalam pelayanan di IGD khususnya untuk pelayanan kebidanan di IGD.

b. Penyebab Internal

- Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan pasien di IGD khususnya pasien dengan kasus kebidanan

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	c. **Penyebab Eksternal** - Kurangnya lahan untuk pengembangan RS khususnya untuk pengembangan IGD RS	
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Terwujudnya rehab ruangan IGD PONEK	
	2. Indikator dan Target Kinerja Output : Terwujudnya rehab ruangan IGD PONEK Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan baik karena terpenuhinya sarana dan prasarana terkait penanganan kasus kebidanan di IGD	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp 2.200.000.000,-**	
SUMBER ANGGARAN	**DAK Tahun 2022**	
RENCANA AKSI RENCANA AKSI	**Kegiatan**	Rehab Ruangan IGD PONEK

Painan, 25 Juni 2021
Direktur,

dr. H. SUTARMAN. MM
NIP. 196907092001121002

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

KEGIATAN : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan

Pekerjaan : Pembangunan Drainase RS

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat **Kegiatan :** Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	- Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat manusia. Dalam bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong – gorong dibawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir.	**Akses:** - Tidak semua bagian atau ruangan memiliki saluran pembuangan air hujan yang memadai sesuai dengan standar **Partisipasi:** - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, dan membuang sampah sembarangan **Control :** Sudah adanya bagian yang bertugas untuk penyehatan lingkungan, akan	- Kurangnya sarana dan prasarana menanggulangi masalah banjir di RSUD DR. M. Zein Painan - Padatnya bangunan RSUD yang membuat tempat penyaluran air hujan tidak memadai	- Pengetahuan masyarakat yg kurang tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan	Terwujudnya pembangunan drainase RSUD sesuai standar	- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait tentang pembuatan Drainase RSUD DR. M. Zein Painan - Mengajukan usulan proposal untuk pengadaan sarana dan prasarana menanggulangi banjir yang terjadi di RSUD Dr. M. Zein Painan	- Sering terjadinya banjir apabila hujan turun sekitar 1 – 2 jam - Drainase tidak memadai	- Output : Terlaksanya pembangunan drainase RSUD sesuai standar - Outcome : Terwujudnya pembangunan drainase RSUD sesuai standar

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Pekerjaan : Pembangunan Drainase RSUD **Tujuan :** Terwujudnya Pembangunan Drainase RSUD	- Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. (Dr. Ir. Suripin, M.Eng.2004) - drainase kota pada dasarnya telah diatur dalam SK menteri PU No. 233 tahun 1987. Menurut SK tersebut, yang dimaksud drainase kota adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari hujan	tetapi masih belum maksimal dikarenakan prasarana drainase yang belum memadai **Manfaat :** - Masyarakat dan RS belum maksimal merasakan manfaat dari drainase						

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	lokal maupun luapan sungai melintas di dalam kota - Debit air hujan atau debit limpasan adalah apabila intensitas hujan yang jatuh di suatu Daerah Aliran Sungai melebihi kapasitas infiltrasi, setelah laju infiltrasi terpenuhi air akan mengisi cekungan – cekungan pada permukaan tanah. Setelah cekungan – cekungan tersebut penuh, selanjutnya air akan mengalir diatas permukaan tanah. - Banyaknya debit air hujan yang ada dalam suatu kawasan harus							

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	segera di alirkan agar tidak menimbulkan genangan air. Untuk dapat mengalirkannya diperlukan saluran yang dapat menampung dan mengalirkan air tesebut ke tempat penampungan. Penampungan tersebut dapat berupa sungai atau kolam retensi. Kapasitas pengaliran dari saluran tergantung pada bentuk, kemiringan dan kekasaran saluran. Sehingga penentuan kapasitas tamping harus berdasarkan atas besarnya debit air hujan - Drainase memiliki							

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	peran yang sangat penting di kawasan berpenghuni. Sistem drainase yang baik membantu mencegah banyak persoalan, seperti mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air tanah, erosi tanahm dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan yang ada - Intensitas air hujan yang turun di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tidak bisa ditampung oleh drainase RSUD dan tidak bisa disalurkan ke							

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Drainase yang ada di luar RSUD - Apabila hujan deras sekitar 1 atau 2 jam, maka RSUD di bagian-bagian tertentu terjadi genangan air karena tidak adanya saluran yang memadai - Jumlah kunjungan pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah : IGD : 8.457 Rawat jalan : 86.336 Rawat inap : 7.716 - Data Sarana dan prasarana RSUD Dr.M Zein Painan berdasarkan data ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan) terpenuhi sebanyak							

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	64,64 % • Jumlah SDM RSUD Dr. M. Zein Painan tahun 2020 : 688 orang • Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan di tahun 2020 adalah 356 orang							

Painan, 25 Juni 2021
Direktur,

dr. H. SUTARMAN, MM
NIP. 196907092001121002

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : RSUD Dr. Muhammad ZeinPainan

PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

SUBKEGIATAN : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Pada tahun 2015 kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat diterapkan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan - serapan dana pada program ini berkaitan dengan 1. Pasien tidak dikenal, 2. Pasien pada saat acara kegiatan/event pemerintah Daerah, Kasus Luar Biasa	Akses: - Tidak semua pasien bisa terlayani karena ada surat keputusan yang mengatur serapan dananya. Partisipasi: - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurus jaminan kesehatan Control: - Pasien yang mendapatkan dana pasien bermasalah adalah pasien yang terdata di Basis Data Terpadu	- Kurangnya data-data tentang pasien miskin - Belum memanfaatkan data-data dinas Sosial secara intens - Kurangnya sarana dan prasarana	- Tidak ada nya biaya untuk mengurus jaminan kesehatan - Pengetahuan masyarakat yg kurang tentang pentingnya mengurus jaminan kesehatan - Akses untuk mengurus jaminan kesehatan yang terlalu jauh	Terwujudnya pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dan pasien bermasalah	- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait - Mengajukan usulan proposal untuk pengadaan sarana dan prasarana	- Meningkatnya jumlah pasien miskin dan pasien bermasalah yang dilayani 2017 : 101 2018 : 215 2019 : 292 2020 : 274 - Data Survey kepuasan Masyarakat 2017 : 73,66% 2018 : 78,42%	- Tercapainya jumlah pasien miskin /pasien bermasalah yang dilayani

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat **Tujuan :** Terwujudnya pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dan pasien bermasalah	(KLB), Gizi buruk dan lain-lain 3. Pasien yang tidak memiliki asuransi kesehatan 4. Pemeriksaan Napza yang diminta oleh pihak kepolisian 5. Visum dengan korban kekerasan pada perempuan dan anak 6. Pasien tidak mampu dan makan 1 (satu) orang penunggu pasien yang bermasalah - Masyarakat yang mendapat dana bantuan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat terdiri	- Ada Surat Keputusan Direktur yang mengatur pemakaian dana ini **Manfaat :** - Belum semua masyarakat mendapat bantuan dana Pasien bermasalah ini					2019 :83% 2020 : BAIK dengan rincian : -Rawat Jalan : 95% - Rawat Jalan : 90% - IGD : 86%	

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	dari laki-laki dan perempuan yang mendapat hak yang sama - Jumlah kunjungan pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2020 adalah : IGD : 8.457 Rawat jalan : 86.336 Rawat inap : 7.716 - Jumlah kunjungan pasien yang mendapatkan bantuan dengan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat tahun 2020 berjumlah : 274 orang yang - Data Sarana dan prasarana RSUD Dr.M Zein Painan berdasarkan data ASPAK (Aplikasi							

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan) terpenuhi sebanyak 64,64 % - Jumlah SDM RSUD Dr. M. Zein Painan tahun 2020 : 688 orang - Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan 356 orang							

Painan, 25 Juni 2021
Direktur,

dr. H. SUTARMAN, MM
NIP. 196907092001121002

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat.

Kegiatan/sub kegiatan : - Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan.
- Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.

Tangggal Verifikasi : 24 juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Zuharpen	
2		
3	Desri Lakumi Sari (Dinas PPPA)	
4	Irnawati	

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

KEGIATAN : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Pekerjaan : rehab ruangan IGD PONEK

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat **Kegiatan :** Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	- Instalasi Gawat Darurat RS merupakan salah satu instalasi yang memberi penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit. IGD adalah salah satu unit pelayanan di Rumah Sakit yang menyediakan penanganan awal (bagi pasien yang datang langsung ke rumah sakit)/lanjutan (bagi pasien rujukan dari fasilitas pelayanan	**Akses:** - Ruangan IGD untuk pelayanan kebidanan belum sesuai dengan standar **Partisipasi:** - Kurangnya lahan untuk pengembangan rumah sakit, sehingga membuat terhambatnya pembangunan dan pengembangan RS **Control :** Sudah adanya bagian/petugas untuk menangani pasien dengan kasus gawat darurat, akan	- Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan pasien di IGD khususnya pasien dengan kasus kebidanan	- Kurangnya lahan untuk pengembangan RS khususnya untuk pengembangan IGD RS	Terwujudnya Rehab ruangan IGD PONEK	- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait tentang rencana rehab ruangan IGD PONEK - Mengajukan usulan proposal untuk pengadaan sarana dan prasarana menanggulangi banjir yang terjadi di RSUD Dr. M. Zein Painan	- RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah yang berada di pusat kota Painan. - RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sudah terakreditasi dengan Bintang 4 dengan status terakreditas	**Output :** Terwujudnya rehab ruangan IGD PONEK **Outcome :** Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan baik karena terpenuhinya sarana dan

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Pekerjaan : rehab ruangan IGD PONEK **Tujuan :** Terwujudnya Rehab IGD PONEK	kesehatan lain), menderita sakit ataupun cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya (Permenkes RI No. 47 tahun 2018) - IGD memiliki tujuan utama diantaranya adalah menerima, melakukan triage, menstabilisasi, dan memberikan pelayanan kesehatan akut untuk pasien, termasuk pasien yang membutuhkan resusitasi dan pasien dengan tingkat kegawatan tertentu (Australasian Collage for Emergency	tetapi belum maksimal karena sarana dan prasarana belum memadai. **Manfaat :** - Masyarakat belum maksimal merasakan kenyamanan dalam pelayanan di IGD khususnya untuk pelayanan kebidanan di IGD					i UTAMA. -	prasarana terkait penanganan kasus kebidanan di IGD

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Medicine, 2014). - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Muhammad Zein Painan, adalah salah satu institusi kesehatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang didirikan pada tahun 1930 dengan nama Rumah Sakit Pembantu yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Mulai beroperasi pada tahun tersebut dengan beberapa orang tenaga perawat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi penderita asma, TBC dan malaria,							

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	karena pada saat itu pada umumnya masyarakat Pesisir Selatan cenderung menderita penyakit tersebut. Setelah Indonesia merdeka Rumah Sakit ini diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan dengan demikian maka seluruh pendanaan Rumah Sakit dibantu oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dengan status RSU tipe D. Sejalan dengan perkembangan pembangunan di bidang kesehatan, maka pada tahun 1970-an Rumah Sakit ini sudah dilengkapi dengan tenaga medis, keperawatan, non keperawatan, dan							

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	non medis serta alat-alat penunjang lainnya. - Berdasarkan SK Menkes RI No. 51/Menkes/Sk/I/79 tanggal 2 Februari 1979, sebagai Rumah Sakit Kelas D dengan kepemilikan PemdaTk.I. Dengan Keputusan Menkes tanggal 15 Desember 1993 Nomor 1154/Menkes/SK/XII/1993 menjadi kelas C milikPemda Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan dengan tempat tidur sebanyak 53 buah. Nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein							

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Painan diangkat dari nama seorang dokter pertama dan putera daerah Pesisir Selatan yang lahir di Bayang. Beliau menjadi dokter pada tahun 1940-an ditengah – tengah zaman penjajahan Belanda dimana pada masa itu tenaga medis dan para medis sangat terbatas sedangkan jumlah penduduk yang mempunyai masalah kesehatan cukup banyak di Pesisir Selatan, sehingga kehadiran beliau sebagai seorang dokter dirasakan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Pesisir Selatan pada saat							

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	itu. Untuk saat ini RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 180 tempat tidur. - RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit dalam lokus penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Kondisi sekarang IGD bergabung antara IGD biasa dan IGD PONEK. Untuk IGD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan hanya memiliki 2 bed (tempat tidur) untuk pasien							

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	kebidanan, dan IGD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sangat kecil sekali yang hanya bisa menampung sekita 8 (delapan) orang pasien umum sehingga diperlukan juga perluasan IGD. Dan untuk ruangan rawat inap kebidanan sendiri masih terpisah antara ruangan VK dan ruangan bangsalnya sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penggabungan antara IGD PONEK dengan ruangan VK dan ruang bersalin kebidanan. Hal ini							

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	bertujuan untuk menfokuskan pemberian pelayanan yang optimal terhadap pasien kebidanan dalam penurunan AKI dan AKB. - Jumlah kunjungan pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah : IGD 2016 : 19.165 orang IGD 2017 : 15.003 orang IGD 2018 : 15.498 orang IGD 2019 : 13.831 orang IGD 2020 : 8.457orang - Data Sarana dan prasarana RSUD Dr.M Zein Painan berdasarkan data ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana							

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	dan Peralatan Kesehatan) terpenuhi sebanyak 64,64 % • Jumlah SDM RSUD Dr. M. Zein Painan tahun 2020 : 608 orang • Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan di tahun 2020 adalah 356 orang							

Painan, 25 Juni 2021
Direktur,

dr. H. SUTARMAN, MM
NIP. 196907092001121002

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Program : Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan/sub kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Tangggal Verifikasi : 24 juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Zuharpen	
2	Zefdesi	
3	Desri Lalumidarti (Pintar PPHPA)	
4	Irnawati	

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pesisir Selatan
TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketentraman Umum (Keg. Penanganan Gangguan Ketentraman & ketertiban Umum dalam 1 Daerah kabupaten/ Kota, Keg. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan bupati/ wali kota) 2. Program Penanggulangan Kebakaran (Keg. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota)
KODE PROGRAM	1.05.01
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) a. Sasaran kegiatan adalah Masyarakat Pesisir Selatan b. Kegiatan ini diadakan dalam rangka untuk pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Kab. Pesisir Selatan. c. Adanya Perda No. 1 Tahun 2016 tentang ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum d. Luas Wilayah Pesisir Selatan 5.749,89 km2 e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 332.3/118/kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2020 f. Sosialisasi tentang kebakaran yang sudah dilakukan sebanyak 5 nagari
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan **Akses :** 1). Masih belum terjangkaunya seluruh Kab. Pesisir Selatan dalam operasi pengendalian ketentraman dan ketertiban umum 2). Jumlah Penduduk Pesisir Selatan 460.716 jiwa (laki-laki 49.61% dan Perempuan 50,39%) **Partisipasi :** 1). Masih Ada Masyarakat yang belum mematuhi perda No. 1 tahun 2016 2). Masyarakat belum merasakan manfaat sepenuhnya terhadap pengendalian ketentraman sesuai Perda No. 1 Tahun 2016 3). Kurang Responnya Masyarakat Nagari terhadap Kententraman dan Ketertiban Umum di lingkungannya. **Manfaat :** - belum terkavernya seluruh wilayah Pesisir Selatan untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum b. Penyebab Internal 1). Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan dapat memperlambat jalannya perkembangan kepaturan masyarakat terhadap peraturan yang ada 2). Kurangnya SDM Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 3). Jauhnya jarak tempuh antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya dalam menegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4). Harus diadakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang Perda No. 1 Tahun 2016 agar masyarakat dapat memahami pelanggaran yang mereka lakukan c. Penyebab Eksternal 1). Kurang mematuhi masyarakat terhadap Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum 2). Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum 3). Pedangan yang kurang memahami tempat menjual barang dagangannya

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur a. Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kab. Pesisir Selatan		
	2. Indikator dan Target Kinerja a. Sub Keg. Penanganan Gangguan Ketentraman & ketertiban Umum dalam 1 Daerah kabupaten/ Kota Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum b. Sub Keg. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan bupati/ wali kota) c. Sub Keg. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota)		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 7.375.052.160,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Keg. Penanganan Gangguan Ketentraman & ketertiban Umum dalam 1 Daerah kabupaten	
		Sub Keg. Pencegahan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum	
		Masukan	Rp. 2.100.000.000,-
		Keluaran	Adanya Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Hasil	adanya rasa aman dan nyaman di lingkungan
	Kegiatan 2	Keg. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan bupati/ wali kota	
		Sub Keg. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupatiwalikota	
		Masukan	Rp. 350.000.000,-
		Keluaran	Penegakan Perda dan Perkada
		Hasil	Terciptanya Penegakan Perda dan Perkada pada Masyarakat
	Kegiatan 3	Keg. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota)	
		Sub Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah/ Kota	
		Masukan	Rp. 5.200.000.000,-
		Keluaran	Adanya operasional pemadam kebakaran
		Hasil	Terhindarnya kecemasan masyarakat tentang bahaya kebakaran

Painan, 23 Juni 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PESISIR SELATAN

DARUPAL, S.Sos, M.Si

NIP. 19680805 199009 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pesisir Selatan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum **Kegiatan** : • Penanganan Gangguan Ketentraman & ketertiban Umum dalam 1 Daerah kabupaten/ Kota • Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan bupati/ wali kota **Program** : Penanggulangan Kebakaran **Kegiatan** : Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	• Sasaran kegiatan adalah Masyarakat Pesisir Selatan • Kegiatan ini diadakan dalam rangka untuk pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Kab Pesisir Selatan • Adanya Perda No 1 Tahun 2016 tentang ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum • Luas Wilayah Pesisir Selatan 6.749,89 km2 • Melakukan pembinaan di sekolah SLTP/SLTA 2019 • Keputusan Bupati Pesisir Selatan No 332.3/118/Kpts/BP T-PS/2020 tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan	**Akses** : • Masih belum terjangkaunya seluruh Kab Pesisir Selatan dalam operasi pengendalian ketentraman dan ketertiban umum • Jumlah Penduduk Pesisir Selatan 460.716 jiwa (laki-laki 49,61% dan Perempuan 50,39%) **Partisipasi** : • Masih Ada Masyarakat yang belum mematuhi perda No 1 tahun 2016 • Masyarakat belum merasakan manfaat sepenuhnya terhadap pengendalian ketentraman pasca Perda No 1 Tahun 2016	• Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan dapat memperlambat jalannya perkembangan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada • Kurangnya SDM Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Jauhnya jarak tempuh antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya dalam menegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum • Harus diadakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang Perda No. 1 Tahun 2016 agar masyarakat dapat memahami pelanggaran yang mereka lakukan	• Kurang mematuhi masyarakat terhadap Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum • Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum • Pedagang yang kurang memahami tempat menjual barang dagangannya	• Tercapainya tugas pemeliharaan dan penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan • Tegaknya peraturan daerah, peraturan/keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya demi terselenggaranya kepemerintahan yang baik	**Kegiatan I** •Ketersediaan anggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum •Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran •Perekrutan Satpol PP Pada tingkat Kecamatan. **Kegiatan II** • Mengadakan sosialisasi kepada Masyarakat Tentang Perda No. 1 Tahun 2016 •Membuat sanksi atas pelanggaran Perda No.1 tahun 2016 **Kegiatan III** •Sosialisasi Pemadam kebakaran disetiap nagari (20 nagari)	**Rumusan kinerja output** : Adanya Perda No. 1 Tahun 2016 tentang ketentraman	**Kegiatan 1:** Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota **Sub Keg** Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum **Input :** **Rp. 2.100.000.000,-** **Output:** Adanya Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan di 15 kecamatan **Outcome:** adanya rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat **Kegiatan 2:** Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/ Wali kota **Sub. Keg.** Penanganan atas pelanggaran peraturan

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Tujuan : - Terkendalinya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan Perda No. 1 Tahun 2016	Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2020 - Sosialisasi tentang kebakaran yang sudah dilakukan sebanyak 5 nagari	- Kurang responnya masyarakat nagari terhadap ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya. Manfaat : - belum terkavernya seluruh wilayah Pesisir Selatan untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			dan tegaknya suprimasi hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan - Terjalinnya kerjasama yang harmonis dengan aparat kepolisian negara RI/TNI dalam pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; - Tercapainya kerjasama dengan SKPD dalam mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten			daerah dan Peraturan bupati/ Walikota Input : Rp. 350.000.000,- Output: - Adanya Penegakan Perda dan Perkada - Membuat aturan atas pelanggaran Perda No 1 tahun 2016 Outcome: Terciptanya Penegakan Perda dan Perkada di 15 kecamatan Kegiatan 3: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub. Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Input : Rp. 5.200.000.000,-

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
					Polcir Selatan - Tercapainya tugas pembinaan trantibum dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penanganan gangguan kantibmas; - Terkordinasinya tugas-tugas penyelesaian persoalan trantibum/kantibmas yang timbul di tengah-tengah masyarakat; - Meningkatnya disiplin dan percaya diri aparat Satpol PP dalam berbagai situasi dalam menghadapi tugas di lapangan, serta			Output: - Adanya Operasional Pemadam Kebakaran dan Penambahan Perconil - Terlaksansnya sosialisasi tentang pemadam kebakaran terhadap 20 nagari Outcome: - Terhindarnya kecemasan masyarakat tentang bahaya kebakaran - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya dan penanggulangan bencana kebakaran.

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
					meningkatnya profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.			

Painan, 23 Juni 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

DARJPAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19680305 199009 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : SATPOL PP

Program : Peningkatan ketentraman & ketertraman Umum

Kegiatan : - Penanganan Gangguan ketentraman & ketertiban umum dlm 1 Daerah kab/kota.
- Penegakan Peraturan Daerah kab/kota & Peraturan Bupati/walikota.

Tangggal Verifikasi : 23 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1	Irnawati (BPKAD)	
2	Desri Lakusmidarti (Dinkes PP&PA)	
3	Zuharpan	
4		

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : SATPOL PP

Program : Penanggulangan Kebakaran

Kegiatan : Pencegahan kebakaran Dalam Daerah kab/kota.

Tangggal Verifikasi : 23 juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	Zuhanger	
3	Irnalwati (BPKAD)	
4	Dewi Lalumidarti (Dinas PPPA)	

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**
KODE PROGRAM	
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. b. Luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 18.800 Ha. c. Luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang lokasinya berada di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 22.540 Ha. d. Luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 20.907 Ha dengan jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak 249 buah. e. Komisi Irigasi dengan membentuk kelompok P3A yang berbadan hukum sebanyak 26 kelompok. **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** **a. Faktor Kesenjangan** - Aspek Akses ✓ Perlunya pengaturan pembagian air irigasi yang merata untuk kelancaran pola tanam bagi petani. ✓ Perlunya pembinaan secara teknis terhadap kelompok P3A dalam pembagian air irigasi. - Aspek Partisipasi ✓ Pengaturan air irigasi secara mandiri oleh petani sendiri dengan membentuk kelompok masyarakat diwakili oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) ✓ Untuk menjembatani antara P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah. - Aspek Kontrol ✓ Dalam pelaksanaan pembinaan P3A diketahui oleh Pimpinan - Aspek Manfaat ✓ Terkelolanya jaringan irigasi ✓ Terbaginya air untuk pola tanam secara merata ✓ Terpeliharanya aset irigasi ✓ Berkelanjutannya sistem irigasi ✓ Tersedianya laporan pemakaian air

Dipindai dengan CamScanner

	b. Penyebab Internal 1. Lokasi daerah irigasi yang luas dan besar. 2. Akses lokasi daerah irigasi tidak ditempuh oleh akses jalan. **c. Penyebab Eksternal** 1. Perubahan Peraturan perundang-undangan yang sangat cepat. 2. Wabah covid 19 sangat mempengaruhi pemberdayaan kelompok P3A.		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** ✓ Jumlah P3A yang aktif (kelompok) ✓ Jumlah Klasifikasi irigasi yang ditingkatkan (DI) ✓ Jumlah P3A yang berbadan hukum ; ✓ Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan.		
	2. Indikator dan Target Kinerja a. Persentase capaian program b. Jumlah anggaran sebanyak Rp.75.000.000,- c. Jumlah kelompok P3A : 26 kelompok d. Terlaksananya pembinaan P3A		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp.75.000.000,-**		
RENCANA AKSI	**Sub Kegiatan** : Operasional Unit Pengelola Irigasi		
	Masukan	:	Rp.75.000.000,-
	Keluaran	:	Jumlah Kelompok P3A
	Hasil	:	Terbinanya kelompok P3A

Painan, 29 Juni 2021

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001

Dipindai dengan CamScanner

MATRIKS GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUAPTEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
NAMA KEBIJAKAN / PROGRAM / KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR	INDIKATOR GENDER
Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) **Kegiatan :** Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota **Sub Kegiatan** : Operasional Unit Pengelola Irigasi 1. Tujuan dari Kegiatan Komisi Irigasi	**Komisi Irigasi** **Dasar hukum/undang-undang peraturan** Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria – Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di	Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain : a. Aspek Akses Pengaturan air irigasi untuk kelancaran pola tanam bagi petani. b. Aspek Partisipasi Pengaturan air irigasi secara mandiri oleh petani sendiri dengan membentuk kelompok masyarakat diwakili oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan	1. Lokasi daerah irigasi yang luas dan besar. 2. Akses lokasi daerah irigasi tidak ditempuh oleh akses jalan.	1. Perubahan Peraturan perundang-undangan yang sangat cepat. 2. Wabah covid 19 sangat mempengaruhi pemberdayaan kelompok P3A.	1. Indeks Pertanaman Padi (kali/tahun) 2. Indeks Kinerja Sistem Irigasi 3. Persentase Irigasi Kondisi Baik 4. Jumlah P3A yang aktif (kelompok) 5. Penanganan Bendung (unit) 6. Jumlah Klasifikasi irigasi yang ditingkatkan (DI) 7. Daerah Irigasi yang dilakukan OP (DI) 8. Jumlah P3A yang berbadan hukum 9. Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan	1. Penyusunan Perencanaan pekerjaan 2. Pelaksanaan rapat 3. Penyusunan laporan 4. Monitoring dan evaluasi	1. Jumlah dan luas Daerah Irigasi 2. Jumlah P3A yang berbadan hukum.	**Input :** dana sebesar Rp.75.000.000,- **Output :** tersedianya operasional komisi irigasi **Outcome :** terbinanya kelompok P3A

Dipindai dengan CamScanner

ini adalah meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan irigasi	Kabupaten Pesisir Selatan sebesar **18.800 Ha** dan luas irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang lokasinya berada di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **22.540 Ha** sehingga total luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi **62.647 Ha,** dimana total luas irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai **20.907 Ha** dan jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak **249** buah DI yang merupakan kewenangan Kabupaten Berdasarkan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021, Bidang irigasi mempunyai beberapa indikator yang harus dicapai dalam 5 tahun mendatang. Adapun indikator bidang irigasi tersebut adalah : (1) Indeks	Petani Pemakai Air (GP3A) dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). untuk menjembatani antara P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah. c. <u>Aspek Kontrol</u> Peningkapatan Jaringan Irigasi, Pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset irigasi, pengaturan air irigasi, keberlanjutan sistem irigasi dan pelaporan d. Aspek Manfaat Terkelolanya jaringan irigasi, terbaginya air untuk pola tanam secara merata, terpeliharanya aset irigasi sehingga berkelanjutanny a sistem irigasi, dan tersedianya laporan pemakaian air.						

Dipindai dengan CamScanner

	Pertanaman Padi (kali/tahun) ; (2) Indeks Kinerja Sistem Irigasi ; (3) Persentase Irigasi Kondisi Baik ; (4) Jumlah P3A yang aktif (kelompok) ; (5) Penanganan Bendung (unit) ; (6) Jumlah Klasifikasi irigasi yang ditingkatkan (DI) ; (7) Daerah Irigasi yang dilakukan OP (DI) ; (8) Jumlah P3A yang berbadan hukum ; (9) Jumlah P3A yang dilakukan pembinaan. Untuk mencapai target diatas maka harus ada kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pada bidang irigasi kelompok masyarakat diwakili oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). untuk menjembatani antara P3A/GP3A/IP3A							

Dipindai dengan CamScanner

	dengan Pemerintah maka dibentuk **Komisi Irigasi** dengan membentuk kelompok P3A yang berbadan hukum sebanyak **26 kelompok**, dimana komisi irigasi ini berfungsi untuk membantu dan mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang irigasi untuk daerah irigasi di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya meliputi : Peningkapatan Jaringan Irigasi, Pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset irigasi, pengaturan air irigasi, keberlanjutan sistem irigasi dan pelaporan.							

Painan, 29 Juni 2021
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Ir. H. DONI GUSRIZAL, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan /sub keg. : Operasional Unit Pengelola Irigasi

Tangggal Verifikasi : 24 juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	Zuhaeper	
3	Irnawan (BPKAD)	
4	Dewi Yalumidarti (Dinas PPPA)	

Dipindai dengan CamScanner

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	**Pengembangan iklim penanaman modal**		
KODE PROGRAM	**2.18.02.**		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** 1. Jumlah Investor masih sedikit yang berinvestasi (34 Investor yang berinvestasi) 2. Jumlah realisasi Investasi masih sedikit (Rp 345,019,215,304,-) 3. Jumlah Promosi Investasi dilakukan melalui media masih kurang (2 kali expo, 1 kali video melalui TVRI Padang, 5 baliho, 1 kali media cetak) 4. Jumlah Peminat pengurus izin Perempuan lebih sedikit dari laki laki		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** 1. Pembebasan lahan yang terkendala menghambat perkembangan Investasi seperti pemilikan tanah ulayat dan lahan TNKS 2. Masyrakat belum menerima secara terbuka terhadap Investor yang akan berinvestasi 3. Regulasi yang tumpang tindih terhadap investasi seperti, RTRW dll sehingga menjadi kendala dalam berinvestasi **b. Penyebab Internal** 1. Ketersedian anggaran yang belum cukup 2. SDM Pengelola belum maksimal untuk menarik Investor dalam berinvestasi 3. Kurangnya sosialisasi perizinan dan non perizinan. **c. Penyebab Eksternal** 1. Kurangnya minat Investor dalam berinvestasi karena masih tumpang tindihnya regulasi 2. Lambatnya realisasi Investasi 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin perizinan dan non perizinan 4. Sulitnya pembebasan lahan masyarakat.		
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** ➢ Memiliki izin usaha yang telah dilegalisasi ➢ Memberikan pelayanan dan kenyaman dalam berinvestasi ➢ Tingginya penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat meningkat.		
	2. Indikator dan Target Kinerja 100 % 114.258.570.00 4.025 izin yang diterbitkan 100 % dari target		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp 114.258.570.00**		
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**		
		Masukan	**Rp 114.258.570.00**
		Keluaran	4,025 . buah izin
		Hasil	100 %

Painan, 1 Juni 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. SUARDI, S. M.Si
Nip. 19610324 198603 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Verifikasi

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengembangan iklim penanaman modal **Kegiatan** : 1. penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal 2. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota Tujuan : 1. Peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Pesisir Selatan 2. Indeks kepuasan masyarakat	1. Jumlah Investor masih sedikit (34 investor) yang berinvestasi 2. Jumlah realisasi Investasi masih sedikit Rp 345,019,215,304 3. Jumlah Promosi Investasi sudah dilakukan melalui media (1 kali video belalui TVRI Padang, 5 baliho, 1 kali media cetak) 4. Jumlah Peminat	Akses : 1. Pembebasan lahan yang terkendala disebabkan berbagai hal seperti pemilikan tanah ulayat dan lahan TNKS Partisipasi : 1. Masyarakat belum menerima secara terbuka terhadap investor yang mau berinvestasi 2. Regulasi yang tumpang tindih terhadap investasi seperti izin lingkungan, RTRW dll sehingga menjadi kendala dalam	1. Ketersedian anggaran yang belum mencukupi 2. SDM pengelola belum maksimal untuk menarik investor berinvestasi. 3. Kurangnya sosialisasi perizinan dan non perizinan.	1. Kurangnya minat Investor dalam berinvestasi karna masih tumpang tindihnya regulasi pemerintah 2. Lambatnya realisasi investasi 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin perizinan dan non perizinan	1. Meningkatnya Investasi dari Investor 2. Tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi untuk berkunjung 3. Memberikan pelayanan yang mudah untuk investor dalam berinvestasi.	1. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengurusan izin secara gratis 2. Penyebarluasan promosi melalui media elektronik 3. Layanan melalui kecamatan-kecamatan secara gratis	1. Jumlah Investor yang masuk PMDN/PMA 2. Jumlah Relasisasi Investasi Rp 345,019,215,304 3. Jumlah izin yang dikeluarkan perizinan dan Non perizinan 120 jenis izin	Output : izin yang dikeluarkan sebanyak 4,025 buah izin Outcome : Meningkatnya Jumlah izin yang dikeluarkan Jumlah Investor bertambah untuk berinvestasi

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Fakta/Fenomena Yang Terjadi)	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan (Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Terjadi) (Akses, Partisipasi Dan Kontrol)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Kinerja
3. Penyediaan data potensi dan peluang investasi	Pengurus Izin Perempuan lebih sedikit dari Laki-laki 5. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan tahun 2020 dari 200 sampel yang diambil 171 merasa puas	berinvestasi Kontrol : Dasar hukum sebagai payung hukum untuk investasi belum singkron antara instansi terkait Manfaat : Tingginya penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat		4. Sulitnya pembebasan lahan dari masyarakat	4. Tersedianya jaringan Aplikasi secara online dalam mengurus izin untuk berinvestasi		4. Jumlah Promosi yang dilakukan melalui Pameran dalam daerah dan Luar Daerah 2 kali	Promosi yang dilakukan melalui Dalam Daerah dan Luar daerah

Painan, Juni 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. S u a r d i, S. M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Lembar Verifikasi GAP dan GBS Tahun 2022

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Program : Pengembangan iklim penanaman modal

Kegiatan : - Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif & kemudahan penanaman modal.
- Penyediaan peta potensi & peluang usaha kab/kota.

Tangggal Verifikasi : 18 Juni 2021

No	TPM Driver PPRG	Tanda Tangan
1		
2	Zuhaiger	
3	Irnawati (BPKAD)	
4	Dewi Lalumidarti (Dinas PPPA)	

Dipindai dengan CamScanner